**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411 - 0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# PENGARUH *BLOCKHOLDERS OWNERSHIP, FIRM SIZE DAN LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

**Makhdalena**
*gelatik14@yahoo.co.id*
**FKIP Universitas Riau**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to reexamine and analyze the influence of blockholders ownership, firm size and leverage of the company's financial performance in the manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population of this research is the manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) totaling 131 companies (ICMD, 2013). This study used purposive sampling with the observations of 2008-2012 and who had complete data in accordance with the purpose of the study was at 30 years of observation. The shape of the data from this study are secondary data obtained with documentation techniques sourced from ICMD. Methods of data analysis in this study using path analysis with the help of SPSS program package. The results of this study show that blockholders ownership, firm size and leverage has a negative effect but not significant to the financial performance of the company. The results of this study would be useful to: (1) Manager in making financial decisions with regard financial leverage to maximize the company's financial performance; (2) Investors, using voice held to oversee the management in making financial policy that the company's financial performance can be optimized; (3) The regulator, in making policy on the provision of a minimum share ownership and maximum stock ownership.*

*Key words: blockholders ownership, firm size, leverage and financial performance.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali dan menganalisis pengaruh *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 131 perusahaan (ICMD, 2013). Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan tahun pengamatan 2008-2012 dan yang memiliki data lengkap sesuai dengan tujuan penelitian adalah berjumlah 30 tahun pengamatan. Bentuk data dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari ICMD. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* dengan bantuan paket program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *blockholders ownership, firm size dan leverage* memiliki pengaruh yang negative tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: (1) Manager dalam membuat keputusan keuangan dengan memperhatikan *financial leverage* untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan; (2) Investor, dengan menggunakan suara yang dimiliki untuk mengawasi manajemen dalam membuat kebijakan keuangan agar kinerja keuangan perusahaan dapat lebih optimal; (3) Regulator, dalam membuat kebijakan tentang ketentuan jumlah kepemilikan saham minimal dan kepemilikan saham maksimal.

Kata kunci: *blockholders ownership, firm size, leverage* dan kinerja keuangan perusahaan.

## PENDAHULUAN

*Modern Corporation Theory* (Berle and Means, 1932) menyatakan bahwa dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian (pemilik/principal) dengan aktivitas operasional. Dalam hal ini harus terdapat pemisahan antara *Board of Directors* sebagai

representasi dari pemegang saham yang melakukan fungsi pengendalian atas operasional perusahaan dan *Board of Management* sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan.

Pemisahan fungsi antara aktivitas pengendalian dan aktivitas operasional bertujuan agar masing-masing fungsi dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya masing-masing. Jadi tidak terdapat tumpang tindih antara aktivitas operasional dengan aktivitas pengendalian.

Diharapkan dengan adanya pemisahan fungsi antara aktivitas pengendalian dan aktivitas operasional, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien, yaitu dengan mengharuskan dilakukannya spesialisasi fungsi pada perusahaan. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal.

Pemisahan fungsi antara aktivitas pengendalian dalam hal ini pemegang saham dan aktivitas operasional dalam hal ini manajemen, berarti disini terdapat hubungan keagenan. Jensen and Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan.

Pemisahan antara pemilik dan pengelola akan menimbulkan potensi konflik. Potensi konflik timbul akibat sifat alamiah kemanusiaan dari *agent* dan *principal*, yaitu *self-interested*. Jensen and Meckling (1976) menganggap ada konflik kepentingan yang alamiah antara *outside shareholders* (pemegang saham dari luar) dengan para manajer perusahaan karena ada kemungkinan manajer akan mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengorbankan para pemegang saham. Konflik antara manajer dengan pemegang saham disebut juga dengan istilah *agency problem*. *Agency problem* (masalah keagenan) timbul akibat dari pemisahan tugas antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham.

*Agent* dan *principal* keduanya adalah pemaksimum utilitas, maka menurut Jensen dan Meckling (1976) ada alasan untuk percaya bahwa *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Hal ini dapat dilakukan *agent* karena *agent* memiliki informasi yang lebih banyak (*assimetry informasi*) dari pada *principal*. Maka, untuk meningkatkat kemakmurannya, ada alasan untuk percaya bahwa *agent* akan melakukan manipulasi. Manajer adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas secara langsung dengan kompensasi dalam rangka meningkatkan kemakmurannya (Belkaoui, 2004).

Scott (2006) mengemukakan ada dua tipe hubungan *principal-agent* yang muncul dalam sistem pengendalian manajemen: (1) pemegang saham atau pemilik perusahaan bertindak sebagai *principal* menyewa manajer untuk menjalankan perusahaannya; dan (2) pimpinan perusahaan juga *principal* menyewa *agent* devisi untuk menjalankan devisi secara desentralisasi. Karena itu baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional yang berusaha memaksimumkan utilitasnya.

Manajer diangkat oleh pemegang saham (pemilik), maka idealnya manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham (pemilik), namun dalam praktek sering timbul konflik. Kenyataannya tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemilik. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah-masalah keagenan yang timbul dari konflik kepentingan merupakan hal yang umum bagi hampir seluruh aktivitas kerja sama antara individu yang memiliki kepentingan.

Menurut Agrawal dan Knoeber (1996), dari hasil penelitiannya di United State, mekanisme *control* yang dapat dilakukan atas *agency problem* antara lain adalah dengan *blockholders ownership, firm size* dan *leverage*. Begitu juga dengan penelitian yang

dilakukan oleh Hartzell dan Starks (2000) menemukan bahwa *blockholders ownership* positif berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ojo (2012) melakukan penelitian di Nigeria dengan menggunakan *Vector Auto Regression* untuk data tahun 1992 dan 2005 menemukan hasil bahwa *leverage* signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di Nigeria.Tetapi hasil penelitian yang lain terjadi ketidak-konsistenan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber (1996), Hartzell dan Starks (2000), dan Ojo (2012) seperti penelitian yang dilakukan oleh Surifah (2013) pada bank umum nasional di Indonesia untuk data tahun 2007-2009 dengan *firm size* sebagai variabel *control* tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan begitu juga terhadap variabel *control* kepemilikan terkoncentrasi juga tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee (2003) pada perusahaan Chaebol dan non chaebol yang listing di Korean Stock Exchange (KSE) juga memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Surifah (2013), yaitu memberikan hasil bahwa *blockholders ownership* tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, khusus untuk perusahaan non chaebol sementara untuk perusahaan chaebol, blockholders berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan untuk leverage baik perusahaan chaebol maupun non-chaebol berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2010) bahwa *firm size* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Li (2008) pada perusahaan publik di UK untuk data tahun 2004 membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan untuk data tahun 2005, leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan untuk firm size pada data tahun 2004 dan 2005 berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi dengan ketidak konsistenan hasil penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti ulang tentang variabel tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu: Apakah *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *blockholders ownership, firm size* dan *financial leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: (1) Manager dalam membuat keputusan keuangan dengan memperhatikan *financial leverage* untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan; (2) Investor, dalam menggunakan suara yang dimiliki untuk mengawasi manager agar kinerja keuangan perusahaan dapat lebih optimal; (3) Regulator, dalam membuat kebijakan tentang ketentuan jumlah kepemilikan saham minimal dan maksimal.

## TINJAUAN TEORETIS

### 1. Modern Corporation Theory

Modern Corporation Theory (Berle and Means, 1932) menyatakan bahwa dalam perusahaan harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas pengendalian dengan aktivitas operasional (pengelolaan) agar masing-masing fungsi dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya masing-masing dan tidak terdapat tumpang tindih antara aktivitas operional dengan aktivitas pengendalian. Dengan adanya pemisahan antara pemilik (pengawasan) dan pengelola, maka diharapkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Jadi dengan melakukan spesialisasi diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuan dengan optimal.

2. **Agency Theory**

Penelitian ini didasarkan pada agency theory (teori keagenan) dari Jensen dan Meckling (1976). Modern Corporation Theory (Berle and Means, 1932) menyatakan bahwa dalam perusahaan harus terdapat pemisahan antara aktivitas pengendalian (pemilik) dengan aktivitas operasional (pengelola). Dengan adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan pengelola, berarti disini terdapat hubungan antara pemilik (pemegang saham /principal) dan pengelola (manajer/agent) sebagaimana yang dijelaskan dalam agency theory dari Jensen dan Meckling (1976), yaitu terdapat hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, maka principal akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada *agent* dan hubungan ini diatur dalam suatu kontrak.

Manajer diangkat oleh pemegang saham, idealnya manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham, namun dalam praktik sering timbul konflik. Kenyataannya tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemilik. Jensen dan Meckling (1976) menganggap ada konflik kepentingan yang alamiah antara pemegang saham dari luar dengan manajer perusahaan karena ada kemungkinan manajer akan mengambil keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan mengorbankan para pemegang saham dan konflik ini disebut juga dengan istilah *agency problem*. *Agency problem* terjadi karena menurut Scott (2006) baik *principal* maupun *agent* diasumsikan adalah sebagai manusia ekonomi rasional yang berusaha memaksimumkan utilitasnya.

Untuk mengatasi masalah keagenan (*agency problem*), Agrawal dan Knoeber (1996) telah melakukan penelitian pada perusahaan di US dengan judul *Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problem between Managers and Shareholders*. Mekanisme *control* yang digunakan untuk mengatasi *agency problem* yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan antara lain adalah dengan *blockholders ownership*, *leverage* dan *firm size*.

3. **Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan tiga pendekatan berikut ini, yaitu (1) pendekatan laba akuntansi dengan alat ukur yang biasanya dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu: dengan menggunakan *Return on Assets*, kedua dengan *Return on Equity*; *ketiga Earnings per share,* keempat *net assets per share,net profit, return on capital employed* (2) pendekatan arus kas, yaitu pendekatan penghitungan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan atau berdasarkan arus kas bersih selama satu periode; (3) pendekatan nilai tambah (*Economic Value Added*); dan terakhir (4) dengan *Tobin's Q*.

Agrawal dan Knoeber (1996) telah melakukan penelitian di United State mengenai mekanisme *control agency problem* dan kinerja keuangan perusahaan, yang mana kinerja keuangan perusahaan pada penelitian tersebut menggunakan indikator *Tobin's Q*. Sementara Ojo (2012) melakukan penelitian di Nigeria mengenai pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan *Vector Auto Regressive* untuk data tahun 1993 dan 2005, dimana kinerja keuangannya menggunakan indikator *earning per share* (EPS) dan *net assets per share* (NAPS).

Rajkumar (2014) telah melakukan penelitian pada John Keells Holdings plc di Sri Lanka pada data periode 2006-2012 dengan menggunakan regresi. Untuk indikator kinerja keuangan perusahaan (*financial performance*), Rajkumar (2014) menggunakan *Net Profit*, *Return on Equity* (ROE) dan

*Return on Capital Employed* (ROCE). Kim dan Lee (2003) telah melakukan penelitian pada perusahaan yang listing di Korean Stock Exchange dengan menggunakan regresi. Dan untuk indikator kinerja keuangan perusahaan, Kim dan Lee (2003) menggunakan *return on assets* (ROA)

Pratheepkanth (2011), telah melakukan penelitian pada perusahaan bisnis yang listing di *Colombo Stock Exchange* untuk data periode 2005-2009 dengan menggunakan regresi. Dan untuk indikator kinerja keuangan perusahaan, Pratheepkanth (2011), menggunakan *gross profit, net profit, ROCE, ROE* dan *ROA.*

Zhang dan Li (2008) telah melakukan penelitian pada perusahaan publik yang listing di UK mengenai pengaruh *capital structur* terhadap *Agency costs* dengan menggunakan regresi untuk data periode 1995-2005. Pada penelitian ini, Zhang dan Li (2008) menggunakan *performance* sebagai variabel kontrol dengan ROA sebagai indikatornya.

Fauzi dan Locke (2012) telah melakukan penelitian pada perusahaan yang listing di New Zealand Stock Exchange untuk data periode 2007-2011 dengan menggunakan regresi mengenai *board structure, ownership* dan *firm performance*. Dalam penelitian ini, Fauzi dan Locke (2012) menggunakan ROA dan *Tobin's Q* untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan (*performance*). Selanjutnya Surifah (2013) melakukan penelitian pada bank umum nasional di Indonesia untuk data periode 2007-2009 mengenai *family control, board of directors and Bank performance* dengan menggunakan regresi. Untuk indikator *performance bank*, Surifah (2013) menggunakan ROA, ROE dan Non Performing Loan (NPL).

Penelitian yang dilakukan oleh Pervan dan Visic (2012) untuk data tahun 2002-2010 mengenai *influence of firm size on its business success* dengan menggunakan regresi. Pada penelitian ini Pervan dan Visic (2012) mengukur *business success* dengan indikator ROA dan ROE serta *firm size* dengan menggunakan indikator *natural logarimatotal assets* serta *leverage* dengan indikator rasio *debt dan total assets*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* dan *leverage* berpengaruh terhadap *profitabilitas.* Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2010) pada perusahaan yang listing di Bursa Malaysia, dengan memakai Tobin's Q untuk mengukur kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini untuk pengukuran kinerja keuangan perusahaan dihitung dengan menggunakan *Return on Assets.* (Kim dan Lee, 2003; Zhang dan Li, 2008; Pratheepkanth, 2011; Fauzi dan Locke, 2012; Surifah, 2013). Mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan menurut Agrawal dan Knoeber (1976) antara lain adalah dengan keberadaan blockholders, leverage dan firm size.

***a. Blockholders Ownership***

*Blockholders ownership* adalah pemegang saham dalam porsi besar (Lorett, N. Baryah, 2014). Sementara menurut Agrawal dan Knoeber (1996) kepemilikan saham dalam jumlah besar terdiri atas: kepemilikan saham oleh manajerial, kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan saham oleh individu (*blockholders ownership*). Menurut Kim dan Lee (2003), *blokcholders ownership* adalah kepemilikan saham oleh individu dan perusahaan, dimana kepemilikannya paling sedikit 5% dari jumlah saham yang beredar. *Blockholders ownership* memiliki peranan penting dalam pengelolaan perusahaan karena *blockholders ownership* dapat mengintervensi manajemen perusahaan dengan suara yang dimilikinya dalam rangka menentukan kebijakan yang akan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Agrawal dan Knoeber (1996) telah melakukan penelitian di United State mengenai mekanisme *control agency problem* dan kinerja keuangan perusahaan, yang mana salah satu mekanisme control dari *agency problem* adalah *blockholders ownership*. Dalam penelitian tersebut indikator dari *blockholders ownership,* Agrawal dan Knoeber (1996) menggunakan kepemilikan saham

oleh individu yang berasal dari luar perusahaan dengan porsi paling sedikit 5% dari total saham yang beredar.

Dalam penelitian ini pengukuran *blockholders ownership* menggunakan kepemilikan saham oleh individu yang berasal dari pihak luar paling sedikit 5% (Agrawal dan Knoeber, 1996; Kim dan Lee, 2003; Halioui dan Jerby, 2012).

**b. *Firm Size***

Besar atau kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total harta (*assets*) yang dimiliki oleh perusahaan dan dari jumlah penjualan (*sales*). Perusahaan yang besar biasanya memiliki *assets* yang besar dan dengan *assets* yang besar akan mendapatkan hasil atau penjualan yang besar pula dan begitu juga sebaliknya, perusahaan yang kecil akan memiliki *assets* yang kecil dan dengan *assets* yang kecil, juga akan mendapatkan hasil atau penjualan yang kecil.

Agrawal dan Knoeber (1996) telah melakukan penelitian di United State mengenai mekanisme *control agency problem* dan kinerja keuangan perusahaan, yang mana salah satu dari mekanisme *control* dari *agency problem* adalah *firm size*. Dalam penelitian tersebut indikator dari *firm size*, Agrawal dan Knoeber (1996) menggunakan *natural logaritma* nilai buku dari total *assets.* Sarifah (2013) melakukan penelitian pada bank umum nasional di Indonesia mengenai kinerja bank dengan *natural logaritma total assets* sebagai variabel kontrol

Penelitian yang dilakukan oleh Pervan dan Visic (2012) untuk data tahun 2002-2010 mengenai *influence of firm size on its business success* dengan menggunakan regresi. Pada penelitian ini Pervan dan Visic (2012) mengukur *business success* dengan indikator ROA dan *firm size* dengan menggunakan indikator *natural logarima total assets* sedangkan *leverage* menggunakan rasio *debt* dan *total asssets*. Penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2010) pada perusahaan yang listing di Bursa Malaysia, memakai total *assets* untuk mengukur *firm size.*

Dalam penelitian ini, untuk mengukur *firm size* digunakan *natural logaritma* dari *total assets*, hal ini sama dengan indikator penelitian yang digunakan oleh Agrawal dan Knoeber, (1996); Ghazali, M (2010); Surifah (2013); Pervan dan Visic (2012).

***c. Leverage***

*Leverage* merupakan ukuran untuk melihat seberapa besar harta (*assets*) yang ada pada perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang akan menimbulkan *monitoring* oleh *bondholders* dan hutang juga akan mengurangi kelebihan arus kas yang ada pada perusahaan sehingga akan mengurangi pemborosan oleh manajemen (Jensen. M, 1986).

Ojo (2012) melakukan penelitian di Nigeria dengan menggunakan *Vector Auto Regressive* untuk data tahun 1993 dan 2005, mengenai pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan untuk *leverge*, Ojo (2012) menggunakan indikator rasio dari hutang dan *equity*. Sementara Agrawal dan Knoeber (1996) telah melakukan penelitian di United State mengenai mekanisme *control agency problem* dan kinerja keuangan perusahaan, yang mana salah satu mekanisme *control* dari *agency problem* adalah *leverage*. Agrawal dan Koeber (1996) dalam mengukur *leverage* menggunakan rasio antara debt dan firm value.

Rajkumar (2014) telah melakukan penelitian pada John Keells Holdings plc di Sri Lanka dengan data periode 2006-2012 menggunakan regresi mengenai pengaruh *leverage* keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk indikator *leverage* keuangan perusahaan (*financial leverage*), Rajkumar (2014) menggunakan *debt equity ratio* dan *debt total assets ratio.*

Penelitian yang dilakukan oleh Pervan dan Visic (2012) untuk data tahun 2002-2010 dengan judul penelitian *influence of firm size on its business success* dengan menggunakan regresi. Pada penelitian ini Pervan dan Visic (2012) mengukur *business success* dengan indikator ROA dan *firm size* dengan menggunakan indikator *natural logaritma total assets* serta *leverage* dengan menggunakan rasio total hutang dengan total *assets.* Hasil

penelitian menunjukkan bahwa *firm size* dan *debt* rasio berpengaruh terhadap *profitabilis (performance).*

Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio antara total hutang dan total *assets* (Xiao, 2009; Zhang dan Li, 2008; Pervan dan Visic, 2012).

4. **Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh *Blockholders Ownership* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

*Blockholders Owneship* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena kepemilikannya yang besar, *blockholders ownership* dapat mengintervensi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan suara yang dimilikinya *blockholders ownership* dapat memainkan peranan yang penting dalam memonitor manajemen. Jika kinerja manajemen perusahaan tidak baik, maka *blockholders ownership* dapat mengganti mana jemen dengan yang lebih baik melalui suara yang dimilikinya. Pengaruh *blockholders ownership* terhadap kinerja keuangan perusahaan, ini juga telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berikut ini: Penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber (1996) dengan menggunakan regresi pada perusahaan di United State menyimpulkan bahwa *blockholders ownership* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012) pada perusahaan yang listing di New Zealand dengan regresi menghasilkan bahwa *blockholders ownership significant* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee (2003) pada perusahaan Chaebol dan non-chaebol yang listing di Korean Stock Exchange dengan *multivariate regression analysis*, juga menghasilkan bahwa *blockholders ownership* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan untuk perusahaan chaebol dan berpengaruh negative tetapi tidak signifikan untuk perusahaan non-chaebol

$H_1$ : *Blockholders Ownership* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

**Pengaruh *Firm Size* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

*Firm size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena perusahaan besar memiliki *assets* yang besar. Dengan memiliki *assets* yang besar, perusahaan akan memperoleh penghasilan yang besar pula. Pengaruh *firm size* terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber (1996) di United State dengan menggunakan regresi menyimpulkan bahwa *firm size* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan. Fauzi dan Locke (2012) juga telah membuktikan pada perusahaan yang listing di New Zealand dengan regresi menghasilkan bahwa *firm size* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya Zhang dan Li (2008) juga telah membuktikan dengan melakukan penelitian pada perusahaan yang *listing* di UK untuk sampel 323 perusahaan tahun 2004 dan 2005 dengan menggunakan regresi menghasilkan bahwa *firm size* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pervan dan Visic (2012) untuk data tahun 2002-2010 dengan judul penelitian *influence of firm size on its business success* dengan menggunakan regresi. Pada penelitian ini Pervan dan Visic (2012) mengukur *business success* dengan indikator ROA dan *firm size* dengan menggunakan indikator *natural logaritma total assets* serta *leverage* menggunakan rasio total hutang dengan total *assets*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* signifikan berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* dan *debt* rasio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilis (performance).*

$H_2$ : *Firm Size* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

**Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

*Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena hutang akan mengurangi kelebihan arus kas yang ada pada perusahaan sehingga akan mengurangi pemborosan oleh manajemen (Jensen, M, 1986). Jika pemborosan dapat ditekan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan oleh Agrawal dan Knoeber (1996) dengan menggunakan regresi, menyimpulkan bahwa *leverage* berhubungan negative dengan kinerja keuangan perusahaan. Fauzi dan Locke (2012) juga telah membuktikan pada perusahaan yang listing di New Zealand dengan menggunakan regresi menghasilkan bahwa *leverage* berhubungan positif tetapi tidak signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Selanjutnya Zhang dan Li (2008) melakukan penelitian pada perusahaan yang *listing* di UK dengan sampel sebanyak 323 perusahaan tahun 2005 dengan menggunakan regresi membuktikan bahwa *leverage* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan sedangkan untuk data tahun 2004 *leverage* berhubungan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee (2003) pada perusahaan Chaebol dan non-chaebol yang listing di Korean Stock Exchange dengan *multivariate regression analysis*, juga menghasilkan bahwa *leverage significant* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di Korean selama krisis baik untuk perusahaan chaebol maupun untuk perusahaan non-chaebol.

Ojo (2012) melakukan penelitian di Nigeria dengan menggunakan *Vector Auto Regressive* untuk data tahun 1993 dan 2005, mengenai pengaruh *leverage* keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *leverage* keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Rajkumar (2014) telah melakukan penelitian pada John Keells Holdings plc di Sri Lanka dengan data periode 2006-2012. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *financial leverage* signifikan mempengaruhi *financial performance.*

Penelitian yang dilakukan oleh Pervan dan Visic (2012) untuk data tahun 2002-2010 dengan judul penelitian *influence of firm size on its business success* dengan menggunakan regresi. Pada penelitian ini Pervan dan Visic (2012) mengukur *business success* dengan indikator ROA dan *firm size* dengan menggunakan indikator *natural logaritma total assets* serta *leverage* dengan menggunakan rasio total hutang dengan total *assets*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* dan *debt* rasio berpengaruh terhadap *profitabilis (performance*).

$H_3$ : *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Selanjutnya rerangka pemikiran penelitian ini terlihat pada Gambar 1.

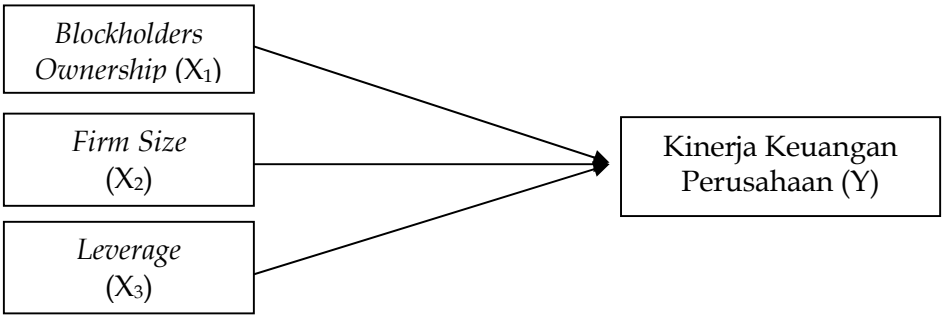


**Gambar 1**
**Rerangka Pemikiran Penelitian**

**Sumber: Analisis Penulis**

## METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah *Blockholders Ownership* ($X_1$), *Firm Size* ($X_2$), *Leverage* ($X_3$) dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Y). *Blockholders Ownership* ($X_1$) adalah seseorang yang memiliki porsi saham yang besar yang berasal dari luar perusahaan dengan indikator, yaitu kepemilikan saham oleh individual yang berasal dari luar perusahaan yang kepemilikannya paling sedikit lima persen (5%). *Firm Size* ($X_2$), yaitu ukuran perusahaan, dengan indikator natural logaritma total harta (*assets*). *Leverage* ($X_3$), yaitu jumlah harta yang dibiayai oleh hutang dengan indikator, yaitu rasio hutang dengan harta (*asssets*). Kinerja Keuangan Perusahaan (Y), merupakan hasil kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan, dengan indikator *Return on Assets* (ROA).

Populasi sasaran dari penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 131 perusahaan (ICMD, 2013). Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan tahun pengamatan adalah 2008-2012 dan yang memiliki data lengkap sesuai dengan tujuan penelitian adalah berjumlah 30 tahun pengamatan. Bentuk data dari variabel penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari ICMD. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *path analysis* dengan bantuan paket program SPSS. Adapun secara rinci operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

| Variabel | Konsep | Indikator | Skala |
|---|---|---|---|
| *Blockholders Ownership* ($X_1$) | *Blockholders Ownership* adalah seseorang diluar perusahaan yang memiliki porsi saham dalam jumlah besar. | Kepemilikan saham oleh individual diluar perusahaan paling sedikit lima persen (5%) | Rasio |
| *Firm size* ($X_2$) | *Firm size* yaitu ukuran perusahaan | Natural logaritma dari total *assets* | Rasio |
| *Leverage* ($X_3$) | *Leverage*, yaitu jumlah *assets* yang dibiayai dengan hutang | rasio antara hutang dengan *asssets* | Rasio |
| Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) | Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan | *Return on Assets* (ROA) | Rasio |

**Sumber: Analisis Penulis**

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif Variabel

**1. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan Perusahaan (Y)**

Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang di miliki perusahaan yang dihitung dengan *return on assets* (ROA). Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa standar deviasi kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia adalah 26.5375. Angka ini jauh diatas angka rata-rata kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 11.7103. Artinya, bahwa penyebaran data kinerja keuangan perusahaan tidak homogen. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan dibawah rata-rata ada sebanyak 25 perusahaan atau sebesar 83.33%. Artinya, perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia kebanyakan masih memiliki kinerja keuangan yang rendah. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja keuangan perusahaan di atas rata-rata hanya sebanyak 5 perusahaan atau sebesar 16.67%.

**2. Analisis Deskriptif Variabel *Blockholders Ownership***

Data dari Tabel 3 menunjukkan bahwa standar deviasi untuk variabel *blockholders ownership* pada perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia sebesar 0.06607. Angka ini berada dibawah angka rata-rata *blockholders ownership* perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 0.1699. Artinya bahwa penyebaran data cukup homogen karena berada dibawah rata-rata *blockholders ownership* di perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia memiliki *blockholders ownership* di atas rata-rata adalah sebanyak 15 perusahaan, atau sebesar 50%. Artinya perusahaan yang memiliki *blockholers ownership* di atas dan di bawah rata-rata itu sama.

**3. Analisis Deskriptif Variabel Firm Size**

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa standar deviasi *Firm Size* untuk perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia menunjukkan angka sebesar 1.45129.

**Tabel 2**
**Kinerja Keuangan Perusahaan (Y)**
**Sektor Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia**

| Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Standar Deviasi | 26.5375 | |
| Rata-rata | 11.7103 | - |
| Di bawah rata-rata | 25 perusahaan | 83.33% |
| Di atas rata-rata | 5 perusahaan | 16.67% |

**Sumber: Data Sekunder (diolah)**

**Tabel 3**
***Blockholders Ownership***

| *Blockholders Ownership* | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Standar Deviasi | .06607 | |
| Rata-rata | 0.1699 | - |
| Di bawah rata-rata | 15 perusahaan | 50% |
| Di atas rata-rata | 15 perusahaan | 50% |

**Sumber: Data Sekunder (diolah)**

**Tabel 4**
***Firm Size***

| *Firm Size* | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Standar Deviasi | 1.45129 | |
| Rata-rata | 12.9389 | - |
| Di bawah rata-rata | 17 perusahaan | 56.67% |
| Di atas rata-rata | 13 perusahaan | 43.33% |

**Sumber: Data Sekunder (diolah)**

Angka ini jauh dibawah angka rata-rata *firm size* untuk perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 12.9389. Artinya bahwa *firm size* di perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia angkanya cukup homogen. Dan perusahaan yang berada dibawah rata-rata adalah sebesar 56,67% atau 17 perusahaan sedangkan yang berada diatas rata-rata ada sebanyak 13 perusahaan atau sebesar 43.333%.

**4. Analisis Deskriptif Variabel *Leverage***

Data pada Tabel 5, menunjukkan bahwa standar deviasi *leverage* untuk perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0.7113. Angka ini berada diatas angka rata-rata *leverage* perusahaan sektor manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 0.6640. Artinya, bahwa *leverage* untuk perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tidak homogen. *Leverage* perusahaan berada dibawah rata-rata ada sebanyak 23 perusahaan atau sebesar 76.67% sedangkan yang berada diatas rata-rata ada sebanyak 7 perusahaan atau sebesar 13.33%. Artinya mayoritas perusahaan sektor manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia lebih menyukai pembiayaan untuk *assets* dengan menggunakan modal sendiri dari pada hutang.

*Blockholders ownership* pada perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia memiliki sebaran yang merata, hal ini terlihat dari standar deviasi yang berada dibawah rata-rata. Dan perusahaan yang berada diatas rata-rata dan dibawah rata-rata sama jumlahnya. Kebanyakan ukuran perusahaan dari perusahaan sektor manufaktur yang *listing* di Bursa EFek Indonesia berada dibawah rata-rata. Dan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia membiayai *assets* dengan menggunakan modal sendiri. Hal ini terlihat dari *leverage* perusahaan yang berada dibawah rata-rata ada sebanyak 76.67%. Kemungkinan hal ini terjadi karena kebanyakan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia memiliki *assets* berada dibawah rata-rata. Jadi dengan demikian kurangnya *assets* perusahaan berakibat perusahaan kurang dipercaya untuk mendapatkan hutang.

**Tabel 5**
***Leverage***

| *Leverage* | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Standar Deviasi | .7113 | |
| Rata-rata | .6640 | - |
| Di bawah rata-rata | 23 perusahaan | 76.67% |
| Di atas rata-rata | 7 perusahaan | 13.33% |

**Sumber: Data Sekunder (diolah)**

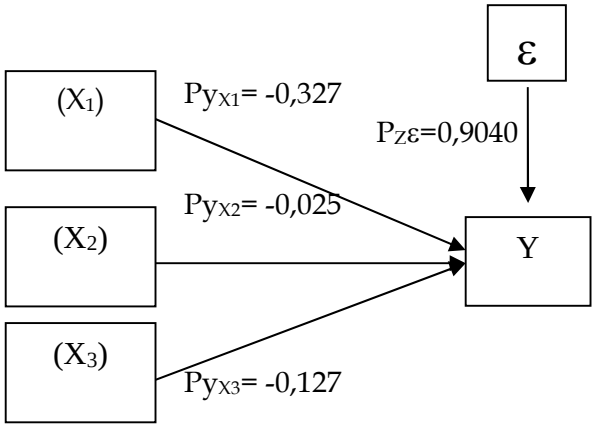


**Gambar 2**
**Diagram Jalur Pengaruh *Blockholders Ownership* ($X_1$), *Firm Size* ($X_2$) dan *Leverage* ($X_3$) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Y)**
**Sumber: Analisis Penulis**

**Tabel 6**
**Pengaruh *Blockholders Ownership* ($X_1$), *Firm Size* ($X_2$) dan *Leverage* ($X_3$) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia**

| Variabel | Koefisien Jalur | Pengaruh |
|---|---|---|
| *Blockholders Ownership* | -.327 | .1069 |
| *Firm Size* | -.025 | .06 |
| *Leverage* | -.129 | .0166 |

**$R^2$=0.096**
**Sumber: Data Olahan Penulis (SPSS)**

## Analisis Pengaruh *Blockholders Ownership, Firm Size* dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Secara diagram bentuk struktur variable *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia terlihat pada Gambar 2. Selanjutnya pengaruh *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun secara parsial terlihat pada Tabel 6.

Besarnya pengaruh *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan secara simultan terlihat dari nilai koefisien determinasi ($R^2$), yaitu sebesar 0.096 atau 9.60% sedangkan sisanya sebesar 0.9040 (1-0.096) atau 90.40% dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor yang diteliti.

Rendahnya pengaruh secara simultan variable *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebesar 9.60% mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Faktor lain tersebut adalah seperti *management ownership, institutional ownership, managerial labor*, komisaris independen dan komite audit (Agrawal dan Knoeber, 1996).

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa variable *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* secara bersama-sama belum cukup kuat untuk mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari data variabel kinerja keuangan perusahaan

pada Tabel 2, dimana angka kinerja keuangan perusahaan berada pada posisi dibawah rata-rata sebanyak 83,33%, yang mana rata-rata kinerja keuangan adalah sebesar 11.7103, sedangkan standar deviasi adalah sebesar 26.5375.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia masih berada dibawah rata-rata. Kinerja keuangan perusahaan yang rendah disebabkan karena rendahnya hutang perusahaan. Hal ini terlihat dari *leverage* perusahaan, dimana *leverage* perusahaan juga berada dibawah rata-rata. Hal ini bertanda bahwa pembiayaan *assets* perusahaan lebih dominan berasal dari modal sendiri bukan dari hutang. Menurut Jensen, M. (1986), jika perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan, maka akan terjadi penghematan oleh manajemen karena manajemen harus manyediakan kas untuk membayar hutang. Dengan demikian kelebihan kas tidak akan terjadi yang akan digunakan oleh manajemen untuk berfoya-foya. Hal ini juga didukung oleh data mengenai jumlah *asssets*, yaitu berada dibawah rata-rata. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan masih memiliki jumlah *assets* dibawah rata-rata tersebut. Dan ini jugalah yang membuat jumlah hutangnya berada dibawah rata-rata karena tidak memiliki banyak *assets* sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (Agrawal dan Knoeber, 1996; Fauzi dan Locke, 2012; Kim dan Lee, 2003; Zhang dan Li, 2008).

Selanjutnya pembahasan secara parsial pengaruh masing-masing variabel *blockholders ownership, firm size* dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.

**1. Pengaruh *Blockholders Ownership* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa *blockholders ownership* berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012) dan Kim dan Lee (2003) untuk perusahaan non-Chaebol di mana *blockholders ownership* berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber (1996); Kim dan Lee (2003) untuk perusahaan Chaebol yang menyatakan bahwa *blockholders ownership* positif dan signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012) pada perusahaan yang listing di New Zealand dengan regresi Fauzi dan Locke (2012) menghasilkan bahwa *blockholders ownership significant* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee (2003) pada perusahaan Chaebol dan non-chaebol yang listing di Korean Stock Exchange dengan *multivariate regression analysis*, juga menghasilkan bahwa *blockholders ownership* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan untuk perusahaan non-chaebol.

**2. Pengaruh *Firm Size* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber (1996) di United State dengan menggunakan regresi menyimpulkan bahwa *firm size* berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Locke (2012) yang melakukan penelitian pada perusahaan yang listing di New Zealand dengan regresi menghasilkan bahwa *firm size* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya Zhang dan Li (2008) juga telah membuktikan dengan melakukan penelitian pada perusahaan yang *listing* di UK dengan menggunakan regresi menghasilkan bahwa *firm size* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh *firm size* terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah kecil, yaitu sebesar 0.06%. Kecilnya pengaruh *firm size* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia adalah karena mayoritas perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang memiliki *assets* dibawah rata-rata. Jadi dengan demikian perusahaan akan kesulitan dalam operasional perusahaan dan berakibat pada sulitnya untuk mendapatkan penghasilan, dan efek selanjutnya akan sulit untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

**3. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebesar 1.66%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Kim dan Lee (2003) Zhang dan Lee (2008) untuk data tahun 2005. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ojo (2012); Rajkumar (2014); Fauzi dan Locke (2012); Zhang dan Lee (2008) untuk data tahun 2004 yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Fauzi dan Locke (2012) membuktikan pada perusahaan yang listing di New Zealand dengan regresi menghasilkan bahwa *leverage* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya Zhang dan Li (2008) melakukan penelitian pada perusahaan yang *listing* di UK dengan menggunakan regresi membuktikan bahwa *leverage* berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lee (2003) pada perusahaan Chaebol dan non-chaebol yang listing di Korean Stock Exchange dengan *multivariate regression analysis*, juga menghasilkan bahwa *leverage significant* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan di Korean selama krisis baik untuk perusahaan chaebol maupun untuk perusahaan non-chaebol.

Ojo (2012) melakukan penelitian di Nigeria dengan menggunakan *Vector Auto Regressive* untuk data tahun 1993 dan 2005, mengenai pengaruh *leverage* keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa leverage keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Rajkumar (2014) telah melakukan penelitian pada John Keells Holdings plc di Sri Lanka dengan data periode 2006-2012 dengan menggunakan regresi. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *financial leverage* signifikan mempengaruhi *financial performance.*

Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia sangat kecil, yaitu hanya 1,66%. Kecilnya pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia disebabkan karena mayoritas (76,66%) *leverage* perusahaan berada pada posisi dibawah rata-rata. Berarti perusahaan memiliki hutang yang kecil. Jika hutang kecil kemungkinan akan terjadi kelebihan kas yang akan mengakibatkan terjadinya pemborosan oleh manajemen (Jensen. M, 1986) yang berarti manajemen tidak akan bekerja secara efisien. *Leverage* merupakan ukuran untuk melihat seberapa

besar harta (*assets*) yang ada pada perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang akan menimbulkan *monitoring* oleh *bondholders* dan hutang juga akan mengurangi kelebihan arus kas yang ada pada perusahaan sehingga akan mengurangi pemborosan oleh manajemen (Jensen. M, 1986).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian serta analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1*) blockhlders ownership* memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia; (2) *firm size* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia; (3) *financial leverage* berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: (1) Manager dalam membuat keputusan keuangan dengan memperhatikan *leverage* untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan; (2) Investor, dalam menggunakan suara yang dimiliki untuk mengawasi manager agar kinerja keuangan perusahaan dapat lebih optimal; (3) Regulator, dalam membuat kebijakan tentang ketentuan jumlah kepemilikan saham minimal dan maksimal untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) bagi peneliti berikutnya disarankan jika memakai variabel kinerja keuangan perusahaan, disarankan untuk melihat variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan selain *blockholders ownership*, *firm size* dan *leverage*, seperti dewan komisaris independen, komite audit, kompensasi, pasar tenaga kerja, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing; (2) bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengajaran materi akuntansi keuangan terutama pembahasan mengenai materi Analisa Laporan Keuangan. Sedangkan saran operasional yang mampu diberikan adalah: (1) regulator, disarankan agar dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan seperti menetapkan kebijakan tentang ketentuan kepemilikan saham minimal dan kepemilikan saham maksimal (2) Bagi perusahaan, diharapkan dalam membuat kebijakan keuangan memperhatikan financial leverage untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. (3) Investor, agar dapat memanfaatkan suara yang dimiliki dalam mengawasi manajemen dalam hal menetapkan kebijakan keuangan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agrawal Anup and Knoeber Charles R. 1996. Firm Performance and Mechanism to Control Agency Problem Between Managers and Shareholders. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 34(3): 377-397.

Berle, JR, A.A. dan G. C. Means. 1932. *The Modern Corporation and Private Property*. Macmillan, New York.

Belkaoui, Ahmed. 2004. *Accounting Theory*. Five Edition Harcouit and Brace Corporation, Orlando, Florida.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 19992. *Internal Control-Integrated Framework*.

Fauzi, F dan Locke. S. 2012. Board Structure, Ownership Structure and Firm Performance: A Study of New Zealand Listed-Firms. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance* 8(2): 43-67.

Ghazali, NA, Mohd. 2010. Ownership Structure, Corporate Governance and

Corporate Performance in Malaysia. *International Journal of Commerce and Management* 20(2): 109-119.

Halioui, K dan Jerbi, A. 2012. The Effect of Blockholders on Earnings Management: The Case of Tunisian Listed Firms. *Zenith, International Journal of Multidiciplinary Research* 2(2): 37-49.

Jensen, M and W. Meckling. 1976, "Theory of the firm: Managerial behavior, Agency cost, and Ownership Structure", *Journal of Finance Economic* 3: 305-360.

Jensen, M. 1986. " Agency cost of free cash flow, Corporate Finance, and take-overs", *American Economic Review* 76: 323-329.

Kim, B and Lee, I. 2003. Agency Problems and Performance of Korean Companies during the Asian Financial Crisis: Chaebol vs. non-chaebol firms. *Pacific-Basin Finance Journal* 2: 327-348.

Lorett,N. Baryah. 2014. A Brief Survey of the Impact of Blockholders on Earnings. *Journal Financial and Accounting* 16: 1-6.

Ojo, A. S. 2012. The Effect of Financial Leverage on Corporate Performance of Some Selected Companies in Nigeria. *Canadian Social Science* 8(1): 85-91.

Pervan. M dan Visic, J. 2012. Influence of Firm Size on its Business Success. *Croation Operational Research Review* 3.

Pratheepkanth, P. 2011. Capital Structure and Financial Performance: Evidence from Selected Business Companies in Colombo Stock Exchange Sri Lanka. *Journal of Arts, Scieence and Commerce* 2(2): April 2011.

Rajkumar, P. 2014. Impact of Financial Leverage on Financial Performance: Special Reference to John Keells Holding plc in Sri Lanka. *Scientific Research Journal* 2(2): February.

Scott, W. R. 2006. *Financial Management Theory*. International ed. Prentice Hall. New Jersey.

Surifah. 2013. Family Control, Board of Directors and Bank Performance in Indonesia. *American International Journal of Contemporary Research* 3(6): 115-124.

Zhang, H and Li, S.2008. The Impact of Capital Structure on Agency Costs: Evidence from UK Public Companies. *Journal of Economic Literatur.*

**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411-0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# MENGUNGKAP KOMPLEKSITAS MASALAH PADA KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM*

**Agung Budi Sulistiyo**
*agungbudisulistiyo@gmail.com*
**Universitas Jember**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to reveal the complexity problems of the concept of substance over form which is inherently substantial and fundamental. This problem is related to the ambiguity meaning of the concept, its opposition to other accounting concept and principles (such as historical cost, materiality and earnings management) and unwittingly efforts to mystify the substance over form concept. On the other hand, the concept is also stuck on the dichotomy and hyperreality way of thinking. The method of discussion is using critical analysis method and supported by literature review. The study showed that the fundamental weakness of the concept can be reviewed at the level of philosophical, theoretical and empirical understanding. At the practical level, different interpretations to the concept encourage dysfunctional behaviour which violates accounting code of ethics and standards of truth. The significance of this paper is expected to provide a positive and constructive contribution to the standard setters and financial accounting standards policy makers in Indonesia to review the concept of substance over form, both at conceptual and implementation.*

*Key words: Substance over form, conceptual conflict, biverbal, myth.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap adanya kompleksitas permasalahan yang bersifat mendasar dan substansial yang melekat pada konsep *substance over form*. Permasalahan ini terkait dengan ambiguitas makna yang terkandung dalam konsep tersebut, pertentangannya dengan konsep dan prinsip akuntansi yang lain (seperti kos historis, materialitas, dan manajemen laba) serta tanpa disadari adanya upaya pemitosan terhadap konsep *substance over form*. Pada sisi yang lain, konsep ini juga terjebak pada cara berpikir dikotomi dan hiperrealitas. Metode pembahasan menggunakan analisis kritis dengan dukungan kajian literatur. Hasil telaah menunjukkan bahwa kelemahan mendasar konsep *substance over form* ini dapat ditinjau pada tingkat penalaran filosofis, teoretis, dan empiris. Pada tataran praksis, penafsiran yang berbeda terhadap konsep ini dapat mendorong perilaku akuntan yang menyimpang dari kode etik dan standar kebenaran. Signifikansi penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan yang positif dan konstruktif bagi para peneliti dan pengambil kebijakan standar akuntansi keuangan di Indonesia untuk mengkaji ulang konsep *substance over form* baik secara konsepsual maupun pada tataran implementasinya.

Kata kunci: *Substance over form*, konflik konsepsual, biverbal, mitos.

## PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2001, dunia bisnis dikejutkan oleh skandal keuangan yang melibatkan perusahaan raksasa energi di Amerika, yaitu Enron *Corp*. Perusahaan ini melakukan praktik manipulasi laporan keuangan (*window dressing*) dengan cara menggelembungkan pendapatannya sebesar US$ 600 juta dan menutupi utangnya senilai US$ 1,2 milyar (Elwin, 2008). Efek kecurangan yang ditimbulkan begitu dahsyat, karena Enron *Corp*. mampu membukukan laba pada tahun 2000 sebesar US$ 100 milyar (kurang lebih sama dengan total pendapatan kotor Indonesia pada tahun yang sama) dan mencatat kapitalisasi nilai

pasar saham berkisar US$ 60 milyar (setaradengan dua kali lipat anggaran belanja Indonesia tahun 2000) (Mustika, 2008).

Kasus Enron *Corp*. di atas memang sudah lama terjadi, namun gaungnya masih dirasakan hingga saat ini. Paling tidak dalam diskusi tentang etika dan perilaku akuntan, ulah tidak terpuji dari para petinggi Enron selalu menjadi bahan pembelajaran dan hikmah yang berharga. Ada isu praktis yang mencuat dalam kasus ini bahwa betapapun ketatnya standar ke amanan keuangan di suatu perusahaan atau negara, peran manusia sebagai faktor pelaksana suatu kebijakan tetaplah me megang peranan vital. Jika manusianya tidak bermoral dan beretika, maka standar yang dibangun seketat apapun juga dapat dilanggar.

Berangkat dari kasus Enron itu pula, Kongres Amerika Serikat melalui bagian hukum federalnya mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (*Sarbanes-Oxley Act of 2002)* sebagai reaksi atas skandal akuntansi perusahaan besar, termasuk diantaranya Enron Corp. Implikasinya jelas mengarah pada penguatan pengawasan akuntansi perusahaan. Hal ini juga mengindikasi adanya isu terhadap perbaikan standar akuntansi dan keuangan di Amerika. Secara implisit, kasus Enron mengajarkan pada kita bahwa penanganan atau solusi atas masalah besar tersebut berkisar pada pembahasan atas dua isu besar, yakni isu standar berupa dikeluarkannya Undang-Undang *Sarbanes-Oxley* dan isu praktis, yaitu perlunya perbaikan etika dan moral para pelaku bisnis terutama profesi akuntan.

Fakta Enron mampu memberi ruang besar bagi para peneliti akuntansi untuk menggali lebih jauh beberapa isu konsepsual yang dapat dijadikan sebagai permasalahan penelitian. Dalam hal ini, Baker dan Hayes (2004), misalnya, melihat adanya problem *substance over form* pada transaksi keuangan yang dimanipulasi oleh Enron. Problem yang muncul berkaitan erat dengan penafsiran atas implementasi konsep *substance over form* oleh manajemen Enron *Corp*. Konsep ini justru dipraktikkan terbalik menjadi *form over substance* untuk menutupi tindakan kecurangan (*fraud*) para manajemen Enron melalui laporan keuangan yang dibuatnya.

Kejadian sama juga terjadi pada perusahaan Cendant (Cendant *Corp*.) tahun 1998, mereka melakukan penipuan informasi keuangan kepada publik dengan cara mengakui pendapatan yang tidak pernah ada (fiktif) (Hayes dan Baker, 2004). Dalam kasus Cendant *Corp*. tersebut, praktik pengakuan transaksi fiktif dalam bentuk pencatatan akun pendapatan dapat mewakili unsur *form* (bentuk) sedangkan kejadian sesungguhnya yang tidak pernah ada, menunjukkan unsur *substance* (substansi). Dengan demikian, tindakan curang para manajemen Cendant *Corp*. Memperlihatkan adanya praktik *form* yang lebih diutamakan dibandingkan *substance*-nya. Bahkan pernyataan Arthur Levitt, seorang *Chairman Securities and Exchange Commission* (SEC) Amerika Serikat, semakin memperkuat realita tersebut. Ia menyatakan bahwa adanya tekanan yang diberikan oleh pasar modal terhadap perusahaan publik (emiten) menyebabkan mereka lebih menekankan praktik *form over substance* (Hayes dan Baker, 2004).

Kasus Enron *Corp*., Cendant *Corp*., dan pernyataan Arthur Levitt tersebut menegaskan pada kita, bahwa setiap tindakan akuntansi (*accounting action*) yang memanipulasi, merekayasa, dan melanggar kejujuran sebuah transaksi atau peristiwa akuntansi sehingga mendorong para pelakunya (*accounting's creator*) membuat bukti transaksi ataupun laporan keuangan palsu (fiktif) dapat dikategori sebagai pelanggaran atas konsep *substance over form*. Dengan perluasan definsi tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa kasus praktik manipulasi laporan keuangan (akuntansi) di Indonesia yang semakin memperkuat fakta empiris adanya penyimpangan atas konsep *substance over form* tersebut.

Pada tahun 2001, PT Kimia Farma Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menggelembungkan harga persediaan sehingga nilai penjualan dan persediaan menjadi lebih saji (*overstatement*). Hal ini berdampak serius, karena laba bersih yang disajikan per 31 Desember 2001 lebih besar Rp 32,7 milyar (Norbarani 2012, 4). Demikian halnya dengan kasus Bank Lippo, yang menyajikan laporan keuangan ganda, laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan kepada publik berbeda. Laporan keuangan Bank Lippo kepada publik tanggal 28 November 2002 melaporkan total aset perseroan Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar. Namun, dalam laporan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) 27 Desember 2002, manajemen menyajikan total aset berkurang menjadi Rp 22,8 trilyun dengan rugi bersih Rp 1,3 trilyun (Herdiani, 2011). Kasus lebih baru melibatkan laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang memalsukan informasi kerugian perusahaan sebesar Rp 63 milyar sebagai keuntungan (laba) senilai Rp 6,9 milyar. Kasus PT Kimia Farma Tbk, Bank Lippo, dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sekali lagi, memperkuat adanya penggunaan laporan keuangan fiktif (representasi *form*) untuk menutupi fakta yang sesungguhnya (mewakili *substance*), sehingga jelas menunjukkan praktik *form over substance*. Dengan kata lain, kondisi ini menyiratkan adanya penyimpangan atas konsep *substance over form*.

Konsep *substance over form* yang menggambarkan sebuah situasi yang seharusnya (*das sollen*) ternyata dipraktikkan menyimpang menjadi *form over substance* (menjelaskan situasi yang terjadi (*das sein)*). Hal ini menunjukkan telah terjadi kondisi kesenjangan sehingga pada akhirnya menciptakan sebuah situasi yang problematis (Salim, 2006: 25). Situasi problematis tersebut memang dapat dianalisis melalui dua sudut pandang. *Pertama*, ditinjau dari sisi pragmatis. Adanya penyimpangan konsep *substance over form* dapat diduga terjadi kesalahan dalam aplikasi konsep tersebut oleh para pelaku akuntansi. Para pelaku akuntansi dengan berbagai kepentingan yang dimilikinya (terutama niat yang negatif) menjadikan konsep *substance over form* tidak berjalan dengan baik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya kesalahan (*error*) bukan pada konsep *substance over form*-nya melainkan pada orang (*person*) yang melakukan praktik akuntansinya.

Sudut pandang kedua, melihat pada sisi normatif, bahwasanya potensi terjadinya penyimpangan konsep *substance over form*, kemungkinan disebabkan konsep tersebut yang memang bermasalah, sehingga tidak mampu dijabarkan dan diterapkan dengan baik oleh para pelaku akuntansi. Adanya dugaan bermasalah tentu mengandung banyak kemungkinan jawaban baik pada aspek apa penyebabnya maupun solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki konsep *substance over form* tersebut.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada sudut pandang normatif, yakni menduga bahwa terjadi anomali konsep *substance over form* sehingga praktik mengikuti cara berpikir *form over substance* adalah dikarenakan permasalahan yang melekat pada konsep substansi mengungguli bentuk ini. Problem mendasar tersebut dapat ditelusuri pada sifat konsep *substance over form* yang cenderung ambigu, terjebak pola pikir dikotomi dan hiperrealitas serta memiliki konflik konsepsual dengan asumsi dasar maupun praktik akuntansi lainnya. Berikut penjelasannya secara berurutan.

## AMBIGUITAS DALAM *SUBSTANCE OVER FORM*

Secara bahasa, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkret. Sejalan dengan makna tersebut, Suwardjono (2005: 19) menggambarkan konsep sebagai makna atau karakteristik yang berkaitan dengan kejadian, obyek, kondisi atau perilaku. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan disiplin akuntansi maka ada keterkaitan

yang sangat erat antara pengembangan sebuah konsep akuntansi dengan fenomena dan realitas yang dihadapinya.

Meskipun demikian, tingkatan konsep tidaklah sekuat dan semapan sebuah teori. Beberapa ahli menyatakan bahwa teori dibentuk dari pernyataan konsep yang telah diuji secara ilmiah dan didukung oleh fakta. Dengan demikian, konsep baru sebatas proposisi yang disarikan dari fenomena yang terjadi. Merumuskan sebuah konsep dasar dalam disiplin ilmu tertentu bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu mampu merumuskannya dalam bentuk pernyataan yang jelas menunjukkan bahwa konsep yang dibangun memenuhi kriteria ilmiah.

Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dikenal sebagai salah satu asumsi dasar dalam akuntansi keuangan. Pada laporan keuangan, substansi mencerminkan realitas dari transaksi atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi sedangkan bentuk menunjukkan keadaan nya ditinjau dari sudut hukum. Berkaitan dengan penyusunan standar, maka perekayasaan dan penetapan konsep akuntansinya lebih menekankan pada makna atau substansi ekonomis suatu kejadian daripada makna yuridisnya (Suwardjono, 2005: 243).

Meyer (1976, 80) berupaya memperjelas konsep tersebut dengan menyodorkan sistem klasifikasi dua-dua (*a two-by-two classification system*) untuk menggambarkan dua dimensi dari konsep *substance over form*. Dimensi pertama adalah basis ekonomi dan dimensi yang kedua yaitu implementasi akuntansi. Basis ekonomi menjadi substansi dari sebuah transaksi sedangkan implementasi akuntansi yang berhubungan dengan proses pencatatan menjadi dasar dari sebuah bentuk (*form*). Dengan dua dimensi tersebut, standar akuntansi[1] yang ada telah memasukkan konsep *substance over form* sehingga diharapkan akan membantu akuntan dalam memecahkan masalah kontemporer dalam pelaporan keuangan.

Meskipun demikian secara normatif, konsep *substance over form* yang tertulis dalam standar akuntansi di Amerika, Inggris maupun standar Internasional (AICPA, 1968) ternyata tidak dimaknai secara jelas dan seragam (Baker dan Hayes, 2004: 768). Bahkan dalam pandangan Rutherford (1985) konsep *substance over form* seringkali didefinisi secara ambigu (bermakna mendua) dan membingungkan sebagaimana dalam pernyataannya berikut ini:

> *..there is a shadowy nature to both the meaning and status of the concept and a confused and ambiguous nature in practice. Histories of the evolution of the concept of substance over form suggest that the precise words emerged in a confused and haphazard manner, reflecting the ebbs and flows of particular legislative initiatives and policy pronouncements (Rutherford, 1985; lihat juga Baker dan Hayes, 2004).*

Lebih jauh lagi diakui oleh Financial Accounting Standar Board (FASB) melalui *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2* tentang ketidakjelasan (bersifat samar-samar) mereka dalam mendefinisi konsep tersebut. *Substance over form is, in any case, a rather vague idea that defies precise definition (FASB 1980, Appendix B, paragraph 160).* Ketidaktegasan dalam memaknai konsep *substance over form* juga tersurat dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang notabene merupakan produk harmonisasi dari Standar Akuntansi Internasional[2] (*International Accounting Standards*). *Substance over form* diterjemahkan menjadi substansi mengungguli bentuk, diartikan "jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu

[1]Yang dimaksud adalah standar akuntansi Amerika (US GAAP).

[2]Dalam IASC (1997a, paragraph 1.5) tertulis "*Substance over form is transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely their legal form*".

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya" (Ikatan Akuntan Indonesia/IAI, 2002:paragraf 35)[3]. Kalimat ".. dan bukan hanya bentuk hukumnya", justru mengandung interpretasi kesetaraan antara substansi dan bentuknya, yang tentu saja tidak dimaknai adanya keunggulan substansi di atas bentuknya.

Kondisi serupa juga terjadi pada disiplin ilmu *auditing* yang sangat erat kaitannya dengan praktik akuntansi. Dalam pengumpulan bukti audit kita mengenal istilah bukti (*evidence*) dan bahan bukti (*evidential matter*). Jika dihubungkan dengan konsep *substance over form*, maka *evidential matter* dapat dianggap sebagai substansinya sedangkan *evidence* sebagai bentuknya. Menurut telaah kritis oleh Sudibyo (2001) terhadap perilaku auditor dalam mengumpulkan bukti audit, ada kecenderungan para auditor terjebak ke dalam simbol dan formalitas legal suatu transaksi bisnis sehingga mengabaikan substansi ekonomisnya. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengurangi kualitas laporan keuangan di Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh Sudibyo (2001, 1) sebagai berikut:

> "Jika sebagai dampak reduksi dari standar *evidential matter* itu laporan keuangan menjadi kurang merefleksi substansi ekonomis perusahaan, dan laporan itu karena reduksi tersebut kemudian diaudit dengan cara yang substandar, maka tentunya integritas pelaporan keuangan di Indonesia menjadi ikut tereduksi secara serius pula".

Pernyataan tersebut menyiratkan adanya kekhawatiran apabila fokus perhatian auditor semata-mata tertuju pada pengumpulan bukti audit yang legal guna menentukan opini kewajaran suatu laporan keuangan. Aspek legalitas lebih mengacu pada ukuran kuantitas dan dapat diverifikasi melalui persyaratan formal namun kurang memperhatikan kenyataan apakah memang suatu transaksi bisnis benar-benar telah terjadi. Oleh karena itu sangat mungkin pada saat mengumpulkan bukti auditnya, seorang auditor lebih mengedepankan bentuk di atas substansi ekonomisnya (*form over substance*). Kondisi ini tentu menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pedoman audit Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang lebih menekankan pada konsep *substance over form*.

## *SUBSTANCE OVER FORM* DALAM DILEMA DIKOTOMI

Pendekatan *substance over* form sebenarnya berpotensi menimbulkan bias dalam menyampaikan informasi yang benar. Dalam pandangan Baker dan Hayes (2004: 769) situasi Enron ini dapat terjadi karena *United States Generally Accepted Accounting Principles* (*US GAAP*) menempatkan *substance over form* sebagai bagian dari prinsip reliabilitas (*reliability*) dan penyajian yang wajar (*representational faithfulness*). Pada kenyataannya banyak transaksi Enron yang memenuhi kriteria reliabel dan sesuai dengan *US GAAP* menurut hasil audit Arthur Andersen. Namun demikian jika dihubungkan dengan makna *representational faithfulness* menurut FASB, maka informasi keuangan seharusnya menyajikan informasi tentang apa yang ingin disajikan (*represent what it is intended to represent*). Hal ini menyiratkan adanya keleluasaan bagi manajemen perusahaan untuk menampilkan informasi kepada para pemakai laporan keuangan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Oleh karena itu, sangat terbuka adanya perbedaan keinginan mengenai masalah informasi keuangan antara manajemen Enron dan publik Amerika. Faktanya bahwa manajemen Enron merealisasi ke-

[3]Definisi yang sama juga terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK) mengenai substansi mengungguli bentuk (IAI, 200: paragraf 56).

inginannya untuk melakukan penggelapan keuangan melalui rekayasa penyajian informasi akuntansi. Tanpa disadari, dengan kejadian Enron tersebut, menyiratkan pula adanya penggunaan konsep *form over substance* dan bukannya *substance over form*, karena bukti transaksi yang legal (*form*) dipakai untuk menutupi transaksi yang tidak benar dan ilegal (*substance*). Hal ini mencerminkan bias kebenaran yang pertama dari konsep *substance over form.* Dengan kata lain dalam kasus tersebut ada sebuah kebohongan yang tertutupi.

Di sisi lain, muncul pula bias kebenaran yang kedua dari konsep *substance over form*. Sebagai contoh pada transaksi yang melibatkan barang konsinyasi. Aturan akuntansi menyatakan bahwa perpindahan barang konsinyasi dari *consignor* ke *consignee* tidak perlu dicatat, karena dianggap belum terjadi transaksi penjualan. Kalau dianalisis lebih lanjut, memang benar bahwa peristiwa konsinyasi itu tidak dicatat sebagai transaksi pendapatan/penjualan, tetapi perpindahan barang konsinyasi tersebut seharusnya tetap dicatat oleh akuntansi untuk menggambarkan terjadinya sebuah peristiwa konsinyasi (Warsono, 2011: 86). Kasus ini juga menunjukkan pada kita bahwa ada sebuah kebenaran yang tertutupi.

Dua kondisi tersebut sama-sama menggambarkan adanya ketimpangan realitas dan ketidakadilan yang mendorong perbuatan melanggar hukum dan etika kebenaran. Ada suatu kebohongan yang tertutupi ataupun suatu kebenaran yang tertutupi dari realitas yang sesungguhnya. Adanya ketimpangan realitas dan ketidakadilan boleh jadi dikarenakan cara berpikir dan tindakan kita yang cenderung menganggap satu hal lebih penting, lebih tinggi ataupun lebih baik dari yang lain, sehingga "yang lain" ini disingkirkan dan dimarjinalkan dari kehidupan. Pola pikir ini dikenal dengan gaya berpikir dikotomi.

Pola berpikir dikotomi juga masuk dalam ranah akuntansi. Pada dasarnya akuntansi modern[4] banyak dipengaruhi pola pikir modern yang dikotomis dari konsep oposisi biner (Triyuwono 2006, 4). Lebih lanjut pola pikir ini memiliki perilaku saling meniadakan (*mutually exclusive*) dari dua hal yang berbeda, misalnya saja egoistik-altruistik, *private*-publik, kuantitatif-kualitatif, dan juga material-spiritual. Bahkan Hines (1992) menegaskan bahwa akuntansi modern memiliki bias gender maskulin. Sifat egoistik, *private*, kuantitatif, dan material dianggap mewakili gaya maskulin sedangkan sifat altruistik, publik, kualitatif, dan spiritual mencerminkan gaya feminin. Dengan berpikir dikotomi maka sifat maskulin diklaim lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih baik dari sifat feminin yang dinilai lebih lemah dan lebih rendah.

Triyuwono (2006, 4) melihat adanya masalah dalam bias gender maskulin dalam disiplin akuntansi ini. Dengan sifat egoistiknya, seorang manajer perusahaan akan berupaya mencapai laba perusahaan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin dirugikan baik material maupun non material akibat ulah perusahaan dalam mengeksplorasi sumber daya alam tanpa konservasi, sehingga menyumbang polutan dalam jumlah besar bahkan tanpa filterisasi lebih dulu. Kondisi ini menunjukkan dominasi maskulin (dengan sifat egoistik manajernya) yang sangat kuat atas sifat feminin (cerminan sifat peduli atas lingkungan dan masyarakat sekitar).

Demikian pula halnya ketika akuntansi menggunakan konsep *substance over form* dalam mencatat transaksi maka tersirat adanya kecenderungan berpikir dikotomis (Triyuwono 2006) dan sekaligus mengandung bias gender maskulin (Hines, 1992). Substansi dianggap lebih penting dan mengungguli bentuknya sehingga posisi *form* (bentuk) menjadi terpinggirkan dari

[4]Akuntansi modern merujuk pada model akuntansi saat ini yang dikembangkan dalam budaya kapitalistik.

realitas akuntansi. Substansi dianggap maskulin dan bentuk dianggap feminin. Dalam istilah lain posisi substansi dapat disebut pula sebagai *core datum*[5] dan bentuk menunjukkan *peripheral datum*[6]. Suatu keadaan yang menyiratkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam sebuah realitas akuntansi.

## BERPIKIR METAFORIS ATAU TERJEBAK PADA HIPERREALITAS?

Beberapa peneliti akuntansi menyatakan bahwa akuntansi mengandung aspek kebahasaan (Li, 1972; Belkaoui, 1980; Lee, 1982; Suwardjono, 2005; Riduwan dkk, 2009). Akuntansi dipandang sebagai sebuah bahasa yang mengandung pesan informasi mengenai keuangan maupun non keuangan untuk disampaikan kepada para pengguna yang berkepentingan (berperan sebagai penerima pesan/komunikan). Adapun kapasitas perusahaan dalam konteks tersebut adalah sebagai penyedia informasi akuntansi dan sekaligus penyampai pesan (komunikator).

Dalam kenyataannya, proses alih informasi dengan menggunakan media bahasa tidak selamanya berjalan mulus. Beberapa masalah dapat terjadi baik pada sisi pemberi informasi maupun yang menerimanya bahkan sangat mungkin terkait dengan simbolisasi dari objek yang menjadi pokok bahasan. Ketika menyampaikan bahasa sebagai simbol atau representasi dari sebuah realitas, komunikator cenderung meyakini bahwa akuntansi hanya ada seperti yang terlintas dalam pikiran si pemberi informasi saja (Macintosh, Shearer, Thornton dan Welker 2000, 13; Mattesich 2003, 443; Riduwan, 2009:4). Tidak menutup kemungkinan si penerima informasi mempersepsikan dengan makna yang berbeda dengan si pemberi informasi (Lee, 1982; Riduwan, 2009: 4). Dalam kondisi yang lain masalah komunikasi yang muncul dapat diakibatkan oleh kompleksitas simbol sehingga sulit dipahami (Preston, Wright dan Young 1996, 121; Riduwan, 2009: 4) atau juga simbol sulit ditemukan dalam dunia nyata (Li 1972, 105; Riduwan, 2009: 4). Menarik untuk dikaji lebih lanjut ketika mendapati simbol bahasa ternyata sulit bahkan tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Menjadi hal yang wajar ketika simbol akuntansi tidak mampu menangkap realitas maka yang terjadi adalah upaya menggambarkan realitas tersebut dengan kiasan atau metafora.

Metafora secara umum dapat dimaknai sebagai bahasa *non-literal* atau figuratif yang mengungkap perbandingan antara dua hal secara implisit (Aisah 2010, 4). Ada dua jenis metafora yakni metafora kreatif dan metafora konvensional. Metafora kreatif digunakan oleh penulisnya untuk mengekspresikan gagasan dan pemikirannya sehingga pembaca lebih mudah memahami maksud dari tulisan tersebut. Dalam metafora kreatif ungkapan yang dimunculkan bersifat baru dan mencerminkan realitas yang ada. Adapun pada metafora konvensional sifat ungkapan tidak baru lagi karena sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis metafora konvensional ini sering disebut juga dengan metafora mati (Aisah 2010, 5). Pada kedua jenis metafora tersebut tampak adanya kesamaan arti dalam hal ungkapan yang ditulis, yaitu sama-sama mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks akuntansi sulit untuk menggambarkan realitas ekonomi yang sesungguhnya sebagaimana ditegaskan oleh Hines (1988). Oleh karenanya beberapa peneliti cenderung menggunakan metafora atau kiasan untuk menafsirkan konsep *substance over form* (Hayes dan Baker, 2004; Hayes dan Baker, 1997). Metafora yang cukup menarik disampaikan oleh Hayes dan Baker (1997) untuk menjelaskan konsep *substance over form* melalui kisah Cinderella.

---

[5]Suatu *value* atau nilai yang dianggap pusat dalam disiplin ilmu (Mulawarman, 2010; 2011).

[6]Merupakan lawan dari *core datum* karena dianggap memiliki posisi yang ada di pinggiran atau terpinggirkan dari yang pusat (Mulawarman, 2010; 2011).

Secara ringkas gambaran kisahnya sebagai berikut: Cinderella merupakan penjelmaan sebuah informasi akuntansi. Ibu tiri yang mengatur keluarga secara absolut digambarkan sebagai manajemen perusahaan. Orang-orang di istana termasuk pangeran dan kedua saudara tiri Cinderella merepresentasikan para pengguna informasi akuntansi (*users*). Ketika Cinderella (informasi akuntansi) akan pergi ke pesta dansa (mencerminkan media untuk menyajikan informasi transaksi kepada publik/user) maka lewat bantuan Ibu Peri (tidak jelas perannya karena bersifat magis maka digambarkan sebagai orang dalam perusahaan yang berhati baik dan berseberangan dengan ibu tiri cinderella) mengubah wujud Cinderella (informasi akuntansi) menjadi lebih cantik dan lebih baik dari wujud sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh ibu peri (orang dalam perusahaan yang baik) yang mengubah wujud Cinderella merupakan bentuk manipulasi informasi akuntansi walaupun di dalamnya mengandung tujuan yang baik. Namun pada akhirnya si pangeran (user utama) menginginkan kebenaran siapa sesungguhnya Cinderella tersebut (informasi akuntansi yang benar dan akurat). Untuk mencapai tujuan tersebut maka pangeran (user utama) menggunakan sepatu kaca (bukti transaksi) sebagai dasar untuk mencari tahu kebenaran informasi akuntansi dan melakukan investigasi independen (pengawal). Singkat cerita, si pengawal (investigator independen) berhasil menemukan bukti bahwa sepatu kaca (bukti transaksi) merupakan milik Cinderella (informasi akuntansi) sehingga terungkaplah wujud asli Cinderella atau kenyataan sesungguhnya (*substance*) sebuah informasi akuntansi dari suatu realita yang tampak (*form*). Dan akhirnya pangeran (user utama) berhasil menikahi (mendapatkan) Cinderella (informasi akuntansi) yang sesungguhnya, tanpa ada rekayasa atau manipulasi (ditafsirkan dan diringkas dari Hayes dan Baker 1997, 3-8).

Bagi beberapa orang, membaca kisah Cinderella yang dianalogikan dengan praktik akuntansi tentu akan lebih mudah dipahami bahkan boleh jadi akan selalu diingat dibandingkan hanya sekedar menjelaskan konsep-konsep akuntansi apa adanya. Pemahaman yang lebih baik atas konsep *substance over form* ini akan mendorong sikap transparansi yang lebih tinggi dalam praktik akuntansi (Hayes dan Baker, 1997: 18).

Pada sudut pandang yang berbeda, penggunaan bahasa metafora untuk menggambarkan realitas akuntansi justru akan mengarah pada situasi hiperrealitas. Hiperrealitas merujuk pada kondisi posmodern di mana *simulacra* (tanda, citra, atau model) tidak berasosiasi dengan kenyataan atau terlepas dari realitas obyek material atau idealitas romantis (Suryaningrum 2011, 5). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Baudrillard dengan menjelaskan secara lebih utuh dalam konsep *order of simulacra*. Tingkatan simulacra yang dikemukakan Baudrillard adalah sebagai berikut *pertama*, tanda merefleksikan realitas yang benar-benar nyata dan yang ada mendahului tanda (*profound reality*). Pada situasi ini, tanda merujuk pada realitas dengan penampakan yang nyata, dan tanda merepresentasikan realitas yang jujur dan transparan. *Kedua*, tanda menyembunyikan atau malah menyimpangkan sifat asli dari realitas atau yang mendahuluinya. Dalam era ini, tanda merujuk pada penampakan realitas yang terdistorsi, dalam arti tanda tidak lagi memiliki sifat seperti yang dimiliki realitas. *Ketiga*, tanda menyembunyikan ketidakhadiran realitas. Pada kondisi ini, tidak berbeda dengan permainan sulap, tanda bermain untuk mewujudkan realitas. Dan *terakhir*, relasi antara tanda dan realitas dipertukarkan atau dibalik di mana keberadaan tanda terjadi mendahului keberadaan realitas. Pada konteks ini, tanda tidak memiliki relasi apapun dengan realitas, bahkan realitasnya sendiri belum atau sama sekali tidak ada (hiperrealitas) (Suryaningrum 2011, 6).

Dalam konteks akuntansi keuangan kondisi hiperrealitas ini juga terjadi

(McGoun, 1997; Macintosh, 2003; Riduwan, 2009). Secara eksplisit Macintosh (2003) menegaskan banyaknya simbol akuntansi yang tidak memiliki rujukan yang jelas pada obyek atau peristiwa nyata, sehingga akuntansi tidak secara penuh menjalankan fungsinya sesuai logika representasi, pertanggungjawaban, atau penyajian informasi ekonomik secara transparan (Suryaningrum 2011, 8). Riduwan (2009) ketika menafsirkan laba dengan perspektif Derrida juga menghasilkan simpulan yang sama bahwa laba akuntansi tidak mencerminkan realitas akuntansi yang ada. Tentu menjadi sebuah pertanyaan apakah konsep *substance over form* memang telah terjebak pada perangkap hiperrealitas juga?

## KONFLIK DENGAN *HISTORICAL COST* DAN *FAIR VALUE*

Kos historis dimaknai sebagai harga pertukaran pada saat terjadinya (Suwardjono, 2005: 278). Hal ini juga menunjukkan jumlah kas atau setaranya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset sampai siap digunakan (Ghozali dan Chariri, 2007: 171). Dengan definsi tersebut, *historical cost* dianggap satu-satunya konsep pengukuran yang memenuhi kriteria obyektif karena dihasilkan melalui transaksi yang independen antara kedua belah pihak dan sesuai dengan harga yang disepakati pada saat itu.

Dalam penilaian Suwardjono (2005: 278), kos historis memiliki keunggulan yaitu dapat diuji validitas hasil penilaiannya, karena diperoleh dari hasil kesepakatan antara dua pihak yang independen. Faktor validitas pengujian inilah yang menjadikan kos historis dapat diandalkan sebagai informasi (reliabel). Namun sebaliknya jika dipandang dari sisi relevansi informasi, maka kos historis menjadi tidak bermanfaat, hal ini disebabkan nilai aset yang berubah seiring dengan berjalannya waktu baik akibat perubahan daya beli atau perubahan harga (Suwardjono, 2005: 278).

Terlepas dari kekuatan dan kelemahan yang melekat pada konsep *historical cost*, ada satu kasus yang menjelaskan keterkaitan antara konsep *historical cost* dan *substance over form*: Bahwa ketika sebuah perusahaan mencatat transaksi harga perolehan aset A yang dibeli 10 tahun yang lalu senilai Rp 50 juta, kemudian manajemen ingin menyusun laporan keuangan pada tahun ini, maka harga aset A yang dicantumkan dalam neraca perusahaan juga tetap menunjukkan nilai sebesar Rp 50 juta. Walaupun pada kenyataannya, sangat mungkin harga aset tersebut sudah berubah nilainya baik mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Pencantuman harga aset saat ini dengan menggunakan informasi transaksi masa lalu mengindikasi *historical cost* lebih mengutamakan bentuk (*form*) berupa bukti transaksi yang dianggap lebih valid dan obyektif dibandingkan substansi (*substance*) dari nilai aset yang sesungguhnya. Semestinya jika konsisten dengan konsep *substance over form* maka penilaian aset menggunakan informasi harga yang relevan, sehingga unsur substansi terekam pada perubahan harga saat ini. Fakta tersebut memperlihatkan pada kita bahwa pada saat standar akuntansi masih mengakui *historical cost* sebagai penilaian aset yang obyektif, maka kita akan menemukan pengabaian terhadap konsep *substance over form*.

Seandainya dikatakan bahwa dengan diterbitkannya standar akuntansi Internasional yang baru yakni *International Financial Reporting Standard* (*IFRS*) yang menggunakan pendekatan nilai wajar (*fair value)* maka konflik konsepsual dengan *substance over form* tentu tidak terjadi lagi. Sebagaimana dapat dilihat dalam IASB (2011: 17), harga wajar menunjukkan nilai harga yang sesuai dengan kondisi terkini pada tanggal pengukuran dan berbasis pasar. Kebenaran informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi saat inilah yang menjadikan basis pengukuran *fair value* sejalan dengan konsep *substance over form*.

Namun pendapat ini juga tidak sepenuhnya tepat, mengutip pernyataan Warsono (2011: 177) tentang kritiknya atas

penerapan *fair value*, bahwasanya pengukuran berbasis nilai wajar ini memunculkan risiko terdapatnya penyajian yang tidak/kurang jujur dengan alasan, *pertama*, nilai wajar mengandung unsur subyektifitas dan *kedua*, nilai wajar berpeluang memunculkan perbedaan pendapat karena perbedaan cara pandang. Dua alasan ini sangat terkait dengan sifat manusia yang cenderung oportunistik dan *self interest*.

Oleh karena itu, baik *historical cost* maupun *fair value* sama-sama berpotensi untuk melanggar konsep *substance over form*. Jika *historical cost* mengabaikan informasi keuangan saat ini (level *output* laporan keuangan), maka sebaliknya *fair value* yang menitikberatkan pada *judgment* akuntannya, juga dapat menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan harga wajarnya) (level input laporan keuangan) sehingga sama-sama berpotensi menyajikan informasi yang tidak benar. Dengan kata lain, ketidakbenaran informasi tentu melanggar aspek substansi (*substance*) dari sebuah transaksi akuntansi, terlepas apapun bentuknya (*form*).

Pada akhirnya, kalau kita mengacu pada kerangka konsepsual (*conceptual framework*), dapat dilihat bahwa konsep *substance over form* menempati posisi yang lebih normatif dibandingkan basis pengukuran *historical cost* maupun *fair value*, sehingga sudah selayaknya konsep *substance over form* menjadi acuan untuk perumusan basis pengukuran transaksi yang lebih tepat. Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, ketika aspek yang kurang normatif (lebih pragmatis) dijadikan sebagai acuan dibandingkan aspek yang lebih normatif. *What's wrong*? Penelitian ini memiliki hasrat yang besar untuk menjawab pertanyaan tersebut.

## KONFLIK DENGAN KONSEP MATERIALITAS

Materialitas adalah besar kecilnya suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seorang bijaksana (*reasonable person*) yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh adanya aspek penghilangan, pengabaian atau penyalahsajian tersebut (Suwardjono, 2005: 178).

Lebih lanjut ditekankan bahwa sifat materialitas informasi keuangan sangat bergantung pada keputusan apakah informasi tersebut menarik perhatian *user* atau tidak (aspek relevansi) dan apakah jumlah rupiah informasi akuntansi yang disajikan nilainya besar atau kecil (aspek signifikansi). Hal ini berarti suatu informasi akuntansi dianggap tidak material, jika kualitas informasinya dianggap tidak/kurang menarik perhatian *user* dan kuantitas rupiahnya dinilai terlalu kecil (tidak signifikan). Demikian juga sebaliknya, dianggap material sebuah informasi akuntansi, jika informasinya menarik dan berkualitas serta nilai rupiahnya juga dianggap besar.

Yang patut menjadi perhatian dari pembatasan sifat materialitas tersebut adalah ukuran yang dipakai untuk menilai besar kecilnya nilai materialitas informasi akuntansi. Ukuran yang digunakan adalah materialitas kuantitatif (Suwardjono, 2005: 178). Misalnya dengan menetapkan persentase tertentu dari keseluruhan nilai akun atau sub akun tertentu dari unsur laporan keuangan. Demikian pula dengan unsur subyektifitas yang melekat pada penentuan ukuran materialitasnya, hal ini disebabkan karena lebih mendasarkan pada pertimbangan pribadi (*judgment*) akuntan. Sebagaimana pernyataan FASB dalam SFAC No. 2, paragraf 131:

> *.. whenever the Board or any authoritative body imposes materiality rules, it is substituting generalized collective judgments for specific individual judgments, and there is no reason to suppose that the collective judgments are always superior... Quantitative materiality guidelines generally specify minimal only. They, therefore, leave room for individual judgment in at least one direction.*

Jika kita telaah lebih dalam, sebenarnya konsep materialitas tidak berpijak pada penyajian informasi yang jujur dan lengkap (*honest and complete information*), karena fokusnya hanya pada bagaimana menyajikan informasi akuntansi yang menarik dan berguna bagi para pengambil keputusan. Ukuran informasi yang menarik dan berguna tentu saja dibatasi oleh materialitas kuantitatif.

Tidak disajikannya informasi akuntansi yang tidak memenuhi kualifikasi material, menjadikan konsep materialitas melanggar asumsi *substance over form*. Sebuah informasi akuntansi walaupun nilai rupiahnya kecil bukan berarti diabaikan begitu saja, karena aspek substansi mendorong kejujuran dalam menangkap, mencatat realita akuntansi, dan menyajikan informasinya. Ketika akuntan berpedoman pada ukuran materialitas, sama artinya ia berlindung dibalik "*form*" material dan menegasikan nilai kebenaran sebuah peristiwa akuntansi (*substance*). Kondisi ini sekali lagi memperlihatkan pada kita, adanya konflik konsepsual antara *substance over form* dan materialitas.

Pengabaian konsep *substance over form* dalam realitas akuntansinya, nampak semakin nyata ketika para auditor juga menggunakan konsep materialitas ini dalam menyajikan laporan auditnya. Pada paragraf pendapat sebuah laporan audit *unqualified opinion* tertulis pernyataan:

> .. menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan X tanggal 31 Desember 2010 dan 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kata material pada paragraf pendapat tersebut merujuk pada konsep yang sama dengan materialitas akuntansi (laporan keuangan). Oleh karena itu, opini laporan audit sebatas menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan, dan bukan kebenaran informasi laporan keuangan. Adapun istilah kewajaran bermakna terdapat toleransi yang disepakati oleh auditor atas angka-angka laporan keuangan yang dianggap tidak material. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa ada pengabaian konsep *substance over form* dan lebih mengutamakan konsep materialitas di dalam memandang realita akuntansi. Fakta empiris ini, sebagaimana halnya dengan pembahasan sebelumnya mengenai basis pengukuran *historical cost* dan *fair value*, semakin mempertegas adanya penyimpangan konsep *substance over form* dalam praktik akuntansi.

## *SUBSTANCE OVER FORM, RELIABILITY LOST?*

Dalam kajian akuntansi keuangan, sebuah informasi akuntansi dinyatakan berguna dalam pengambilan keputusan, apabila memenuhi dua unsur utama yaitu relevansi (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*) (Johnson, 2005). Namun sayangnya, kedua unsur tersebut bersifat *trade-off*, artinya jika salah satu unsur ditingkatkan maka unsur yang lainnya menjadi berkurang kualitasnya. Dengan kenyataan tersebut, informasi keuangan tidak akan pernah mampu memberi informasi yang berguna sepanjang relevansi dan reliabilitas menjadi dua unsur yang saling meniadakan (*mutually exclusive*).

*Substance over form* secara konsepsual memberi ruang yang luas bagi terciptanya unsur relevansi informasi, walaupun terlihat ada kecenderungan penegasan faktor reliabilitasnya. Hal ini dapat dipahami dengan menempatkan relevansi sebagai metafora *substance* dan reliabilitas mewakili unsur *form*. Peristiwa akuntansi (*event*) yang sesungguhnya terjadi (*substance*) tentu memberi informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan (*relevance*) sedangkan bukti transaksi (*form*) menjadi dasar yang valid (*reliability*) untuk menyusun informasi laporan keuangan. Ketika *substance* lebih unggul dibandingkan *form*-

nya, tentu demikian pula halnya dengan unsur relevansi yang lebih penting dibandingkan dengan reliabilitas sebuah informasi keuangan.

Kontradiksi di atas memberi sebuah stimulus untuk mempertanyakan kembali konflik konsepsual yang terjadi antara *substance over form* dengan aspek relevansi dan reliabilitas informasi. Mengapa ini penting? Karena hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan FASB (1992) yang menyatakan bahwa kebergunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan akan hilang, apabila salah satu dari relevansi atau reliabilitas diabaikan. Dengan demikian, apakah *substance over form* mendorong informasi akuntansi kehilangan reliabilitasnya (*reliability lost*).

Jika pada tiga justifikasi awal menggambarkan pertentangan dengan konsep *substance over form* yang lebih bersifat konsepsual, maka pada pembahasan berikutnya akan melihat dari kacamata praktis, yakni bagaimana konflik yang timbul berkaitan dengan praktik manajemen laba.

## KONFLIK DENGAN PRAKTEK MANAJEMEN LABA

Pro dan kontra seputar manajemen laba (*earnings management*) masih berlangsung hingga saat ini. Ada dua pandangan ekstrim mengenai boleh tidaknya praktik manajemen laba dilakukan. Pandangan pertama meyakini bahwa manajemen laba bukanlah tindakan yang tidak etis, karena melakukan manipulasi laba dapat dibenarkan sepanjang mengikuti prinsip akuntansi yang berterima umum (Schroeder dan Clark, 1998: 248; Djakman, 2003: 145). Dalam praktik manajemen laba, seorang manajer dapat melakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas yang ada pada standar akuntansi. Keleluasaan yang diberikan dalam standar akuntansi, mendorong seorang manajer dapat memainkan kebijakan akuntansi demi memenuhi kepentingan pribadi dan perusahaannya.

Pandangan kedua, tentu saja bertolak belakang dengan yang pertama, mereka meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya selalu memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri (*self interest*). Sifat inilah yang seringkali bertentangan dengan kepentingan perusahaan ataupun publik, sehingga selalu ada potensi bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan cenderung menyembunyikan realita perusahaan yang sebenarnya (Schipper, 1989: 92; Healy dan Wahlen, 1999: 368). Bahkan dinyatakan oleh Riduwan (2010: 18) bahwa praktik manajemen laba merupakan perilaku koruptif yang termotivasi oleh pikiran-pikiran yang terkorupsi. Dengan demikian, upaya menyembunyikan (manipulasi) laba sesungguhnya (*true earnings*), mengindikasi tindakan koruptif yang melanggar etika dan kepantasan publik.

Kajian ini mengambil sudut pandang yang kedua, yaitu menilai praktik manajemen laba sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, karena berinisiatif menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan (*misleading information*) kepada para pengguna laporan keuangan. Walaupun tindakan ini dilakukan atas nama standar akuntansi yang memperbolehkan dan memberi peluang untuk terjadinya praktik tersebut.

Kalau dicermati lebih mendalam, kita dapat mengambil benang merah antara konsep *substance over form* dan praktik manajemen laba. Standar akuntansi yang dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam menyajikan informasi keuangan, akan dibenarkan sepanjang mampu memberi kontribusi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Indikator kebergunaan dan kebermanfaatan tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek penyajian yang jujur (*representational faithfulness*) dan memenuhi asumsi kebenaran reflektif (*reflective truth*).

Ketika manajemen perusahaan melakukan rekayasa laba dengan beberapa cara yang umum digunakan seperti pemilihan metode akuntansi, *income smoothing* atau yang paling populer adalah *discretionary*

*accrual*, maka aspek kejujuran informasi pun menjadi tergadaikan. Informasi yang berguna bagi para pemilik saham (*stockholder*) diartisempitkan sebagai informasi yang menguntungkan. Mungkin dalam pandangan kreator manajemen laba, sesuatu yang jujur belum tentu membawa dampak yang menguntungkan bahkan bisa-bisa merugikan. Jadi mereka mencari alibi (alasan berlindung) di balik standar akuntansi sebagai sebuah bentuk (*form*) aturan yang dilegalkan oleh *standard setter*, namun di sisi yang lain mereka menafikan kebenaran dan kejujuran informasi akuntansinya (bukankah *substance* yang tergadaikan?).

Aspek kebenaran reflektif dalam pandangan Denisia (2007: 2303) menggambarkan sebuah realita yang nampak dalam cermin (*which reflects reality just like in a mirror*). Artinya, ada hubungan yang sangat erat antara obyek peristiwa dan cara penyajiannya, sebagaimana ia tegaskan dalam pernyataan berikut:

> *The reflective truth reflects the relationship between the object and its representation. The observation and reflection of the objects has to meet certain standards of a true image. To fulfill this, the documents used for incoming information have to contain real and correct data, and the person preparing these documents has to be trustworthy* (Denisia, 2007: 2303)

Obyek peristiwa akuntansinya tentu menggambarkan data yang riil dan benar, yang mewakili unsur substansi dari sebuah kejadian, sedangkan dokumen yang digunakan untuk mencatat data dan mengolah menjadi informasi, tentu saja menggambarkan *form*-nya. Sebagaimana sebuah cermin yang mampu merefleksi obyek yang ada dihadapannya, begitu pula semestinya sebuah *form* yang mampu merefleksi *substance* dari suatu peristiwa akuntansi. Bagaimana dengan praktik manajemen laba? Boleh jadi itulah wujud dari sebuah cermin yang "retak".

Pemaparan ketiga justifikasi tersebut sebelumnya, dilakukan dalam rangka memperkokoh argumen tasi adanya konflik konsep sual antara *substance over form* dengan konsep dasar maupun praktik akuntansi yang lain. Pemikiran ini bukan berarti serta merta menuduh bahwa konsep *historical cost* dan *fair value*, materialitas serta praktik manajemen laba yang salah sedangkan *substance over form* yang paling benar ataupun juga sebaliknya. Namun, pendapat ini sebagai pijakan awal untuk mempertanyakan ulang tentang eksistensi dan kontinuitas sebuah konsep *substance over form* sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat bangunan akuntansi.

Jika sebuah konsep dianggap mapan, pasti benar bahkan tabu untuk dipertanyakan, maka dikhawatirkan konsep tersebut akan dimitoskan oleh para pemujanya. Tindakan memitoskan ini dapat pula disebabkan oleh kerancuan dalam memahami arti sebenarnya dari sebuah konsep. Untuk memperjelas dugaan tersebut, pada argumentasi selanjutnya akan dipaparkan suatu teori besar dalam ranah *capital market research in accounting* yang cenderung dimitoskan oleh para pengikutnya. Teori ini memang tidak ada hubungannya dengan konsep *substance over form*, namun demikian dalam konteks berpikir ilmiah, sebuah analogi dapat digunakan sepanjang relevan dan mampu memperjelas topik utama yang sedang dibicarakan. Untuk itulah, pada pembahasan selanjutnya berupaya untuk memperjelas dan memperkuat dugaan terjadinya makna biverbal dan pemitosan dalam konsep *substance over form*.

## ARGUMENTASI "JERUK KOK MINUM JERUK?

Dalam ilmu bahasa dikenal istilah biverbal yaitu sinonim atau padanan kata.

Misalnya binatang-fauna, tanaman-flora, bohong-dusta, baju-pakaian, dan lain sebagainya. Beberapa contoh tersebut menunjukkan adanya kesamaan pemahaman dan makna sehingga kurang tepat jika dua kata yang berpadanan itu diletakkan secara bersamaan dalam satu kalimat. Hal ini selain mengakibatkan pemborosan kata (*redundant*) dalam kalimat juga mendorong pengaburan makna yang sebenarnya.

Termasuk dalam hal ini adalah konsep *substance over form* yang terjebak dalam situasi biverbal. Mari kita perhatikan kembali dua pernyataan definisi berikut mengenai *substance over form*:

> Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya" (IAI, 2002: paragraf 35). Dalam IASC (1997a, paragraph 1.5) tertulis *substance over form is transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not merely their legal form*.

Definisi yang disampaikan baik oleh IAI maupun IASC tersebut menimbulkan kerancuan dalam berpikir karena penjelasan tentang makna *substance* dan *form* juga menggunakan istilah yang sama persis dengan dirinya. Tentu hal yang sulit bagi logika kita unuk menangkap makna sesungguhnya dari konsep *substance over form* dengan pola pikir biverbal tersebut. Kondisi ini identik dengan jargon dalam dunia periklanan yaitu "jeruk kok minum jeruk". Dampak biverbal ini terhadap konsep *substance over form* mendorong perbedaan tafsir antar akuntan. Ambiguitas penafsiran ini mengakibatkan praktik yang berjalan juga menghasilkan ambiguitas kebenaran. Ketika perusahaan melakukan "*creative accounting*" dengan alasan demi memenuhi kepentingan mayoritas pemilik modal maka segala upaya menjadi "benar" dan "sah" untuk dilakukan. Hukum kebenaran akan selalu berpihak kepada pemilik modal walaupun bertentangan dengan kepentingan publik. Penafsiran atas kalimat biverbal ter- sebut jika dibiarkan dan dianggap pasti benar maka akan menggiring para akuntan dan pengguna informasi akuntansi ke dalam perangkap mitos yang berkepanjangan. Sebuah situasi yang mengungkung cara berpikir dan bertindak seseorang sehingga tidak dapat membedakan praktik akuntansi yang benar dan salah.

## *SUBSTANCE OVER FORM* DALAM PERANGKAP MITOS

Gaffikin (2007: 3) mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Eugene Fama, pencetus hipotesis pasar efisien (*efficient market hypothesis/EMH)* bahwa:

> *In 2004 The Wall Street Journal reported that even the "father of EMH", Eugene Fama, at a conference to honour him held at The University of Chicago, conceded that markets may not be efficient and there may be "poorly informed investors" who do not act rationally.*

Pengakuan Fama ini tentunya sejalan dengan sejumlah hasil riset empiris yang dilakukan selama lebih dari 40 tahun yang ternyata gagal membuktikan kebenaran hipotesis tersebut (Gaffikin, 2007: 2). Namun demikian, masih banyak peneliti akuntansi yang ingin mempercayai keberadaan efisiensi pasar dan tetap melanjutkan melakukan penelitian untuk menguji tingkat efisiensinya. Tepatlah apa yang disampaikan oleh Kuhn (1962: 170), bahwa para peneliti akan terus mempercayai sebuah paradigma sebagai bentuk keyakinan (*faith*) walaupun banyak bukti (fakta) yang bertentangan dengannya. Keyakinan yang terus dipertahankan tanpa adanya justifikasi ilmiah yang kuat tentu akan mengarah pada sesuatu yang dimitoskan.

Mitos dalam disiplin akuntansi juga terjadi ketika kita melihat produk laporan keuangan sebagai dokumen yang netral dan obyektif bagi semua pihak. Bahwa laporan keuangan dianggap sebagai produk yang terukur, sistematis, dan bebas dari nilai maupun subyektifitas penyusunnya. Namun demikian, hal ini dibantah dengan adanya pendapat bahwa kandungan informasi akuntansi merupakan representasi dari konteks sosial politik tertentu yang mengandung makna-makna tersembunyi (Macintosh, 2005; Cooper dan Sherer, 1984). Oleh karena itu, dalam kacamata *political economy of accounting (PEA)*, penyajian informasi akuntansi memiliki muatan politis yang dapat menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan pihak yang lain.

Menegaskan apa yang dinyatakan Kuhn (1962) dan melihat fenomena empiris sebelumnya, penelitian ini mensinyalir adanya perlakuan yang sama terhadap konsep *substance over form*. Beberapa riset empiris memang sebatas membuktikan adanya penyimpangan *substance over form* yang dipraktikkan terbalik menjadi *form over substance* atau pula praktik manajemen laba yang menyalahi logika kebenaran substansi peristiwa akuntansi. Riset-riset tersebut masih meyakini kebenaran konsep *substance over form*, seperti halnya Hayes dan Baker (1997) ataupun Baker dan Hayes (2004), tanpa berupaya untuk mempertanyakan ulang validitas dari konsep itu.

Kajian ini berpikir sebaliknya, berlandaskan pada beberapa anomali yang terjadi pada konsep *substance over form*, baik pada level konflik konsepsual maupun fakta empiris tunggal (yakni manajemen laba), maka dirasa cukup memadai untuk meneliti lebih lanjut dan berupaya mendobrak mitos konsep *substance over form* yang dianggap ideal. Sebuah upaya yang sejalan dengan pemikiran bahwa produk akuntansi (termasuk konsep *substance over form*) merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak kebal dari kritik dan potensi kesalahan konsep.

## REKAPITULASI BUTIR-BUTIR KONSEPSUAL

Sarantakos (1993:41) menjelaskan bahwa salah satu poin penting dari prinsip dasar riset kuantitatif adalah penolakan terhadap penalaran filosofis (*philosophical reasoning*) di dalam merumuskan ataupun menjawab permasalahan penelitian. Penolakan ini dilakukan karena penalaran filosofis dianggap pola berpikir yang bersifat khayalan (*illusion*) dan menyesatkan/ tidak masuk akal (*sophistry*) sehingga tidak memiliki dampak empiris (*empirical relevance*). Hal ini wajar saja, sebab akar filosofis dari riset kuantitatif adalah filosofi positivis/neopositivis (Sarantakos, 1993: 40).

Sebaliknya, kajian ini menggunakan cara berpikir filosofis sebagai upaya pembuktian bahwa konsep *substance over form* memang bermasalah. Meskipun demikian, tulisan ini mampu menyajikan dengan ilmiah bahwa bermula dari penalaran secara filosofis, dapat diturunkan beberapa masalah lain yang bersifat teoritis bahkan empiris sekalipun. Secara ringkas tabel 1 berikut menggambarkan hubungan antara konsep *substance over form* dan tiga model penalaran yakni filosofis, teoritis, dan empiris. Dalam kajian ini, disajikan beberapa argumentasi melalui penalaran teoritis yaitu adanya konflik konsepsual dengan *historical cost/fair value*, konsep materialitas, dan relevansi-reliabilitas. Adapun dari sudut pandang empiris, ditemukan fakta yang berhubungan dengan praktik manajemen laba dan perangkap mitos.

## SIMPULAN

Patut disadari bahwasanya kemunculan sebuah konsep dalam disiplin ilmu tertentu merupakan konsekuensi pasti dari pembacaan manusia terhadap realitas keilmuan yang dihadapinya termasuk disiplin akuntansi. Dengan keterbatasan fitrah yang melekat pada dirinya maka akuntan berusaha melakukan penyederhanaan maupun abstraksi terhadap fenomena dan fakta yang terjadi supaya proses kehidupan dan keilmuan dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, seringkali konsep yang dibuat tersebut berseberangan dengan konsep lain yang sudah ada. Hal ini dikarenakan realitas keilmuan cenderung beraneka ragam sedangkan konsep yang dihasilkan mungkin berangkat dari satu sudut pandang sehingga kurang mengakomodir aspek-aspek lain yang terkait dengan dirinya. Oleh karena itu, tidak mustahil terjadi benturan antar konsep yang mengarah pada konflik konsepsual, tak terkecuali dalam hal ini adalah konsep *substance over form*.

Pada sisi yang lain, definisi *substance over form* juga meninggalkan ambiguitas makna dan penafsiran sehingga mendorong praktek akuntansi yang menyimpang bahkan menjadi modus untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Ketika kondisi tersebut dibiarkan dan dianggap "baik-baik saja" maka para akuntan tanpa disadari terjebak dalam perangkap mitos. Jika sebuah konsep sudah dimitoskan maka ia akan menjadikan dirinya sebagai hukum Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat.

**Tabel 1**
**Rekapitulasi Butir-Butir Konflik Konsepsual**

| Masalah Utama | Penalaran Filosofis | Penalaran Teoritis | Penalaran Empiris |
|---|---|---|---|
| *Substance Over Form* | 1. Pola Berpikir Dikotomi<br>2. Hiperrealitas | 1. Konsep *historical cost/fair value*<br>2. Konsep Materialitas<br>3. Konsep Relevansi dan Reliabilitas | 1. Praktek Manajemen Laba<br>2. Makna Biverbal dan Perangkap Mitos |

## DAFTAR PUSTAKA


Aisah, S. 2010. *Metafora dalam Literatur*. http://www.lontar.ui.ac.id. Diunduh tanggal 10 Oktober 2011.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 1968. *Audit and Accounting Guide*. New York.

Baker, C. R. dan R. S. Hayes. 2004. Reflecting Form Over Substance: The Case of Enron Corp. *Critical Perspectives on Accounting*. 15: 767-785.

Belkaoui, A. R. 1980. The Interprofessional Linguistic Communication of Accounting Concepts: An Experiment in Sociolinguistic. *Journal of Accounting Research* 18(2): 362-374.

Cooper, D. J. dan M. J. Sherer. 1984. The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments For A Political Economy of Accounting. *Accounting, Organizations and Society*. 9: 207-232.

Denisia, L. 2007. The Prevalence of Substance Over Form As An Attribute of The Credibility of Accounting Information. *Fascicle of Management and Technological Engineering*. VI(XVI).

Djakman, C. D. 2003. Manajemen Laba dan Pengaruh Kebijakan Multi Papan Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya: 141-162.

Elwin, B. 2008. *Kasus Enron*. http://beniakt.blogspot.com. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.

Financial Accounting Standard Board (FASB). 1980. *Statements of Financial Accounting Concepts*. Irwin.

Gaffikin, M. 2007. Accounting Research and Theory: The Age of Neo-Empiricism. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 1 (1).

Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi 3. BP Universitas Diponegoro. Semarang.

Hayes, R. S. dan C. R. Baker. 1997. *The Concept of Substance Over Form: A Discussion Based on the Cinderella Story*.

Working Paper. School of Business and Economics California State University.

_____. 2004. Using A Folk Story To Generate Discussion About Substance Over Form. *Accounting Education*. 13(2): 267-284.

Healy, P. dan J. M. Wahlen. 1999. A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons.* 13: 365-383.

Herdiani, A. 2011. *Skandal Laporan Keuangan Bank Lippo*. http://anindyaherdiani.blogspot.com. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.

Hines, R. D. 1988. Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality. *Accounting, Organizations and Society* 13(3): 251-261.

_____ 1992. Accounting Filling The Negative Space. *Accounting, Organization and Society*. 17(3/4): 313-41.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

Internasional Accounting Standard Board. 2011. *Fair Value Measurement*. http://ifrs.org./IASB-Projects. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.

International Accounting Standard Committee. 1997. *Exposure Draft*. Inter national Accounting Standard Committee. London.

Johnson, L T. 2005. Relevance and Reliability. *The FASB Report*. Feb 28.

Kuhn, T. S. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press. Chicago.

Lee, T. A. 1982. Chambers and Accounting Communication. *Abacus* 18(2): 152-165.

Li, D. H. 1972. The Semantic Aspect of Communication Theory and Accountancy. *Journal of Accounting Research*. 10(2): 102-107.

Macintosh, N.B. 2003. From Rationality to Hyperreality: Paradigm Poker. *International Review of Financial Analysis*. 12: 453-456. *http:*// www.sciencedirect.com. Diunduh tanggal 28 Desember 2011.

Macintosh, N. 2005. *Accounting, Accountants and Accountability: Poststructuralist Positions*. Routledge. New York.

Macintosh, N. B., T. Shearer, D. B. Thornton, dan M. Welker. 2000. Accounting as Simulacrum and Hyperreality: Perspective on Income and Capital. *Accounting, Organizations, and Society*, 25: 15-30.

Mattessich, R. 2003. Accounting Representation and The Onion Model of Reality: a Comparison with Baudrillard's Order of Simulacra and His Hyperreality. *Accounting, Organization and Society* (28): 443-470.

McGoun, E. G. 1997. Hyppereal Finance. *Critical Perspective on Accounting* 8: 601-632.

Meyer, P. E. 1976. A Framework for Understanding "Substance Over Form" In Accounting. *The Accounting Review*. January.

Mustika, I. 2008. *Skandal Enron dan Arthur Andersen*. http://iramustika.wordpress.com. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.

Norbarani, L. 2012. *Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99.* http://eprints.undip.ac.id. Diunduh tanggal 25 Juni 2012.

Preston, A. M., C. Wright dan J. J. Young. 1996. Imag[in]ing Annual Reports. *Accounting, Organization and Society*. 21(1): 113-137.

Riduwan, A. 2010. Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba; Studi Hermeneutika. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 14(2).

Riduwan, A., I. Triyuwono, G. Irianto, dan U. Ludigdo, 2009. Semiotika Laba Akuntansi: Studi Kritikal – Posmodernis Derridean. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII*, Samarinda.

Rutherford, B. A. 1985. The True and Fair View Doctrine: A Search for Explication. *Journal of Business Finance and Accounting*. 12 (4): 483.

Salim, A. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta.

Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. Macmillan Education Australia PTY LTD.

Schipper, K. 1989. Commentarry on Earnings Management. *Accounting Horizons*. 3: 91-102.

Schroeder, R. G. dan M. V. Clark. 1998. *Accounting Theory: Text and Reading*. John Wiley & Sons. New York.

Sudibyo, B. 2001. *Bambang Sudibyo Dikukuhkan Guru Besar*. Gatra.Com.htm. Diunduh tanggal 7 Maret 2012.

Suryaningrum, D. H. 2011. *Beauty and The Beast: Hiperealitas dan Realitas Akuntansi-Kajian Posmodernisme Baudrillarian Atas Goodwill*. http://www.scribd.com/doc/76702609. Diunduh tanggal 31 Desember 2011.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.* Edisi kedua. BPFE. Yogyakarta.

Triyuwono, I. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah.* Edisi 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Warsono, S. 2011. *Adopsi Standar Akuntansi IFRS Fakta, Dilema dan Matematika*. AB Publisher. Yogyakarta.

**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411 - 0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# STRATEGI USAHA KECIL RITEL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN KEUNGGULAN BERSAING BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)

**Saban Echdar**
*sabanechdar@gmail.com*
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to analyze the influence of service orientation, entrepreneurial, market, location and product selection on the performance of small retail businesses, as well as influence the performance of small retail businesses on competitive advantage. This study includes a descriptive study, data collection by interview and questionnaire. The study population was small retail businesses in the city of Makassar and purposive sampling techniques and random sampling with a sample of 120 respondents. Using SEM analysis, which is operated through the AMOS program. The results showed that the service orientation, orientation market, location and selection of products and a significant positive effect on the performance of small retail businesses, because it always strives to provide the best service, the expansion of markets, proximity to customers and always prepare a variety of product sales. Entrepreneurial orientation is not positive and significant effect on the performance of small retail businesses because entrepreneurs do not see the action of the performance advantage but how to maintain a sustainable business in order. The results also show that the performance of small retail businesses and significant positive effect on competitive advantage because the performance is getting better able to maintain competitive advantage.*

*Key words: small business retail, performance and competitive advantage.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh orientasi pelayanan, kewirausahaan, pasar, lokasi dan pilihan produk terhadap kinerja usaha kecil ritel, serta pengaruh kinerja usaha kecil ritel terhadap keunggulan bersaing. Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif, pengumpulan data dengan teknik wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah usaha kecil retail di Kota Makassar dan teknik pengambilan sampel secara purposive dan random sampling dengan jumlah sampel 120 responden. Mengunakan analisis SEM, yang dioperasikan melalui program AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pelayanan, orientaasi pasar, lokasi dan pilihan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel, sedangkan orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil. Kinerja usaha kecil ritel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing.

Kata kunci: Usaha kecil ritel, kinerja dan keunggulan bersaing.

## PENDAHULUAN

Saat ini usaha dagang dalam bentuk apapun sepertinya menarik, salah satunya adalah usaha ritel. Ada banyak orang yang tertarik dan terjun dalam usaha ini. Salah satu daya tariknya adalah karena usaha ritel ini memberikan keuntungan bagi mereka. Biasanya mereka yang menjual barang eceran tidak mengambil keuntungan yang banyak, asalkan barang mereka banyak keluar atau laku, sudah bisa dibilang berhasil. Beberapa jenis usaha ritel yang ada saat ini, berikut jenis usaha ritel dari yang kecil hingga besar, diantaranya adalah pedagang kaki lima, warung atau toko-toko kecil, minimarket, supermarket dan depar-

temen store. Usaha kecil ritel (*Small business retail*) merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang perekonomian wilayah. Usaha kecil ritel memberikan satu pandangan hidup untuk jutaan orang yang mencari nafkah dalam sektor perekonomian. Peritel memberikan barang dan jasa yang dibutuhkan semua masyarakat, dari makanan hingga alat elektronik.

Usaha ritel adalah salah satu segmen dengan tingkat pertumbuhan paling cepat di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagian besar peritel meliputi penjualan barang atau jasa dari pihak pembuat, penjual grosir, agen, importir, atau peritel lainnya dan menjualnya kepada konsumen untuk penggunaan pribadi. Harga yang dikenakan untuk barang-barang dan jasa termasuk pengeluaran peritel dan termasuk laba. Setiap tahun, sektor vital dari ekonomi ini menjadi sumber GNP *(gross national product)* yang tidak bisa dianggap remeh.Usaha kecil ritel meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang, jasa ataupun keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali). Usaha kecil ritel atau eceran tidak hanya terbatas dalam penjualan barang, seperti sabun, minuman ataupun deterjen, tetapi juga layanan jasa seperti jasa potong rambut, ataupun penyewaan mobil. Usaha ritel pun tidak selalu dilakukan ditoko, tetapi juga bisa dilakukan melalui telepon atau internet, disebut juga dengan eceran/ritel non-toko.

Mengapa masyarakat kita senang masuk di sektor usaha ritel? Hal ini karena usaha ritel memiliki beberapa kelebihan, yaitu modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar, umumnya lokasi usaha ritel strategis, mereka mendekatkan tempat usahanya dengan tempat berkumpul konsumen, seperti dekat pemukiman penduduk, terminal bus, atau kantor-kantor, hubungan antar peritel dengan pelanggan cukup dekat, komunikasi dua arah antara pelanggan dengan peritel cukup dekat. Dibalik kelebihan itu, usaha kecil ritel di berbagai kota, terkhusus di Kota Makassar memiliki beberapa kekurangan, yaitu keahlian dalam mengelola toko ritel berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel, administrasi (pembukuan) kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh peritel, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga usaha ritel yang diketahui oleh calon pembeli/pelanggan. Hal inilah yang menghambat peningkatan kinerja dan keunggulan bersaing berkelanjutan usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Sejalan dengan kelemahan usaha kecil, Kuncoro (2006) menyatakan bahwa usaha kecil menengah di Indonesia secara kualitas sulit berkembang di pasar karena menghadapi beberapa masalah internal, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya orientasi kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, minimnya informasi, dan rendahnya orientasi pasar (*market orientation*). Kelompok usaha ini mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 87 % dari jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia, dan sumbangannya terhadap PDB mencapai 54% (Suarja, 2007 dalam Rahab dan Sudjono, 2012). Data tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya usaha kecil merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Oleh sebab itu upaya peningkatan kinerja dan daya saing usaha kecil ritel merupakan hal yang penting dalam mengembangkan sektor riil yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja. Daya saing usaha kecil ritel merupakan hal yang penting bagi pemilik usaha kecil dan perekonomian dalam lingkup yang lebih luas. Daya saing usaha kecil ritel secara berkelanjutan dapat membentuk fondasi ekonomi yang kuat dalam bentuk stabilitas ekonomi mikro, iklim usaha dan investasi yang sehat, sekaligus dapat meningkatkan kinerja usaha kecil ritel tersebut.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci dalam mengembangkan suatu organisasi bisnis secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas sumberdaya yang ada dalam organisasi. Meningkatkan kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan suatu usaha kecil menengah secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja usaha kecil ritel. Dengan kinerja yang baik diharapkan usaha kecil ritel di Kota Makassar dapat berkembang dan bertahan dengan baik serta mempu meningkatkan daya saingnya.

Kota Makassar, sebagai barometer Propinsi Sulawesi Selatan, usaha kecil ritel ini tumbuh sangat cepat, namun pada perjalanan usahanya banyak diantara ritel yang berdiri tidak dapat mencapai kinerja yang baik dan keunggulan bersaing yang mapan. Bahkan banyak usaha kecil ritel yang menghentikan kegiatan usahanya karena tidak mampu bersaing. Jumlah usaha kecil (termasuk ritel) di Kota Makassar saat ini sebanyak 8.458 unit, tersebar di 14 Kecamatan di 143 kelurahan, bergerak dalam empat sektor usaha, yakni perdagangan (5.076), aneka jasa (2.539), industri non pertanian (592) dan industri pertanian (251) (Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 2012). Dari jumlah tersebut, hampir sebagian besar usaha kecil ritel masih sangat lemah, masih membutuhkan perhatian, penangan dan keberpihakan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam penguatan usaha dan peningkatan kinerja dan daya saingnya.

Dalam konteks inilah peneliti merasa terpanggil dan punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah Kota Makassar dalam memberdayakan usaha kecil ritel, lewat penelitian ini, guna menyusun solusi yang strategis dan model pembinaan yang tepat dalam rangka peningkatkan kinerja dan keunggulan bersaing usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Bertolak pada uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh orientasi pelayanan, orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, pilihan produk terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar serta kinerja usaha kecil terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: (a) bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi untuk penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kinerja usaha kecil ritel, (b) bagi usaha kecil ritel, dapat disusun suatu model pengembangan kewirausahaan, (c) bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunaan sebagai masukan dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil ritel di Kota Makassar.

## TINJAUAN TEORETIS

### Usaha Kecil Ritel

Kata Ritel berasal dari bahasa Perancis, "*retailer*", yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eceran berarti secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); setengan-setengah. Usaha ritel adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang, jasa ataupun keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali). Usaha ritel (eceran) tidak hanya terbatas pada penjualan barang, seperti sabun, minuman, ataupun deterjen, tetapi juga layanan jasa seperti jasa potong rambut, ataupun penyewaan mobil. Usaha ritel pun tidak harus selalu di lakukan di toko, tapi juga bisa dilakukan melalui telepon atau internet, disebut juga dengan ritel non-toko. Usaha kecil ritel adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan atau pembelian barang, jasa ataupun keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir

untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga ataupun rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis (dijual kembali).

Secara garis besar, usaha ritel yang berfokus pada penjualan barang sehari-hari terbagi dalam dua jenis, yaitu usaha ritel tradisional dan usaha ritel modern (Rozaniwati dan Tata, 2010). Ciri-ciri usaha ritel tradisional adalah sederhana, tempatnya tidak terlalu luas, barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, sistem pengelolaan masih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan berbelanja dan masih ada proses tawar-menawar harga dengan pedagang, serta produk yang dijual tidak dipajang secara terbuka sehingga pelanggan tidak mengetahui apakah peritel memiliki barang yang dicari atau tidak. Sedangkan usaha ritel modern adalah sebaliknya, menawarkan tempat yang luas, barang yang dijual banyak jenisnya, sistem manajemen terkelola dengan baik, menawarkan kenyamanan berbelanja, harga jual sudah tetap (*fixed price*) sehingga tidak ada proses tawar-menawar dan adanya sistem swalayan/pelayanan mandiri, serta pemajangan produk pada rak terbuka sehingga pelanggan bisa melihat, memilih, bahkan mencoba produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli (Rozamiwati dan Tata, 2010)

Saat ini usaha kecil ritel merupakan kelompok usaha yang paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negara ini. Perkembangan jumlah unit usaha kecil menengah yang terus meningkat, tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar bagi masyarakat. Namun demikian usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. Kotler (2012), menyatakan bahwa usaha kecil ritel merupakan seluruh aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa langsung pada konsumen yang olehnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan non bisnis. Riteler merupakan orang, setiap organsasi bisnis yang volume penjualannya terutama bersumber dari usaha ritel.

Boyd *et al.*, (2010), mendefinisikan ritel sebagai usaha menjual barang dan jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis. Biasanya pengambilan posisi sebagai pemilik untuk barang-barang yang mereka tangani dan mendapatkan laba dari pembedaan harga yang dibayar untuk barang tersebut dengan harga yang diterima dari konsumen.

Usaha ritel merupakan semua aktivitas yang langsung berhubungan dengan penjualan produk dan jasa kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Dengan kata lain, setiap badan usaha/perorangan yang menjual produk dan menyediakan jasa pada konsumen akhir berarti telah melakukan fungsi bisnis ritel. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ritel, yaitu: Lokasi usaha, harga yang tepat, dan suasana toko. Dalam membangun usaha, apapun yang akan direncanakan pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam usaha tersebut. Kelebihan dan kekurangan dalam membangun usaha ritel, adalah:

1. Kelebihan usaha ritel; modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar, umumnya lokasi usaha ritel strategis, mereka mendekatkan tempat usahanya dengan tempat berkumpul konsumen, seperti dekat pemukiman penduduk, terminal bus, atau kantor-kantor, hubungan antar peritel dengan pelanggan cukup dekat, karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan peritel.
2. Kekurangan usaha ritel, keahlian dalam mengelola toko ritel berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel, administrasi (pembukuan) kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh peritel, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga usaha ritel yang diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan.

**Kinerja**

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam perusahaan. Oleh sebab itu kinerja usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja perusahaan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai dimensi. Banyak pendapat mengenai dimensi yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan. Menurut Hartini (2012), pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari dua dimensi yaitu keuangan dan non keuangan. Kinerja perusahaan menjadi kunci pokok untuk tetap eksis dalam pasar global. Rahayu (2009) mengatakan bahwa kinerja adalah merujuk pada tingkat pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kinerja sebuah perusahaan adalah hal yang sangat menentukan dalam perkembangan perusahaan. Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk tetap berdiri (*survive*), memperoleh laba (*benefit*) dan berkembang (*growth*). Hal ini dapat tercapai apabila perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik.

Performance (kinerja) menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja. Kinerja menurut Anwar Prabu (2005) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan (2004), kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dengan demikian kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu usaha sesuai dengan kemampuan dan tanggungjawab yang diberikan yang tidak melanggar aturan main serta mengetahui dampak positif dan negatifnya dari suatu kebijakan operaional. Oleh karena itu setiap unit usaha akan selalu mengukur dan menilai kinerja usahanya agar diketahui tingkat hasil nyata yang dapat dicapai dalam unit tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Rivai (2009) menyatakan bahwa suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja berdasarkan dua alasan pokok, yaitu: (1) manajer memerlukan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang; dan (2) manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan untuk memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk pengembangan karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. Dengan kata lain tujuan penilaian kinerja usaha kecil ritel adalah merumuskan perencanaan sumber daya manusia secara baik dan benar, menentukan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan perusahaan, sebagai informasi untuk identifikasi tujuan, melakukan evaluasi terhadap sistem sumber daya manusia dan penguatan terhadap kebutuhan pengembangan usaha kecil ritel.

**Orientasi Pelayanan**

Orientasi pelayanan (*Service Orientation*) memiliki peranan penting pada kelangsungan operasional usaha kecil ritel,

peranannya dapat dirasakan baik di tingkat karyawan maupun tingkat organisasi. Hogan *et al.,* (2004) menjelaskan bahwa orietasi pelayanan pada tingkat individu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan sikap dan perilaku yang mempengaruhi kualitas interaksi antara karyawan organisasi dengan pelanggan mereka. Pada level orgaisasi, orientasi pelayanan merupaan suatu karakteristik desain internal seperti struktur organisasi, suasana dan budaya pada level organisasi (Lytle *el al*,. 1998 dalam Kim *et al.,* 2004). Orientasi Pelayanan Pelanggan (*Customer Service Oientation*) adalah keinginan untuk membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, artinya berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, usaha kecil ritel yang menerapkan orientasi pelayanan akan mempunyai keuntungan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa bila usaha ritel memutuskan untuk menciptakan suatu strategi produk dengan suatu pelayanan, maka mereka membuat suatu perubahan sistematis dan berorientasi jangka panjang (Hamburg *et al.,* 2002).

Usaha kecil ritel yang menerapkan strategi bisnis berorientasi pada pelayanan akan dapat membangun hubungan yang baik dan harmonis antara pegawai dan pelanggan. Dengan hubungan yang baik dan harmonis, usaha kecil ritel dapat memperoleh informasi yang penting dari pelanggan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan nilai tambah yang diberikan pada pelanggan. Menurut Hamburg *et al.,* (2002), strategi bisnis yang berorientasi pada pelayanan dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu (1) banyaknya jenis pelayanan yang ditawarkan, (2) banyaknya pelanggan yang ditawari pelayanan dan (3) keaktifan menekankan pada pelayanan. Strategis bisnis yang berorientasi pada pelayanan secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan, sekaligus berpengaruh terhadap pencapaian keuntungan perusahaan.

**Orientasi Kewirausahaan**

Menurut Dess and Lumpkin (2005), orientasi kewirausahaan adalah keseluruhan inovasi radikal perusahaan, tindakan strategis yang proaktif dan aktivitas penngambil risiko yang diwujudkan dalam bentuk dukungan pada proyek yang berhubungan dengan dimensi-dimensi kewirausahaan. Dimensi tersebut adalah bertindak untuk diri sendiri, kemauan untuk melakukan inovasi, menanggung resiko dan kecenderungan untuk bertindak agresif dalam bersaing dan relatif proaktif untuk menangkap peluang pasar. Mille and Freisen (1983) dalam Dess and Lumpkin (2005) menyatakan bahwa konsep operasional dari orientasi wirausaha adalah harus berani menjadi yang pertama dalam inovasi produk pasar, berani mengambil resiko dan melakukan tindakan proaktif agar dapat mengalahkan persaing. Menurut Dess and Lumpkin (2005), bahwa perusahaan yang berorientasi kewirausahaan adalah pengambil resiko, tidak seperti perusahaan konservatif yang sifatnya cenderung bertahan dan menghindari resiko dalam upaya mempertahankan keberhasilan yang lalu. Selanjutnya Dess and Lumpkin (2005), menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan secara proaktif berhubungan dengan kinerja perusahaan.

Orientasi kewirausahaan itu sendiri, merupakan proses, praktek, dan kegiatan pengambilan keputusan yang menuju pada new entry. Orientasi kewirausahaan muncul dari perspektif pilihan strategis yang menyatakan bahwa peluang *new entry* untuk berhasil sangat tergantung pada kinerja yang menjadi tujuan. Sedangkan menurut Frishammar dan Horte (2007) Orientasi kewirausahaan mencerminkan sejauhmana perusahaan cenderung untuk melakukan inovasi, mengambil risiko dan proaktif.

Orientasi Pemasaran dan orientasi kewirausahaan adalah dua kapabilitas atau orientasi yang terpisah tetapi saling melengkapi yang dapat besama-sama. Kapabilitas adalah kebiasaan sehari-hari yang

komplek secara sosial yang menentukan efisiensi perusahaan dalam mentransformasi input menjadi output (Pangeran, 2012). Teece and Pisano (1994) menjelaskan bahwa kedua orientasi, pemasaran dan kewirausahaan adalah kapabilitas yang dinamis karena memiliki sub kompetensi atau kapabilitas yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan proses dan produk baru dan merespon lingkungan bisnis yang berubah.

Pernyataan Teece and Pisano (1994) tersebut didukung oleh Frishammar dan Horte (2007) yang menyatakan bahwa orientasi pemasaran dan orientasi kewirausahaan menciptakan keterampilan yang kompleks, tak berwujud, tak diucapkan, yang memungkinkan perusahaan menghasilkan gagasan baru untuk menciptakan produk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pangeran (2012) menunjukkan bahwa pengambilan risiko dan keproaktifan berpengaruh positif pada kinerja keuangan pengembangan produk baru. Dengan demikian dimensi kunci dari orientasi kewirausahaan termasuk kemauan untuk mandiri *(autonomy*), keinginan melakukan inovasi (*innovativeness)*, kecenderungan untuk bersikap agresif terhadap pesaing (*competitive aggressiveness*), dan bersikap proaktif terhadap peluang pasar (*proactiveness*).

**Orientasi Pasar**

Salah sau faktor yang menentukan kinerja perusahaan adalah orientasi pasar (*market orientation*). Orientasi pasar merupakan budaya organisasi yang efektif dan efisien yang mengarahkan organisasi pada aktivitas penciptaan nilai yang tinggi bagi konsumen. Orientasi pasar merupakan hal yang penting bagi perusahaan sejalan dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan dimana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dengan tempatnya. Dalam pengertian sederhana, orientasi pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran lebih efektif dan efisien daripada pesaing untuk menentukan pemenuhan tujuan perusahaan (Kotler dan Asmstrong, 2009)

Menurut Cravensi (2012), ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk berorientasi pasar, yaitu pendekatan *market driven* dan pendekatan *driving market*. Pendekatan *market driven* merujuk pada orientasi bisnis yang berdasarkan pada pemahaman dan reaksi terhadap pilihan-pilihan dan perilaku pemain di struktur pasar yang ada. Sedangkan pendekatan *driving market* mengimplikasikan pengaruh terhadap struktur pasar atau perilaku pasar, dengan tujuan meningkatkan posisi persaingan (Cravensi, 2012). Baik pendekatan *market driven* dan *driving market*, sama-sama berfokus pada konsumen, pesaing, dan kondisi pasar.

Kohli and Jaworski (2005) dalam Simintiras (2011) mendefinisikan orientasi pasar sebagai: *the organization wide generation of market intelligence pertaining to current and future needs of the customers, dissemination of intelegence horizontally and vertically within the organization, and organization wide action or responsiveness to it*. Narver dan Slater (2000) dalam Simintiras (2011) menyatakan bahwa orientasi pasar: *characterizes and organization's disposition to deliver superior value to its customers continuously.* Definisi ini berfokus pada penciptaan nilai unggul produk perusahaan secara berkelanjutan, dimana orientasi pasar terdiri dari tiga komponen yaitu orientasi pelanggan baru, orientasi pesaing, dan koordinasi interfungsional (Narver and Slater, 2000). Semua aktivitas orientasi pelanggan dan orientasi pesaing dilibatkan dalam memperoleh informasi tentang pembeli dan pesaing pada pasar yang dituju dan menyebarkan melalui bisnis, sedang koordinasi antar fungsi didasarkan pada informasi pelanggan serta pesaing dan terdiri dari usaha bisnis yang terkoordinasi.

Perusahaan yang berorientasi pasar merupakan perusahaan yang menjadikan pelanggan dan pesaing sebagai kiblat bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya.

Perusahaan dengan orientasi pasar yang tinggi membawa konsekuensi pada kinerja perusahaan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hartini (2012) bahwa perusahaan dengan orientasi pasar tinggi berusaha untuk memberikan nilai pelanggan yang lebih tinggi daripada penawar pesaing. Nilai yang lebih tinggi ini berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pasar dapat menghasilkan sejumlah keuntungan positif, termasuk keuntungan yang meningkat, memperbaiki perilaku karyawan dan tenaga penjualan yang lebih berorientasi pada konsumen (Kohli dan Jaworski, 2005). Oleh karena itu, perlu dimanajemeni melalui upaya-upaya untuk selalu mencari inforamsi tentang kebutuhan-kebutuhan pelanggannya sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan orientasi pemasaran adalah untuk mensejajarkan perusahaan dengan bagian khusus lingkungan pasar. Pasar diyakini menjadi sejumlah pelanggan dan klien yang menggunakan produk organisasi perusahaan atau produk pengganti dan pesaing (Frishammar dan Horte, 2007).

**Lokasi Usaha**

Kotler dan Amstrong (2009), menyatakan bahwa kunci untuk mencapai sukses dalam bisnis ritel adalah lokasi, lokasi dan lokasi. Hal ini mengidentifikasi adanya kecendrungan pelanggan yang memilih tempat belanja yang mudah dicapainya. Cara pemilihan lokasi usaha perlu mempertimbangkan lalu lintas pembeli, survei kebiasaan berbelanja pelanggan dan menganalisis lokasi. Lokasi usaha merupakan komitmen sumberdaya jangka panjang yang dapat berpengaruh terhadap masa depan serta pertumbuhan ritel, sehingga mempunyai implikasi yang besar (Lamb *et al.*, 2011). Pilihan lokasi dimulai dengan memilih komunikasi yang bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan maupun iklim politik. Memilihan lokasi termasuk juga kemudahan parkir maupun jarak perjalanan, merupakan faktor yang berpengaruh terhadap persepsi konsumen Lokasi ritel yang dekat dengan pemukiman akan mampu menghasilkan pelanggan lebih banyak di banding lokasi yang jauh dari pemukiman.

Lokasi usaha sangat menentukan keberhasilan bisnis. Dengan lokasi yang strategis dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan konsumen. Sebaliknya, jika lokasi kurang bagus penjualan kurang maksimal. Beberapa hal yang perlu dicermati saat memilih lokasi bisnis, antaranya: 1) Mendekati konsumen potensial, lokasi bisnis yang dipilih harus mendekati konsumen yang dibidik. Misal berbisnis alat tulis, usahakan lokasi dekat dengan kampus atau sekolah. 2) Tingkat kepadatan penduduk, indikator besar kesuksesan usaha terletak di besarnya potensi pasar yang dituju. Makin padat suatu lokasi, makin banyak populasi manusia yang bisa menjadi pelanggan. 3) Tingkat ekonomi, pilihlah lokasi dengan mayoritas pendapatan penduduk yang berpenghasilan menengah ke atas. Dengan lokasi seperti itu, penjualan akan stabil karena banyak konsumen potensial yang mampu membeli produk. 4) Mudah diakses, Lokasi usaha yang baik adalah yang mudah dikenali dan mudah diakses konsumen. Sebaiknya memasang tanda seperti plang/spanduk yang menarik. 5) Tingkat kompetisi, perhatikan seberapa besar kompetisi usaha sejenis di lokasi yang dijadikan tempat berbisnis. Jika di lokasi tersebut banyak pesaing yang menawarkan produk sejenis, peluang mendapatkan pelanggan akan mengecil. Jika satu-satunya lokasi yang dipilih, pastikan produk yang ditawarkan memiliki banyak keunggulan dibanding kompetitor lain.

**Pilihan Produk**

Pilihan produk adalah pilihan relatif atas barang yang ditawarkan, yaitu mengacu pada perbedaan antara suatu riteler dengan riteler pesaing utama dalam hal keseragaman barang dagangan yang ditawarkan. Hal ini termasuk jumlah dari unit-unit per-

sediaan yang ada, jumlah kategori produk yang berbeda. Faktor ini merupakan kunci yang penting dalam menunjukkan ciri khas suatu toko. Smith dan Reinertsen (2006) mengatakan bahwa modifikasi produk yang lebih kecil merupakan faktor utama bagi pengembangan produk yang tak dikenal. Alasannya, karena memberi manfaat keuangan, yaitu investasi telatif kecil untuk setiap produk, dengan meningkatkan pendapatan dan profit lebih cepat. Lebih lanjut, kebutuhan pelanggan lebih mudah diprediksi selama horizon jangka pendek. Keunggulan teknik, seperti pengembangan produk untuk pasar dapat direalisasi dengan lebih cepat karena proses pegembangan produk tidak begitu kompleks.

Perusahaan memiliki keterbatasan dalam kompleksitas hal yang dapat ditangani pada satu waktu dan perusahaan akan lebih terfokus pada hal-hal yang paling utama. Hal ini sama dengan konsep dari alokasi dalam literature tabel psikologis: yaitu memberikan perhatian yang lebih pada satu aspek tertentu, mengesampingkan aspek yang lain karena keterbatasan pada proses kemampuan (Kahneman, 1973 dalam Hamburg *et al.,* 2006).

**Keunggulan bersaing**

Pemilik dan para pemangku kepentingan perusahaan (manajer, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra, pemerintah, dan sebagainya) berharap perusahaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam jangka panjang. Mereka mendambakan perusahaan dapat bertahan, mampu menghadapi persaingan dan tumbuh berkembang dengan memanfaatkan berbagai peluang bisnis. Perusahaan diharapkan mendapatkan dan mempertahankan keunggulan bersaing secara berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*). Setiap perusahaan yang bersaing dalam suatu lingkungan industri mempunyai keinginan untuk dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Umumnya perusahaan menerapkan strategi bersaing ini secara eksplisit melalui kegiatan-kegiatan berbagai departemen fungsional perusahaan yang ada. Pemikiran dasar dari penciptaan strategi bersaing berawal dari pengembangan formula umum mengenai bagaimana bisnis akan dikembangkan, apakah sebenarnya yang menjadi tujuannya dan kebijakan apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengertian keunggulan bersaing sendiri memiliki dua arti yang berbeda tetapi saling berhubungan. Pengertian pertama menekankan pada keunggulan atau superior dalam hal sumber daya dan keahlian yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran, manufakturing, dan inovasi dapat menjadikannya sebagai sumber daya untuk mencapai keunggulan bersaing. Pengertian kedua menekankan pada keunggulan dalam pencapaian kinerja selama ini. Pengertian ini terkait dengan posisi perusahaan dibandingkan dengan apa pesaingnya. Perusahaan yang terus memperhatikan perkembangan kinerjanya dan berupaya untuk meningkatkan kinerja tersebut memilki peluang mencapai posisi persaingan yang baik dan perusahaan memilki modal yang kuat untuk terus bersaing dengan perusahaan lain (Dogre and Vicrey, 1994, dalam Supranto, 2009).

Keunggulan bersaing merupakan hasil dari implementasi strategi yang memanfaatkan berbagai sumberdaya perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengembangkan keahlian karyawannya dengan baik akan menjadikan perusahaan unggul dan penerapan strategi yang berbasis sumber daya manusia akan sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. Sedang asset atau sumber daya unik merupakan sumber daya nyata yang diperlukan perusahaan guna menjalankan strategi bersaingnya. Kedua sumber daya ini harus diarahkan guna mendukung penciptaan kinerja perusahaan yang berbiaya rendah dan memilki perbedaan dengan perusahaan lain. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh *Porter* (2006) yang menjelaskan bahwa keunggulan

bersaing adalah jantung kinerja pemasaran untuk menghadapi persaingan. Keunggulan bersaing diartikan sebagai strategi benefit dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk menciptakan keunggulan bersaing yang lebih efektif dalam pasarnya. Strategi ini harus didesain untuk mewujudkan keunggulan bersaing yang terus menerus sehingga perusahaan dapat mendominasi baik dipasar maupun pasar baru.

Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai-nilai atau manfaat yang diciptakan oleh perusahaan bagai para pembelinya. Pelanggan umumnya lebih memilih membeli produk yang memiliki nilai lebih dari yang diinginkan atau diharapkannya. Namun demikian nilai tersebut juga akan dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Pembelian produk akan terjadi jika pelanggan menganggap harga produk sesuai dengan nilai yang ditawarkannya. Beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur keunggulan bersaing adalah keunikan, jarang dijumpai, tidak mudah ditiru, tidak mudah diganti, dan harga bersaing. Keunikan produk adalah keunikan produk perusahaan yang memadukan nilai seni dengan selera pelanggan. Harga bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya dengan harga umum di pasaran. Tidak mudah dijumpai berarti keberadaannya langka dalam persaingan yang saat ini dilakukan. Tidak mudah ditiru berarti dapat ditiru dengan tidak sempurna. Sulit digantikan berarti tidak memiliki pengganti yang sama.

Untuk itu usaha kecil ritel harus memiliki kemampuan kapabilitas dinamik (*dynamic capability*) yakni kemampuan membentuk ulang, mengkonfigurasi, dan merekonfigurasi sumberdaya dan kapabilitas usahanya sehingga dapat merespon perubah an teknologi dan pasar.

**Penelitian Terdahulu**

Bernard J *et al.,* (2005) dalam penelitiannya berjudul "*Market Orientation: The Construct, Research Propositions and Managerial Implications"* menemukan bahwa orientasi pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan pengiriman pada suatu bisnis. Dalam penelitiannya yang lain berjudul "*Market Orientation: Antecedents and Consequences*", menemukan bahwa Orientasi pasar berpengaruh terhdap kinerja bisnis. Variabel moderating berupa pergerakan faktor eksternal (pasar, teknologi, pesaingan) tidak mempengaruhi hubungan orientasi pasar dengan kinerja bisnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Bharadwaj *et al.,* (2004), dengan judul: *Sustainable competitive advantage in service industries: A Conceptual model and research propositions*, menemukan bahwa tujuan dari strategi keunggulan bersaing bekelanjutan adalah untuk semakin meningkat kinerja bisnis perusaahaan.

Steven *et al.,* (2004) dalam penelitiannya: *Entrepreneurial enterprises, endogenous ownership, and the limits to firm size,* menyimpulkan bahwa teori-teori yang dieksploirasi memberikan penjelasan mengenai bagaimana hal-hal pengenai pemberdayaan konstraktual membawa perusahaan ke perusahaan kewirausahaan. Hal ini terjadi diantaranya pada perusahaan perdagangan ritel dan restoran.

Dwi Hayu Agustini dan Erna Agustina Yudiati (2002) dalam penelitian berjudul "Keterkaitan keberhasilan usaha dengan jiwa kewirausahaan dan manajemen usaha pada pedagang eceran berskala kecil di Semarang", menemukan bahwa para reteler adalah *entrepreneur* dan mereka mengetahui bagaimana menjalankan bisnis nya dengan baik. Hasil uji-t membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara kewirausahaan dan pengetahuan manajerial terhadap kesuksesan bisnis. Bahwa kesuksesan bisnis lebih dipengaruhi oleh faktor lain daripada kedua faktor itu, sedangkan Hamburg *et al.,* (2006) dalam penelitiannya berjudul "*Service orientation of ritelers business strategy: Dimensions, antecedents and performance outcomes*", menemukan bahwa strategi orientasi pelayanan berpengaruh positif terhadap kinerja pasar dan profitabilitas. John C *et al.,* (2007) dalam penelitiannya berjudul: *The*

*effect of a market orientation on business profitability*, menemukan bahwa orientasi pasar merupakan faktor penting yang mempengaruhi keuntungan bisnis perusahaan.

**Model Penelitian**

Model Penelitian ini adalah sebagai berikut:

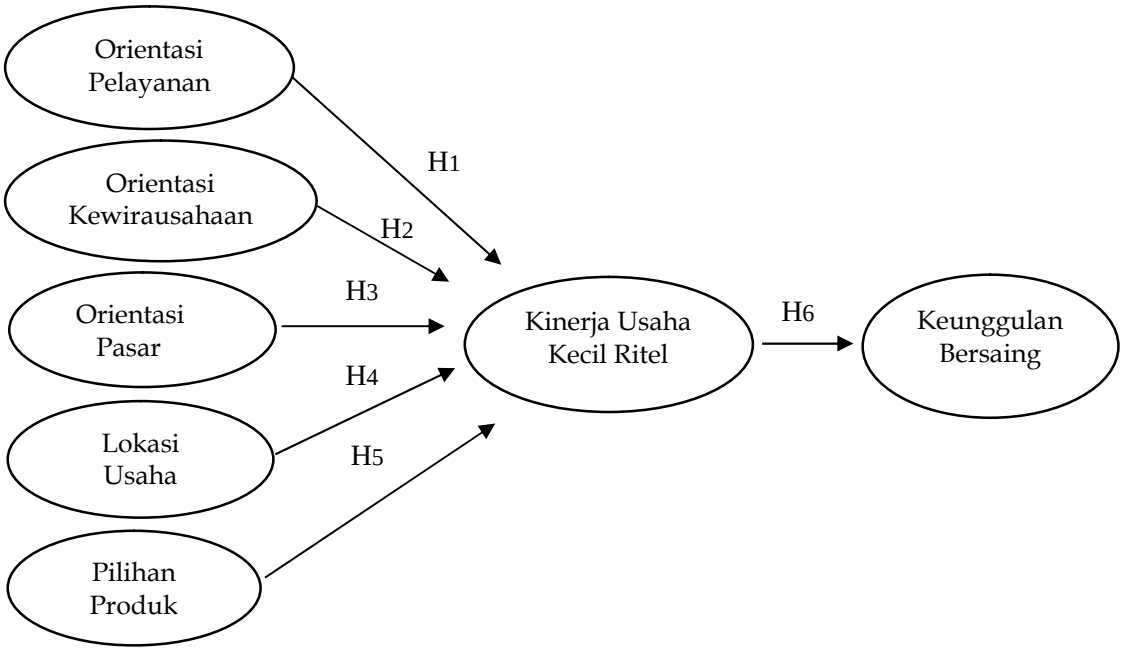


**Gambar 1**
**Kerangka Konseptual Penelitian**

Bertolak pada masalah penelitian dan urgensi penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini adalah:

$H_1$: Orientasi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

$H_2$: Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

$H_3$: Orientasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

$H_4$: Orientasi lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

$H_5$: Pilihan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

$H_6$: Kinerja usaha kecil ritel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan populasi pada usaha kecil retail yang tersebar di beberapa kecamatan. Penelitian ini termasuk penelitian diskriptif, bertujuan untuk menggambarkan orientasi dan kinerja atau fakta empiris. Keadaan populasi atau fakta empiris yang akan didiskripsikan adalah pengaruh orientasi pelayanan, orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, lokasi, pilihan produk terhadap kinerja usaha kecil ritel dan keunggulan bersaing bekelanjutan data dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara dengan responden terpilih.

Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu cara penarikan sampel yang bersifat tidak acak dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah (a) pengambilan sampel dilakukan terhadap unit usaha kecil ritel yang memiliki jumlah

karyawan minimal 5 orang, hal ini mengacu pada kriteria usaha kecil menurut BPS, agar sampel yang dipilih dapat mewakili populasi dengan baik, (b) usaha kecil ritel telah berdiri lebih besar 3 tahun, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja usaha, baik status usaha, jumlah karyawan maupun laba yang dihasilkan. Dengan Analisis SEM, ukuran sampel ideal dan representative adalah tergantung pada jumah indikator dikalikan lima (Hair (2005). Jadi, sampel untuk penelitian ini adalah: Jumlah indikator: 24; Sampel minimum: 24 x 5 = 120. Sesuai dengan rumus Hair (2005) tersebut, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 120 responden/usaha kecil retail di Kota Makassar.

Metode pengumpulan data dengan survey dan kuesioner, dibarengi dengan wawancara. Alat analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM), yang dioperasikan melalui program AMOS.

**Dimensionalisasi Variabel**

Dimensionalisasi Variabel pada bagian ini merupakan penjabaran dimana suatu variabel laten dibentuk dari dimensi-dimensinya. Dimensi ini yang nantinya akan menjadi obyek pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Dimensionalisasi dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti disajikan pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1**
**Dimensionalisasi Variabel**

| Variabel | Indikator | Sumber |
|---|---|---|
| Orientasi Pelayanan ($X_1$) | $X_{1.1}$=banyaknya jenis pelayanan yang ditawarkan<br>$X_{1.2}$=banyaknya tawaran pelayanan<br>$X_{1.3}$=keaktifan menawarkan pelayanan | Hamburg, Hoyer and Fassnacht (2006) |
| Orientasi Kewirausahaan ($X_2$) | $X_{2.4}$=inovasi; $X_{2.5}$=mandiri<br>$X_{2.6}$=proaktif; $X_{2.7}$=reaktif | Dess and Lumpkin (2005) |
| Orientsi Pasar ($X_3$) | $X_{3.8}$=pengembangan informasi pelanggan<br>$X_{3.9}$=pengebangan informasi pesaing<br>$X_{3.10}$=hubungan dengan supplier | Kohli and Jaworski (2005) |
| Lokasi Usaha ($X_4$) | $X_{4.11}$=kecepatan pencapaian<br>$X_{4.12}$=kemudahan capaian pengunjung<br>$X_{4.13}$=kemudahan parkir | Kotler (2009);<br>Kohli (2005)<br>James Bergin & Dan Berhardt (2006) |
| Pilihan Produk ($X_5$) | $X_{5.14}$=jenis barang<br>$X_{5.15}$=pesediaan barang<br>$X_{5.16}$=keragaman harga | Samli, Kelly dan Hunt (1998); Hamburg, Hoyer and Fassnacht (2006) |
| Kinerja Usaha Kecil Ritel (Y)) | $Y._{17}$=volume penjualan<br>$Y._{18}$=efektivitas usaha<br>$Y._{19}$=laba bersih<br>$Y._{20}$=loyalitas pelanggan<br>$Y._{21}$=manfaat bagi pelanggan | Ferdinan (2005);<br>Gregory et al(1996) |
| Keunggulan Bersaing Berkelanjutan (Z) | $Z._{22}$=bernilai<br>$Z._{23}$=brebeda dengan yang lain<br>$Z._{24}$=tidak mudah ditiru. | Day and Wensley (2002);<br>Sundar G<br>Bharadjwaj (2004). |

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

### Deskripsi Responden

Jumlah responden yang menjadi sampel utama dalam penelitian ini sebanyak 120 responden, yang diklasifikasi dalam empat kelompok umur. Responden berusia antara 26-40 tahun (53,3%), yang didominasi oleh bahan makanan dasar. Pada usia antara 15-25 tahun (27,50%), yang didominasi oleh usaha ritel sayur dan buah. Pada usia antara 41-55 tahun usaha retail pakaian. Kelompok diatas 55 tahun (1,7%), disominasi ritel peralatan rumah tangga. Banyak usaha ritel yang dijalankan oleh pria (72,5%) dibanding dengan wanita (27,5%). Dengan demikian maka latar belakang jenis kelamin sangat mendukung kelancaran usaha ritel.

### Uji Kesesuaian Model *(Goodness-of-fit Test)*

Pengujian model pada SEM bertujuan untuk melihat kesesuaian model. Menurut Kline (1998) bahwa model dapat dilanjutkan apabila hasil pengujian model keseluruhan atau F-test pada α =5% berada diluar batas ± 1,96 dalam uji dua arah, berarti indikator tersebut menunjukkan tidak ada hubungan antara sesama variebel eksogen. *Chi-square test* menunjukkan nilai yang mendekati nol menunjukkan rendahnya perbedaan antara harapan dan pengamatan, disamping itu *probability level* harus lebih besar dari 0.05 ketika chi-square mendekati angka nol. Indikator The Comparative Fit Index (CFI) penelitian ini lebih besar dari 0.80. Nilai *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) adalah lebih kecil dari 0.06 atau lebih kecil. Jika model telah fit maka parameter estimates telah teruji. Jika model tidak fit maka dapat diperbaiki. CMIN/DF relatif kurang dari 2.0. TLI (*Tucker Lewis Index*) dengan nilai menunjukkan *very good fit*. Hasil pengujian kesesuaian model awal dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Berdasarkan hasil olah Data Amos V 18.00, perhitungan *Reliability* (R) dan *Variance Extracted* (VE) terhadap indikator variabel Orientasi Pelayanan, Orientasi Wirausaha, Orientsi Pasar, Lokasi, Pilihan Produk, Kinerja Usaha Kecil Ritel, dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan diperoleh nilai nilai CR sebesar di atas 0,7 dan VE sebesar di atas 0,5. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua indikator ini reliabel dan valid untuk mengukur variabel latennya. Untuk itu peneliti memutuskan untuk mempertahankan variabel dan kelima indikator tersebut di dalam model penelitian, dengan pertimbangan kelima variabel tersebut valid sebagai penaksir variabel keunggulan bersaing.

Berdasarkan data uji kecocokan diatas, maka ditunjukkan dalam gambar 2.

**Tabel 2**
**Uji Kesesuaian Seluruh Model Awal (*Goodness-of-fit Test*)**

| Kriteria | *Cut-Off* | Hasil | Evaluasi |
|---|---|---|---|
| *Chi-Square* | diharapkan kecil | 0.028 | Baik |
| Probability | ≥ 0.05 | 0.061 | Baik |
| RMSEA | ≤ 0.06 | 0.055 | Baik |
| TLI | ≥ 0.95 | 0.981 | Baik |
| CFI | ≥ 0.80 | 0.966 | Baik |
| CMIN/ DF | ≤ 2.00 | 0.014 | Baik |

**Sumber: Olah Data Amos V 18.00**

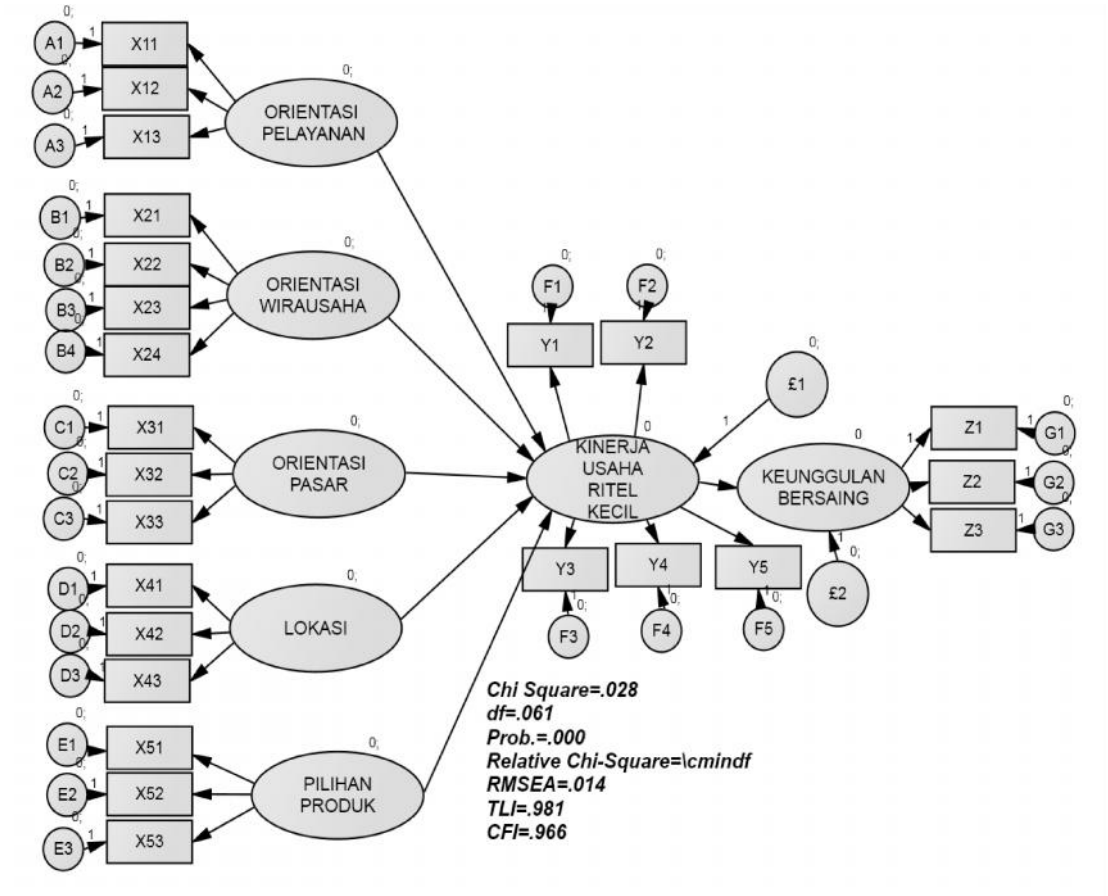


**Gambar 2**
**Hasil Uji Kecocokan**

**Uji Kausalitas**

Pada tabel 3 ditunjukkan signifikansi pengaruh antara variabel ditandai pada nilai probabilitasnya apabila berada dibawah P ≤ 5% maka signifikan.

**Pembahasan**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan orientasi pelayanan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software* AMOS pada tabel 3 menunjukkan bahwa orientasi pelayanan ($X_1$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel (Y). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,596 dengan nilai C.R. sebesar 4,571 dan diperoleh probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama ($H_1$) penelitian ini terbukti yaitu bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan orientasi pelayanan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software* AMOS pada tabel 3 menunjukkan bahwa orientasi kewirausaha ($X_2$) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel (Y) di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,067 dengan nilai C.R. sebesar 1.080 dan diperoleh probabilitas signifikan sebesar 0,057. Nilai probabilitas ini lebih besar dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05.

**Tabel 3**
**Hasil Pengujian Kausalitas Antara Variabel**

| Hubungan Antara Variabel | | | ε | δ | ф | P | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | <--- | X1 | 0,596 | 0,130 | 4,571 | *** | Signifikan 5% |
| Y | <--- | X2 | 0,067 | 0,062 | 1,080 | 0,057 | Tidak Signifikan 5% |
| Y | <--- | X3 | 0,638 | 0,101 | 6,344 | *** | Signifikan 5% |
| Y | <--- | X4 | 0,541 | 0,199 | 2,719 | 0,026 | Signifikan 5% |
| Y | <--- | X5 | 0,806 | 0,414 | 1,946 | 0,052 | Signifikan 5% |
| Z | <--- | Y | 0,306 | 0,085 | 3,599 | *** | Signifikan 5% |

**Sumber: Output Olah Data Amos V.18.0**

Dengan demikian hipotesis kedua ($H_2$) tidak terbukti yaitu tidak ada pengaruh positif dan signifikan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan orientsi pasar terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software* AMOS pada tabel 3 menunjukkan bahwa orientasi pasar ($X_3$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel (Y) di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,638 dengan nilai C. R. sebesar 6,344 dan diperoleh probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga ($H_3$) penelitian ini terbukti yaitu ada pengaruh positif dan signifikan orientasi pasar terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan lokasi terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan pada tabel 3 menunjukkan bahwa lokasi ($X_4$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel (Y) di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,541 dengan nilai C. R. sebesar 2,719 dan diperoleh probabilitas signifikan sebesar 0,026. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat ($H_4$) penelitian ini terbukti yaitu ada pengaruh positif dan signifikan lokasi terhadap kinerja usaha kecil di Kota Makassar.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pilihan produk terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan *software* AMOS pada tabel 5 menunjukkan bahwa pilihan produk ($X_5$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel (Y) di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,806 dengan nilai C.R. sebesar 1,946 dan diperoleh probabilitas signifikan sebesar 0,047. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian hipotesis kelima ($H_5$) terbukti, yaitu ada pengaruh positif dan signifikan pilihan produk terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Hipotesis keenam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja usaha kecil ritel terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan usaha kecil ritel di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software* AMOS pada tabel 3

menunjukkan bahwa kinerja usaha kecil ritel (Y) di Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan (Z). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,306 dengan nilai C. R. sebesar 3,599 dan diperoleh probabilitas signifikan sebesar 0,000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis keenam ($H_6$) penelitian ini terbukti, yaitu ada pengaruh positif dan signifikan kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan.

## SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan ha-hal sebagai berikut:

1. Orientasi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar karena usaha kecil yang ada di Makassar selalu berupaya memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.
2. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar, sebab tindakan sebagai wirausaha tidak melihat dari kinerja keuntungan tetapi bagaimana mempertahankan usaha supaya bisa hidup berkelajutan, disamping itu responden yang ditemui umumnya masih mudah sehingga kemampuan kewirausahaan masih sangat terbatas, masih perlu ditingkatkan.
3. Orientsi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar, karena usaha kecil ritel selalu berorientasi pada bagaimana perluasan dan mendapatkan pasar yang baik dan selalu mengikuti selera konsumennya.
4. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar, sebab keberadaan lokasi mengikuti kebutuhan pasar dan kedekatan dengan pelanggan adalah sangat tinggi.
5. Pilihan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar, sebab dengan menyiapkan banyak aneka ragam pilihan produk yang dijual dalam outlet ritelnya akan memudahkan bagi konsumennya untuk melakukan pilihan-pilihan dalam berbelanja.
6. Kinerja usaha kecil ritel di Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan, sebab dengan kinerja usaha yang semakin baik akan mampu mempertahankan keunggulan bersaing berkelanjutan dari usaha kecil ritel di Kota Makassar.

### Saran

Bagi Pemerintah:

1. Agar supaya usaha kecil ritel tidak bergantung pada pihak lain sehingga lebih mudah mengatur usaha dan menyusun strategi bersaing berkelanjutan yang tepat, pemerintah perlu meningkatkan kinerja dan keunggulan bersaing mereka melalui penguatan manajemen dan orientasi kewirausahaan secara terpadu dan bekesinambungan.
2. Agar usaha kecil ritel lebih leluasa bewirausaha, pemerintah sebagai regulator perlu bekerjasama dengan suplayer dalam menyalurkan produk-produk yang dibutuhkan usaha kecil ritel sebagai barang dagangannya.
3. Perlu disusun suatu model pembinaan yang terpadu dan komprehensif, yang bisa digunakan oleh Pemda cq. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam perumusan kebijakan dan rencana aksi pembinaan usaha kecil ritel di Kota Makassar secara terpadu.

Bagi Usaha Kecil Ritel:

1. Pelaku usaha kecil ritel perlu meningkatkan kinerjanya dalam: (a) ketepatan waktu berjualan/membuka usahanya/ kiosnya, (b) kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, (c) kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalahnya sendiri, (d) meningkatkan strategi pelayanan, pemasaran, lokasi, pilihan produk sesuai kebutuhan konsumen. Orientasi kewirausahaan yang perlu dibangun dan ditingkatkan antara lain (a) yakin bahwa keberhasilannya adalah dari usaha sendiri, (b) percaya diri yang tinggi, (c) transparan, (d) kreatif dan inovatif, dan (e) berani mengambil risiko.
2. Agar pelaku usaha kecil ritel lebih leluasa berkembang, maka sabar, tekun dan banyak strategi adalah salah satu kunci untuk keberhasilan. Disamping itu perlu selalu mencari informasi mengenai hal-hal baru yang sedang dibutuhkan dan banyak dicari masyarakat, agar usahanya bisa berkembang dengan baik dan dapat bekelanjutan (*sustainable).*

Bagi Peneliti berikutnya:

1. Peneliti yang menguji paradigm strategi usaha kecil, kinerja dan keungglan bersaing selalu menarik dan akan memperkaya berbagai kajian dengan pendekatan yang berbeda ataupun aplikasi pada penelitian yang berbeda. Untuk itu disarankan agar studi manajemen strategi dan kewirausahaan dengan model yang sama dapat dicoba pada populasi yang berbeda atau menggali variabel lainnya selain variabel yang telah diteliti.
2. Terdapat 5 variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dengan 16 Indikator pengukuran kinerja dan keunggulan besaing. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel dan indikator lain sehingga kajiannya lebih komprehensif, misalnya kinerja keuangan, kinerja ekspor.

**Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai keterbataan antara lain:

1. Pengambilan sampel kurang luas, hanya mencakup wilayah Kota Makassar, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang.
2. Variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja dan keunggulan bersaing usaha kecil ritel hanya terbatas pada orientasi pelayanan, kewirausahaan, pasar, lokasi usaha dan pilihan produk. Padahal untuk mengukur kinerja usaha ritel masih banyak variabel yang bisa diteliti dan dianalisis.
3. Obyek studi hanya terbatas pada usaha kecil ritel.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustini, Dwi Hayu dan Yudianti E.A. 2002. Keterkaitan Keberhasilan Usaha dengan Jiwa Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Pada Pedagang Eceran Berskala Kecil di Semarang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dian Ekonomi* 3(8): Des, 2002.

Anwar, Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Bernard J. Jaworsk, Ajay K, Kohli, 2009. Marketing Orientation: Antecedents and Consequents. *Jurnal of Marketing* (57).

Bharadwaj, S. G; Varadaraja, P. J; Fahy JJ. 2004. *Sustainable Competitive Adavantage in Service Industries: a Conceptual Model and Research Propositions*.

Boyd, Walker & Larrenche.2010. *Marketing Strategy: A Decision-Focused Approach.*4 th ed.McGraw-Hill/Irwin-Ries A.

Day and Wenslkey. 2002. Market Strategi andTheories of The Firm. *Journal of Management*.

David W. Cravensi; N. F. Piercy. 2012. *Strategic Marketing*. Mc. Graw-Hil Companies, Inc.

Dess, G. G and Lumpkin, G. T. 2005. The roel of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship. *Journal Academy of Management Executif* 19(1): 147-156.

Ferdinand, A. 2005. *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro.

Frishammar, J. and Horte, S. A. 2007. The Role of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation for New Product Development Performance in Manufacturing Firms. Technology *Analysis & Strategic Management* 22(3): 251-266.

G. T. Lumpkin and Gregory G. Dess. 1996." Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance". *Journal Akademy of Managemenet Review* 21(1):135-172.

Hamburg, C., W. D.Hoyer and Fassnacht.M. 2006. *Service Orientation of a Reteiler's*. University of Hamburg, P. E. McCulloch. Germany.

Hartini, Sri. 2012. Hubungan Orientasi Pasar, Strategi Bersaing, Kewirausahaan Korporasi dan Kineja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 17(1):39-53.

James B an Benhardt. 2006. Industry dynamics with stachastis demand. *Rand journal of economics*. Rand Corporation 39(1): 41-68.

John C. Never and Stanly F. S. 2007. *The effect of market orientation and business profitability.*

Kumalaningrum, M. P. 2012. Lingkungan Bisnis, Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Riset Manajemen and Bisnis* 7(1): 45-59.

Kohli, A. and Jaworski. B. 2005. Market Oriented: The Construct, Research Propositions and Managerial Implications. *Journal of Marketing* 541(18).

Kotler P. dan K. Keller. 2012. *Marketing Management*, 13th ed. Prentice Hall International Inc. New Jersey.

Kotler and Amstrong, G. 2009. *Principles of Marketing*. Englewood-Cliffs: NJ, Prentice-Hall.

Kuncoro, M. 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

Lamb, Hair dan Mc. Daniel. 2001. Pemasaran Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Malayu, Hasibuan.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ketujuh, Edisi Revisi, Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Narver, Jhon C; dam Slater, F Stanley.2000. The Positive Effect of A Market Orientation on Business Profitability; A Balance Replication. *Journal of Business Research*: 69-73

Pangeran, Perminas. 2012. Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan dan Kinerja Keuangan Pengembangan Produk baru Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 7(1):10-5.

Porter, M. E. 2006. *Competitive Adventage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: The Free Press.

Rahayu, P. S. 2009. Peningkatan Kinerja Melalui Orientasi Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen dan Strategi Bisnis (Studi pada Industri Kecil Menengah Bordir di Jawa Timur). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 11(1).

Rahab dan Sudjono. 2012. Pengembangan Kapabilitas Keinovasian IKM berbasis Pada Orientasi Kewirausahaan dan Pembelajaran Organisasional, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 1(1): 29-37.

Rivai, Sagala. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Rajawali Press. Jakarta.

Rozaniwati dan Tata Purwata. 2010. Membuka Usaha Eceran/Ritel, Jakarta: Erlangga

Samli, A. C. Kelly., J. P. Hunt, H. K.1998. Inproving The Retail Performance by Constrasting Management and Customer-Perceived-Store Images: *A Diagnostic tool for Corrective Action. Journal of Business Research.*

Simintiras, Antonis. 2011. *Becoming a Market Oriented Organization: Preparing for a New Era.* Carilec CEOS's Conference.

Smith, P. G .and Reinertsen, D. G. 2006. *Developing Products in Half the Time*. New York: John Wiley and Sons.

Steven N. Wiggins.2004. Contracted Responses to the Common Pool: Proraioning of Crude oil Production. *American Economic Review* 74(1).

Supranto, M. 2009. Strategi Menciptakan Keunggulan Besaing Produk Melalui Orientasi Pasar, Inovasi dan Orientasi Kewirausahaan dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pemasaran (studi empiris pada: Industri pakaian jadi skalla kecil dan menengah di kota Semarang). *Tesis*. Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Teece, D. and Pisano, G. 1994. The Dynamic Capabilities of Firms: an introduction. *Industrial and Corporate Change* 3:537-556.

**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411 - 0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN SEGMEN: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA EKUITAS

**Fadhil Muhammad**
*fadhil.muhammad91@gmail.com*
**Sylvia Veronica Siregar**
**Universitas Indonesia**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to analyze the level of operating segment disclosure for firms listed in Indonesia Stock Exchange (BEI), firm's characteristic that can influence their disclosure level, and the effect of segment disclosure on firm's cost of equity capital. This study analyzes firm's segment disclosure in year 2010 and 2011 from manufacturing firms listed in BEI. The results show that the average level of segment disclosure in sample firms in 2010 and 2011 is 65% from total mandatory disclosures based on PSAK 5 Operating Segments. This study also finds that there are several firm characteristics that have significant affect on operating segments disclosure, specifically this study finds that there are higher segment disclosures from larger firms, firms audited by Big-4 audit firm, firms that have more public shareholders, high leverage, and high liquidity. However, this study do not find evidence that segment disclosures can significantly influence cost of equity capital.*

*Key words: segment disclosure, PSAK 5, cost of equity capital.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), faktor-faktor dari karakteristik perusahaan yang mempengaruhi, dan dampak tingkat pelaporan segmen operasi terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian ini menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi pada tahun 2010 dan 2011 dari sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen perusahaan di BEI pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 65% dari total pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 5 mengenai Segmen Operasi. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan adanya beberapa faktor karakteristik perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi segmen, yaitu ditemukan bahwa pengungkapan informasi segmen yang lebih luas dari perusahaan yang lebih besar, diaudit oleh KAP Big-4, memiliki tingkat kepemilikan publik yang tinggi, serta mempunyai tingkat *leverage* dan likuiditas yang tinggi. Akan tetapi, penelitian ini belum dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari pengungkapan informasi segmen terhadap biaya modal ekuitas.

Kata kunci: pengungkapan segmen, PSAK 5, biaya modal ekuitas

## PENDAHULUAN

Diversifikasi usaha membuat bisnis perusahaan menjadi semakin kompleks, sehingga para analis membutuhkan informasi terkait dengan kinerja segmen perusahaan untuk dapat melakukan analisis yang lebih baik. Oleh karena informasi segmen merupakan informasi yang penting bagi investor dalam membuat suatu keputusan investasi, dan penyajian informasi segmen ini diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku umum. *International Accounting Standard Board* (IASB) telah mengeluarkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 8 tentang *Operating segments* menggantikan *International Accounting Standard* (IAS) 14 tentang *Segment Reporting*. Sedangkan di Indonesia juga

terdapat peraturan serupa yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2009), yang merupakan adopsi dari IFRS 8, menggantikan PSAK No. 5 (Revisi 2000).

Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kewajiban pengungkapan informasi segmen tersebut. Prather-Kinsey dan Meek (2004) menunjukkan bahwa masih banyak hal-hal yang diwajibkan untuk diungkap dalam laporan segmen operasi tetapi tidak diungkap oleh perusahaan. Alfaraih dan Alanezi (2011) yang meneliti tingkat pengungkapan informasi segmen oleh perusahaan yang terdaftar di *Kuwait Stock Exchange* (KSE), juga menunjukkan hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen hanya sebesar 56%, bervariasi dari 18% hingga 96% dari total item yang wajib untuk diungkap berdasarkan IAS 14 tentang *Segment Reporting*. Simpulan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang terdaftar di KSE yang tidak patuh terhadap IAS 14. Alfaraih dan Alanezi (2011) juga mengungkap bahwa riset serupa di negara-negara berkembang masih belum banyak dilakukan, sementara di negara berkembang kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi masih banyak dipertanyakan.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai pengungkapan informasi segmen baru dilakukan oleh Kristanti (2007). Penelitian tersebut merupakan penelitan deskriptif yang menganalisis 64 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menyajikan informasi segmen sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 1994) dan PSAK No. 5 (Revisi 2000), serta melihat sejauh mana perusahaan telah menyajikan informasi segmennya sebagai pengungkapan sukarela sebelum PSAK No. 5 (1994) diberlakukan. Oleh karena penelitian tersebut merupakan penelitian awal, sehingga penelitian tersebut masih memerlukan pengembangan dan pemikiran lebih lanjut.

Riset tentang pelaporan segmen di Indonesia selanjutnya dilakukan oleh Fitriany dan Aulia (2009). Penelitian mereka membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan informasi segmen perusahaan. Dalam simpulan penelitiannya diungkap bahwa $R^2$ yang diperoleh masih relatif kecil sehingga diduga masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan informasi segmen. Sementara itu, Alfaraih dan Alanezi (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan informasi segmen terhadap perusahaan yang terdaftar di KSE, dan penelitian tersebut memasukkan lebih banyak faktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mereplikasi Alfaraih dan Alanezi (2011) untuk mengembangkan penelitian Fitriany dan Aulia (2009).

Masih terkait dengan pengungkapan informasi segmen, diduga pengungkapan informasi segmen juga dapat mempengaruhi biaya modal ekuitas perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saini dan Herrmann (2012) ditemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari pengungkapan informasi segmen terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian tersebut menggunakan 87 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat.

Akan tetapi, sejauh telaah literatur yang dilakukan, belum banyak dilakukan penelitian serupa seperti yang dilakukan oleh Saini dan Herrmaan (2012), setidaknya di Indonesia penelitian seperti itu belum dilakukan. Hal ini menarik untuk diteliti, karena diduga dengan adanya pengungkapan informasi segmen perusahaan diharap mampu menurunkan adanya asimetri informasi sehingga dapat mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi, akan tetapi belum banyak penelitian empiris yang membuktikan hal tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat

pengungkapan informasi segmen perusahaan yang terdaftar di BEI, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampaknya terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terutama penelitian Alfaraih dan Alanezi (2011), dari segi objek penelitian menggunakan data dari perusahaan yang terdaftar di BEI, sementara penelitian Alfaraih dan Alanezi (2011) menggunakan data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KSE, sedangkan dari segi variabel yang diteliti, terdapat penambahan variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu likuiditas perusahaan, yang diduga juga mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi segmen. Oleh karena itu, secara keseluruhan, variabel dalam penelitian ini yang diduga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan informasi segmen perusahaan meliputi ukuran perusahaan, kualitas audit, umur perusahaan, kepemilikan publik, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Saini dan Herrmann (2012) adalah Saini dan Herrmann (2012) mengukur luas pengungkapan informasi segmen dengan menggunakan dua buah proksi, pertama menggunakan nilai indeks dari *disclosure checklist* yang dikembangkan sesuai dengan *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) 131 *Segment Reporting*, kedua dengan menggunakan nilai logaritma natural dari total kata yang digunakan perusahaan dalam mengungkapan informasi segmen di laporan keuangan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu proksi yaitu nilai indeks dari *disclosure checklist* yang dikembangkan sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000 & 2009), sedangkan untuk mengukur biaya modal ekuitas, Saini dan Herrmann (2012) menggunakan rata-rata aritmatik dari empat proksi yang berbeda dalam mengukur *implied cost of equital capital*. Sedangkan dalam penelitian ini, biaya modal ekuitas diukur menggunakan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM) dan *Industry-Adjusted Earning Price Ratio* (*E/P Ratio*).

## TINJAUAN TEORETIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu teori dasar yang menjelaskan bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen dalam sebuah praktik bisnis. Teori ini memiliki prinsip bahwa dalam sebuah perusahaan terdapat suatu hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen yang diatur dalam sebuah kontrak, dan perusahaan dalam hal ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk *nexus of contract*, karena dalam perusahaan terdapat sekumpulan kontrak yang memfasilitasi hubungan antara prinsipal, agen, pemasok, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan (Godfrey *et al*., 2010).

Benardi *et al.* (2009) juga mengungkap bahwa adanya hubungan keagenan mewajibkan agen memberi laporan secara periodik kepada prinsipal tentang usaha yang dijalankan, dan prinsipal akan menilai kinerja agen melalui laporan tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajemen (agen) kepada pemiliknya (prinsipal). Pengungkapan laporan keuangan juga ditujukan untuk menurunkan biaya keagenan (Berger dan Hann, 2007).

Beberapa literatur telah menjelaskan bahwa informasi segmen memiliki nilai guna bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Survei yang dilakukan oleh Brown (1997) mengungkapkan bahwa informasi segmen termasuk dalam tiga informasi perusahaan yang paling berguna bagi investor selain laporan laba rugi dan laporan arus kas. *Association for Investment Management and Research* (AIMR, 1993) juga berpendapat bahwa untuk melakukan analisis yang lebih baik, para analis membutuhkan informasi terkait dengan kinerja segmen perusahaan.

**PSAK No. 5: Segmen Operasi**

Di Indonesia terdapat standar akuntansi yang mengatur pelaporan segmen. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia telah mengeluarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009) tentang Segmen Operasi yang mengadopsi IFRS 8 karena adanya program konvergensi PSAK terhadap IFRS. Standar ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 menggantikan PSAK No. 5 (Revisi 2000). Adapun tujuan pengungkapan informasi segmen tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 1 PSAK No. 5 (Revisi 2000) adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik, menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik, dan menilai perusahaan secara keseluruhan dengan lebih memadai.

**Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan studi literatur, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas informasi yang diungkap perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung mengungkap informasi yang lebih banyak. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang besar akan menanggung biaya keagenan yang lebih besar pula, karena *monitoring costs* secara inheren akan menjadi lebih sulit dan mahal dalam sebuah organisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya keagenan, manajer (agen) perusahaan lebih termotivasi untuk mengungkap informasi (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu, biaya pengungkapan informasi cenderung menurun seiring dengan semakin besarnya suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang lebih besar akan cenderung mengungkap informasi dengan lebih luas (Lang dan Lundholm, 1993). Samaha *et al*. (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tata kelola perusahaan. Hal yang sama diduga juga berlaku untuk pengungkapan segmen operasi, sebagaimana Wan-Hussin *et al*. (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan segmen. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

$H_1$ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Selanjutnya, kualitas audit diduga memiliki peranan dalam mempengaruhi luas pengungkapan informasi oleh perusahaan. Wallace *et al*. (1994) mengungkap bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 mengungkap informasi yang lebih detail daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big-4. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

$H_2$ : Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 memiliki luas pengungkapan informasi segmen yang lebih tinggi daripada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big-4

Selain itu, umur perusahaan juga diduga memiliki pengaruh dalam luas pengungkapan informasi oleh perusahaan. Menurut Glaum dan Street (2003), perusahaan yang lebih muda usianya memiliki sistem akuntansi yang masih belum andal sehingga kualitas pelaporan akuntansi dan pengungkapannya masih kurang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

$H_3$ : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Lebih lanjut, berdasarkan teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), perusahaan yang konsentrasi kepemilikan publiknya tinggi memiliki potensi biaya keagenan yang besar, dan salah satu cara untuk menurunkan biaya keagenan tersebut ialah dengan mengungkap informasi publik. Alfaraih dan Alanezi (2011) dalam penelitiannya mengukur kepemilikan publik dengan total jumlah saham publik dibagi dengan total saham perusahaan yang beredar. Dalam penelitiannya kepemilikan publik diduga memiliki pengaruh positif

yang signifikan terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_4$ : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Singhvi dan Desai (1971) mengungkap bahwa sewaktu profitabilitas perusahaan sedang baik, maka manajemen memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengungkap informasi dengan lebih detail untuk memberi sinyal kepada pemegang saham bahwa mereka memiliki kinerja baik dan berharap agar mendapat kompensasi atas hal tersebut. Hal ini juga didukung penelitian empiris yang dilakukan Alfaraih dan Alanezi (2011) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara profitabilitas dan luas pengungkapan informasi segmen. Dari penjelasan tersebut, diajukan hipotesis kelima yaitu:

$H_5$ : Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Banyak pandangan yang berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih besar akan mengungkap informasi dengan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan kreditur (Alsaeed, 2006). Jensen and Meckling (1976) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki porsi utang dalam strukrur modalnya juga menanggung biaya keagenan (*monitoring costs*), maka dari itu perusahaan berusaha mengurangi biaya keagenan tersebut dengan cara mengungkap informasi dengan lebih baik untuk memuaskan kebutuhan krediturnya. Dari penjelasan tersebut, maka diajukan hipotesis keenam yaitu:

$H_6$ : Tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Selanjutnya, Wallace *et al*. (1994) mengatakan bahwa jika likuiditas dipandang sebagai suatu ukuran kinerja, maka perusahaan yang memiliki likuiditas yang rendah cenderung akan mengungkap informasi yang lebih banyak guna memberi sinyal kepada pemegang saham bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik. Beberapa peneliti lainnya juga menduga bahwa faktor likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi (Alsaeed, 2006; Benardi *et al*., 2009). Oleh karena itu, hipotesis ketujuh adalah:

$H_7$ : Tingkat likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Perusahaan yang lagi tumbuh sangat sensitif terhadap pengungkapan informasi yang detail, karena adanya kekhawatiran jika informasi tersebut akan membahayakan posisi kompetitif mereka di pasar (Chaven *et al*., 2006). Sejalan dengan hal itu, Prencipe (2004) juga mengungkap bahwa terdapat potensi adanya *competitive costs* yang lebih tinggi terhadap pengungkapan informasi segmen operasi pada perusahaan yang lagi tumbuh karena khawatir pesaing akan memanfaatkan informasi tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis kedelapan yaitu:

$H_8$ : Tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan informasi segmen perusahaan

Pengungkapan informasi segmen merupakan pengungkapan yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam PSAK No. 5 (Revisi 2000 dan 2009). Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang belum mengungkap semua item yang sifatnya wajib untuk diungkap dalam pelaporan segmen. *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat sejumlah laporan keuangan perusahaan di Indonesia

dalam jumlah yang signifikan yang tidak menyajikan informasi segmen sebagaimana yang diwajibkan oleh PSAK (ROSC, 2010).

Diduga bahwa jika perusahaan mengungkap informasi segmen sebagaimana yang diwajibkan oleh standar, maka akan dapat menurunkan biaya modal ekuitas perusahaan tersebut, mengacu pada argumen yang diungkapkan oleh Bailey, Karolyi, and Salva (2006) serta Lambert *et al.* (2007) yang mengatakan bahwa pengungkapan informasi berpengaruh negatif dengan biaya modal ekuitas karena pengungkapan informasi dapat menurunkan kondisi asimetri informasi yang dialami investor. Selain itu, Saini dan Herrmann (2012) juga menunjukkan hasil bahwa pengungkapan informasi segmen berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya modal ekuitas perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis kesembilan yaitu:

$H_9$ : Luas pengungkapan informasi segmen perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya modal ekuitas perusahaan

## METODE PENELITIAN

### Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan didasarkan pada kriteria yaitu perusahaan manufaktur menerbitkan laporan keuangan secara lengkap per 31 Desember pada tahun 2010 dan 2011, perusahaan yang memiliki nilai buku ekuitas positif, perusahaan mengungkap informasi segmen pada laporan keuangannya, satuan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan perusahaan dinyatakan dalam rupiah, memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 187 perusahaan manufaktur dalam 2 tahun (2010 dan 2011). Akan tetapi, untuk tujuan penelitian yang menganalisis dampak pengungkapan informasi segmen terhadap biaya modal ekuitas yang diukur dengan menggunakan CAPM, dari total 187 sampel perusahaan, 18 sampel perusahaan diantaranya tidak memiliki data *market beta*, sehingga dikeluarkan dari sampel. Ikhtisar pemilihan sampel dalam penelitian selanjutnya disajikan pada tabel 1.

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Tingkat Pengungkapan Informasi Segmen (SEGDISCL).

   *Disclosure checklist* informasi segmen digunakan untuk menghitung indeks pelaporan segmen, yang disusun berdasarkan daftar informasi segmen yang wajib untuk diungkap dalam laporan keuangan perusahaan dengan mengacu pada PSAK No. 5 (Revisi 2000) dan PSAK No. 5 (Revisi 2009).

**Tabel 1**
**Ikhtisar Pemilihan Sampel**

| Sampel | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 | 266 |
| Perusahaan dengan data laporan keuangan 2010 dan 2011 yang tidak dapat diakses dan tidak lengkap | (34) |
| Perusahaan dengan data laporan keuangan 2010 dan 2011 yang tidak menyajikan informasi segmen | (8) |
| Laporan keuangan tidak dinyatakan dalam rupiah | (21) |
| Perusahaan dengan nilai buku ekuitas negatif | (16) |
| **Sampel Akhir** | **187** |

Untuk tiap-tiap item yang ada pada *disclosure checklist* tersebut akan diberi nilai "1" jika item tersebut secara jelas diungkap pada laporan keuangan; diberi nilai "0" jika secara jelas perusahaan tersebut tidak mengungkap; dan diberikan "N/A" jika pengungkapan informasi tersebut tidak dapat diterapkan. Perhitungan indeks selanjutnya diperoleh dengan membagi skor yang didapat perusahaan dengan total skor yang ada pada *disclosure checklist* informasi segmen tanpa dilakukan pembobotan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Alfaraih dan Alanezi (2011), Alsaeed (2006), Benardi *et al*. (2009), dan Glaum dan Street (2003).

2. Biaya Modal Ekuitas (COE)

   Biaya modal ekuitas dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan dua buah proksi. Proksi pertama menggunakan *Capital Assets Pricing Model* (CAPM), sedangkan proksi kedua menggunakan *Industry-Adjusted E/P Ratio*. CAPM menggunakan model seperti berikut (Komalasari dan Baridwan, 2001; Murni, 2004; Mardiyah, 2002): CAPM = $R_{ft} + \beta_i (R_{Mt} - R_{ft})$

   $R_{ft}$: *Return* bebas risiko yang diproksi dengan rerata tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tenor 9 bulan, $\beta_i$: Risiko tidak sistematis untuk setiap saham perusahaan i. Variabel beta ini didapat dari data olahan *Bloomberg Terminal*, ($R_{Mt} - R_{ft}$): *Market risk premium* pasar modal Indonesia, yang didapat dari data olahan Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/).

   Proksi kedua yang digunakan untuk mengukur biaya modal ekuitas perusahaan dalam penelitian ini ialah *industry-adjusted E/P ratio* saham perusahaan. *E/P ratio* didapat dengan membagi nilai 1 dengan data *P/E ratio* perusahaan. Data *P/E ratio* tersebut didapat dari data olahan *Reuters Knowledge*. Setelah nilai *E/P ratio* masing-masing saham perusahaan didapat, selanjutnya *E/P ratio* tiap perusahaan dikurangkan dengan nilai median *E/P* industri tempat saham beroperasi, hasil pengurangan tersebut selanjutnya merupakan nilai *Industry-Adjusted E/P ratio* saham perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan (SIZE): diukur dengan menggunakan nilai *logaritma natural* total aset, mengacu pada Benardi *et al*. (2009), Bestari dan Siregar (2012), dan Alfaraih & Alanezi (2011).
4. Kualitas Audit (AUD): mengacu pada Alfraih dan Alanezi (2011), Benardi et al. (2009), serta Alsaeed (2006). Variabel kualitas audit dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy* yang bernilai "1" jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP Big-4 dan bernilai "0" sebaliknya.
5. Umur Perusahaan (AGE): mengacu pada Alfaraih dan Alanezi (2011), umur perusahaan ditentukan dari *logaritma natural* jumlah tahun sejak perusahaan berdiri secara legal hingga tahun penerbitan laporan keuangan yang dijadikan sampel penelitian.
6. Kepemilikan Publik (DIFF): Variabel kepemilikan publik ini akan diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham publik atas total saham yang *outstanding* di perusahaan (Alfaraih dan Alanezi, 2011).
7. Profitabilitas (PROFIT): diukur dengan menggunakan *Return on Equity* (ROE) yang merupakan rasio dari laba bersih perusahaan dibagi dengan total ekuitas perusahaan pada tahun yang sama.
8. *Leverage* (LEV): *Debt-Equity Ratio* digunakan untuk mengukur variabel *leverage*. Rasio ini mengukur konsentrasi utang dalam struktur modal perusahaan.
9. Likuiditas (LIQ): salah satu ukuran yang sering digunakan dalam penelitian empiris untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan ialah *Current Ratio* (Alsaeed, 2006; Wallace *et al.*, 1994; Benardi *et al.*, 2009; Camfferman

dan Cooke, 2002). Likuiditas perusahaan dihitung dengan membagi nilai total aset lancar dengan total liabilitas lancar perusahaan pada tahun yang sama.

10. Tingkat Pertumbuhan (GROWTH): mengacu pada penelitian Alfaraih dan Alanezi (2011), tingkat pertumbuhan perusahaan diukur dengan menggunakan proksi pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun lalu. Perusahaan yang sedang tumbuh diindikasi dengan adanya pertumbuhan penjualan yang signifikan tiap tahunnya.
11. *Market to Book Value Ratio* (MTBV): Mengacu pada Dhaliwal *et al*. (2011), nilai *Market to Book Value Ratio* saham perusahaan didapat dengan membagi nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku atau nilai par saham perusahaan tersebut.
12. *Return on Assets* (ROA): rasio antara laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan tersebut (Ross *et al.*, 2010). Rasio ini menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka dapat dikatakan perusahaan semakin *profitable*.
13. Jenis Industri (IND): terdapat 3 jenis industri atas perusahaan-perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel, yaitu industri dasar dan bahan kimia, industri lain-lain, dan industri barang konsumsi. Untuk jenis industri barang konsumsi akan dijadikan dasar dari penentuan nilai variabel *dummy* jenis industri, sehingga terdapat dua variabel *dummy* jenis industri.

**Model Penelitian**

Model pertama digunakan untuk menguji hipotesis ke-1 hingga hipotesis ke-8, dengan mengacu pada Alfaraih dan Alanezi (2011) dengan penambahan satu variabel independen yaitu likuiditas perusahaan, karena berdasarkan studi literatur variabel tersebut juga diduga sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi segmen.

$$SEGDISCL_i = \beta_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 AUD_i + \beta_3 AGE_i + \beta_4 DIFF_i + \beta_5 PROFIT_i + \beta_6 LEV_i + \beta_7 LIQ_i + \beta_8 GROWTH_i + \beta_{9\text{-}10} IND_{(1\text{-}2)i} + \varepsilon_i \quad \ldots\ldots (1)$$

Ekspektasi tanda koefisien adalah $\beta_1 > 0$ , $\beta_2 > 0$, $\beta_3 > 0$, $\beta_4 > 0$, $\beta_5 > 0$, $\beta_6 > 0$, $\beta_7 > 0$, $\beta_8 < 0$

Selain itu, model kedua digunakan untuk menguji hipotesis ke-9 mengacu ke Francis *et al.* (2005). Dengan variabel ukuran perusahaan, *market to book* value dan *return on assets* (ROA) akan dijadikan variabel kontrol, karena diduga juga turut mempengaruhi biaya modal ekuitas perusahaan (Francis et al., 2005; Fama dan French, 1992).

$$COE_i = \alpha_0 + \alpha_1 SEGDISCL_i + \alpha_2 ROA_i + \alpha_3 MTBV_i + \alpha_4 SIZE_i + \varepsilon_i \quad \ldots\ldots (2)$$

Ekspektasi tanda koefisien adalah $\alpha_1 < 0$ , $\alpha_2 < 0$, $\alpha_3 < 0$, $\alpha_4 < 0$

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

**Statistik Deskriptif**

Tabel 2 menggambarkan statistik deskriptif pada penelitian ini. Dari tabel 2 terlihat bahwa variabel biaya modal ekuitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan proksi CAPM menunjukkan rata-rata sebesar 10.6%. Sedangkan nilai rata-rata variabel biaya modal ekuitas yang diukur dengan proksi *Industry-Adjusted E/P Ratio* bernilai negatif sebesar -0.014, nilai variabel ini sangat dimungkinkan bernilai negatif, karena nilai E/P rasio tiap perusahaan disesuaikan dengan nilai E/P rasio rata-rata industri perusahaan tersebut.

Selanjutnya, nilai rata-rata variabel tingkat pengungkapan informasi segmen sebesar 0.651. Hal ini menandakan masih banyak pengungkapan wajib yang belum diungkap perusahaan. Rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen perusahaan pada tahun 2010 ialah sebesar 65%, begitu pula pada tahun 2011. Berdasarkan analisis atas pengungkapan segmen yang dilakukan perusahaan, hal-hal yang sering tidak diungkapkan oleh perusahaan dalam informasi segmen antara lain ialah besaran

**Tabel 2**
**Statistik Deskriptif *Continuous Variables* dan *Dummy Variables***

| **Panel A :** *Continuous Variables* | **Rata-Rata** | **Median** | **Standar Deviasi** | **Min** | **Max** |
|---|---|---|---|---|---|
| EP | -0.014 | -0.008 | 0.148 | -1.114 | 0.361 |
| CAPM | 0.101 | 0.101 | 0.021 | -0.025 | 0.186 |
| SEGDISCL | 0.651 | 0.714 | 0.191 | 0.150 | 0.960 |
| SIZE | 15,419 | 13,793 | 16,548 | 11,361 | 18,849 |
| LnSIZE | 27.864 | 27.597 | 1.450 | 25.177 | 32.665 |
| AGE | 33 | 33 | 12 | 1 | 80 |
| LnAGE | 3.403 | 3.497 | 0.472 | 0.000 | 4.382 |
| DIFF | 0.249 | 0.210 | 0.164 | 0.000 | 0.703 |
| PROFIT | 0.063 | 0.112 | 0.525 | -5.864 | 1.131 |
| LEV | 1.788 | 0.833 | 3.037 | 0.103 | 16.144 |
| LIQ | 2.184 | 1.552 | 1.678 | 0.000 | 7.927 |
| GROWTH | 0.169 | 0.136 | 0.232 | -0.668 | 1.182 |
| ROA | 0.067 | 0.058 | 0.084 | -0.226 | 0.358 |
| MTBV | 3.074 | 1.420 | 4.811 | 0.100 | 27.268 |
| **Panel B :** *Dummy Variables* | **Frekuensi** | **Persentase** | | | |
| AUD | | | | | |
| Non Big-4 | 110 | 59% | | | |
| Big-4 | 77 | 41% | | | |
| Total | 187 | 100% | | | |
| Jenis Industri | | | | | |
| Industri Dasar & Kimia | 81 | 43% | | | |
| Industri Lain-Lain | 52 | 28% | | | |
| Industri Barang Konsumsi | 54 | 29% | | | |
| Total | 187 | 100% | | | |

EP adalah nilai dari *industry-adjusted E/P ratio*; CAPM adalah biaya modal ekuitas yang diukur dengan menggunakan metode Capital *Assets Pricing Model*; SEGDISCL adalah nilai indeks pelaporan segmen perusahaan sampel; SIZE adalah total aset perusahaan yang dinyatakan dalam jutaan rupiah; LnSIZE adalah nilai logaritma narutal dari total aset perusahaan sampel; AUD adalah kualitas audit yang ditentukan dari ukuran KAP; AGE adalah umur perusahaan yang dihitung dari sejak perusahaan berdiri hingga tahun laporan keuangan diterbitkan; LnAGE adalah nilai logaritma natural dari umur perusahaan; DIFF adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh publik; PROFIT adalah tingkat probabilitas perusahaan yang diukur dengan rasio *return on equity* (ROE); LEV adalah tingkat *leverage* perusahaan yang diukur dari rasio total utang terhadap total ekuitas; LIQ adalah tingkat likuiditas perusahaan yang diukur dari nilai rasio lancar; GROWTH adalah tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan; ROA adalah nilai rasio *return on assets*; MTBV adalah nilai dari rasio *market to book value* saham perusahaan.

pendapatan yang didapat dari transaksi antar segmen, dasar harga transaksi antar segmen tersebut, aset dan liabilitas segmen dilaporkan, pengungkapan pelaporan segmen bentuk sekunder, jenis dan karakteristik produk/jasa masing-masing segmen dilaporkan, besaran transaksi dengan pelanggan utama.

Untuk variabel ukuran perusahaan, statistik deskriptif menunjukkan secara umum perusahaaan yang terdapat dalam sampel penelitian tergolong dalam perusahaan berukuran besar. Terkait dengan variabel kualitas Audit (AUD), dapat dilihat bahwa lebih banyak perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big-4 yang terdapat dalam sampel penelitian.

Untuk variabel umur perusahaan, rata-rata umur perusahaan yang ada dalam penelitian berusia 33 tahun, dengan kata lain perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia telah berdiri cukup lama. Terkait variabel kepemilikan publik, rerata nilai kepemilikan publik ialah sebesar 0.249. Diduga bahwa kebanyakan perusahaan yang ada dalam sampel penelitian merupakan perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau merupakan perusahaan yang tergolong ke dalam *family firm*, sehingga konsentrasi kepemilikan saham oleh masyarakat belum terlalu tinggi, sedangkan standar deviasi untuk variabel ini nilainya relatif kecil.

Sehubungan dengan variabel profitabilitas perusahaan didapat bahwa rerata nilai variabel ini sebesar 0.063, menandakan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian secara rata-rata masih relatif rendah. Selanjutnya, untuk variabel tingkat *leverage* perusahaan didapat bahwa secara rata-rata tingkat *leverage* perusahaan dalam sampel penelitian sebesar 1.788. Hal ini menandakan bahwa pendanaan perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian masih bergantung pada utang. Untuk variabel likuiditas perusahaan, dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan dalam sampel penelitian secara rata-rata cukup baik yang ditandai dengan rata-rata dan median rasio likuiditas yang di atas 1.

Untuk variabel kontrol *Return on Aset* (ROA), rata-rata tingkat ROA perusahaan dalam sampel penelitian bernilai 0.067. Sedangkan untuk variabel kontrol lainnya yaitu nilai *market to book value*, didapat bahwa nilai rerata variabel ini sebesar 3.074 yang artinya bahwa harga saham perusahaan dalam sampel penelitian secara rata-rata masih di atas nilai bukunya. Variabel kontrol selanjutnya ialah jenis industri, dari 187 sampel perusahaan, secara mayoritas terdiri atas perusahaan-perusahaan dari jenis industri dasar dan bahan kimia dengan total sampel sebesar 81. Selanjutnya 52 sampel perusahaan berasal dari jenis industri lain-lain dan sisanya sebanyak 54 sampel berasal dari jenis industri barang konsumsi.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini dilakukan *treatment winsorizing* untuk *outliers*. Dari Uji *White (White's General Heteroscedasticity*) pada model penelitian, ditemukan adanya permasalahan heteroskedastisitas pada model 1, akan tetapi telah dilakukan *treatment White Heteroscedasticity (no cross term*) pada program *Eviews 6* agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Terkait dengan uji multikolinearitas, tidak ditemukan adanya permasalahan multikolinearitas pada variabel-variabel independen yang diteliti.

Dari hasil pengujian tabel 2 didapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen, konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfaraih dan Alanezi (2011). Hal ini menandakan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka pengungkapan informasi segmennya semakin luas. Karena perusahaan yang besar menanggung biaya keagenan yang lebih besar, maka perusahaan akan mengungkap informasi dengan lebih luas (Jensen dan Meckling, 1976).

Selanjutnya, kualitas audit ditemukan berpengaruh positif terhadap luas peng-

ungkapan informasi segmen, artinya perusahaan yang diaudit KAP big-4 mempunyai luas pengungkapan informasi segmen yang lebih tinggi dari perusahaan yang diaudit KAP non big-4, karena KAP big-4 tidak tergantung pada sedikit klien sehingga mampu membuat KAP tersebut meminta kliennya untuk mengungkap informasi dengan lebih luas (Wallace dan Naser, 1995). Temuan ini juga konsisten dengan temuan penelitian Alfaraih dan Alanezi (2011) serta Jalila dan Devi (2012) yang juga menemukan pengaruh tersebut.

Terkait dengan variabel umur perusahaan, ditemukan bahwa umur perusahaan belum mampu mempengaruhi luas pengungkapan informasi segmen perusaha an berdasarkan data perusahaan yang terdaftar di BEI. Glaum dan Street (2003) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih muda usianya memiliki sistem akuntansi yang masih belum andal sehingga kualitas pelaporan akuntansi dan pengungkapannya masih kurang. Akan tetapi, untuk kasus di Indonesia, boleh jadi sebagian besar perusahaan yang berusia muda merupakan anak perusahaan dari perusahaan lain yang telah lama berdiri, sehingga sistem informasi akuntansi perusahaan tersebut mengikuti sistem akuntansi informasi perusahaan induk yang telah lama berkembang.

Selanjutnya, untuk variabel kepemilikan publik ditemukan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen, hal ini karena semakin besarnya porsi kepemilikan publik atas saham perusahaan, maka perusahaan akan menanggung potensi biaya keagenan yang lebih tinggi, oleh karena itu perusahaan akan mengungkap informasi dengan lebih banyak agar dapat menurunkan potensi biaya keagenan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Hasil regresi model 1 disajikan dalam tabel 3.

Profitabilitas berdasarkan hasil pengujian ditemukan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi segmen. Hal ini konsisten dengan temuan Wallace *et al.* (1994), Alsaeed (2006), dan Benardi *et al*. (2009). Hal tersebut kemungkinan karena adanya potensi *competitive costs* atau potensi *political cost* jika perusahaan mengungkap informasi segmen terlalu luas, sehingga perusahaan enggan untuk mengungkap, walaupun tingkat profitabilitas segmen tersebut cukup baik.

Untuk variabel *leverage*, ditemukan adanya pengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfaraih dan Alanezi (2011). Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat beberapa penelitian seperti Alsaeed (2006) dan Zarzeski (1996) yang mengungkap bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka perusahaan akan mengungkap informasi yang lebih banyak.

Selanjutnya, dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka perusahaan cenderung mengungkap informasi dengan lebih luas (Cooke, 1989), termasuk di dalamnya informasi segmen, karena perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi cenderung lebih termotivasi untuk mengungkap informasi perusahaan, untuk menunjukkan bahwa perusahaan tengah dalam kondisi yang kredibel/mampu dan manajemen memiliki pencapaian kinerja yang efektif.

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi segmen, hal ini konsisten dengan Alfaraih dan Alanezi (2011). Hal ini kemungkinan disebabkan karena rata-rata perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia telah memasuki masa *'mature'* (*well established*) dan diestimasi rata-rata pertumbuhan penjualannya hanya sebesar

**Tabel 3**
**Hasil Regresi Model 1**

$SEGDISCL_i = \beta_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 AUD_i + \beta_3 AGE_i + \beta_4 DIFF_i + \beta_5 PROFIT_i + \beta_6 LEV_i + \beta_7 LIQ_i + \beta_8 GROWTH_i + \beta_{9\text{-}10} IND_{(1\text{-}2)i} + \varepsilon_i$

| Dependen Variabel : SEGDISCL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Independen Variabel** | **Ekspektasi Tanda** | **Sampel Penuh** | | **Eliminasi *Single Segment*** | |
| | | **Koefisien** | **Signifikansi** | **Koefisien** | **Signifikansi** |
| C | ? | -0.87770 | 0.00110 | -0.86523 | 0.00040 |
| SIZE | + | 0.05389 | 0.00000** | 0.05119 | 0.00000** |
| AUD | + | 0.03951 | 0.09545* | 0.03112 | 0.10110 |
| AGE | + | -0.01570 | 0.23595 | 0.00510 | 0.38685 |
| DIFF | + | 0.13538 | 0.03730** | 0.09156 | 0.09915* |
| PROFIT | + | 0.00939 | 0.31400 | 0.00290 | 0.41605 |
| LEV | + | 0.00720 | 0.05460* | 0.00841 | 0.00375** |
| LIQ | + | 0.01691 | 0.02445** | 0.01980 | 0.01400** |
| GROWTH | - | -0.02510 | 0.33785 | -0.01127 | 0.41635 |
| IND1 | ? | 0.00318 | 0.91060 | 0.02513 | 0.35890 |
| IND2 | ? | -0.05970 | 0.08580* | -0.03008 | 0.34210 |
| R-Squared | | 0.27864 | | 0.30321 | |
| Adj R-Squared | | 0.23765 | | 0.26020 | |
| F-statistic | | 6.79823 | | 7.04949 | |
| Prob(F-statistic) | | 0.00000** | | 0.00000** | |
| N (Sampel) | | 187 | | 173 | |

** Signifikansi pada level 5%
* Signifikansi pada level 10%
SEGDISCL adalah tingkat pengungkapan informasi segmen, SIZE adalah ukuran perusahaan, AUD adalah kualitas audit, AGE adalah umur perusahaan, DIFF adalah kepemilikan publik, PROFIT adalah ukuran profitabilitas perusahaan, LEV adalah tingkat *leverage* perusahaan, LIQ adalah tingkat likuiditas perusahaan, GROWTH adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, dan IND adalah variabel kontrol jenis industri.

8,79% selama lima tahun[1], sedangkan perusahaan yang lagi tumbuh diduga enggan untuk mengungkap informasi segmen karena khawatir munculnya potensi *competitive costs* yang besar (Prencipe, 2004) dan perusahaan yang lagi 'tumbuh' memiliki kriteria yaitu rata-rata pertumbuhan penjualannya selama 5 tahun sebesar 10-50% (Gup dan Agrrawal dalam Gumanti dan Puspitasari, 2008).

Untuk hasil regresi model 2 dengan biaya modal ekuitas perusahaan diukur dengan menggunakan CAPM, dapat dilihat pada tabel 4. Sedangkan untuk hasil regresi model 2, dengan biaya modal ekuitas perusahaan diukur dengan menggunakan nilai *Industry-Adusted E/P Ratio*, dapat dilihat pada tabel 5. Terkait dengan pengujian hipotesis ke-9, berdasarkan tabel 4 didapat bahwa pengungkapan informasi segmen yang diukur dengan menggunakan CAPM belum dapat mempengaruhi biaya modal ekuitas perusahaan secara signifikan, dan tidak ditemukan hasil yang berbeda ketika dilakukan uji sensitivitas dengan mengeluarkan sampel perusahaan dengan beta negatif.

[1] Dari analisis statistik deskriptif didapat bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan per tahun atas perusahaan-perusahaan yang ada pada sampel penelitian adalah sebesar 1,67% per tahun. Estimasi rata-rata pertumbuhan penjualan selama 5 tahun dilakukan dengan menggunakan perhitungan deret geometri yaitu $(1+1{,}67\%)^5 = 8.79\%$.

**Tabel 4**
**Hasil Regresi Model 2 – COE Diukur Dengan CAPM**

$$COE_i = \alpha_0 + \alpha_1 SEGDISCL_i + \alpha_2 ROA_i + \alpha_3 MTBV_i + \alpha_4 SIZE_i + \varepsilon_i$$

| | | Dependen Variabel : COE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Independen Variabel** | **Ekspektasi Tanda** | **Sampel Penuh** | | **Eliminasi Beta Negatif** | |
| | | **Koefisien** | **Signifikansi** | **Koefisien** | **Signifikansi** |
| C | ? | 0.0191 | 0.5712 | 0.0161 | 0.53970 |
| SEGDISCL | - | 0.0080 | 0.1970 | 0.0029 | 0.34925 |
| ROA | - | 0.0156 | 0.2161 | 0.0211 | 0.0880* |
| MTBV | - | -0.0005 | 0.0643* | -0.0005 | 0.0205** |
| SIZE | - | 0.0028 | 0.0181** | 0.0031 | 0.0015** |
| R-Squared | | 0.06471 | | 0.10840 | |
| Adj R-Squared | | 0.04190 | | 0.08569 | |
| F-statistic | | 2.83688 | | 4.77216 | |
| Prob(F-statistic) | | 0.02613** | | 0.00116** | |
| N (Sampel) | | 169 | | 162 | |

** Signifikansi pada level 5%
* Signifikansi pada level 10%

**COE** adalah biaya modal ekuitas yang diukur dengan menggunakan proksi *Capital Assets Pricing Model* **CAPM**, **SEGDISCL** adalah tingkat pengungkapan informasi segmen, **SIZE** adalah ukuran perusahaan, **ROA** adalah *Return on Asset* perusahaan, **MTBV** adalah *Martket to Book Value* perusahaan.

Pengujian hipotesis ke-9 dengan menggunakan *Industry-Adjusted E/P Ratio* dalam mengukur biaya modal ekuitas juga menunjukkan hasil yang sama, dapat dilihat pada tabel 5. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Saini dan Herrmann (2012).

Untuk kasus di Indonesia, kemungkinan hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mengungkap informasi segmen dengan baik, terbukti dari statistik deskriptif rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen sebesar 65% yang menandakan masih banyak hal-hal yang wajib untuk diungkap tapi tidak diungkap oleh perusahaan dalam pelaporan segmen, sehingga belum dapat memberi nilai guna bagi investor dan menurunkan risiko investasi dan asimetri informasi dengan signifikan. Selain itu, dari statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa porsi kepemilikan publik pada saham perusahaan yang beredar sangat kecil, hal ini kemungkinan disebabkan karena struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia lebih banyak yang dimiliki oleh keluarga (Siregar dan Utama, 2008). Pengungkapan informasi segmen pada laporan keuangan belum mampu mempengaruhi tingkat asimetri informasi investor yang sifat kepemilikan sahamnya berupa kepemilikan keluarga, karena investor tipe tersebut boleh jadi memiliki akses informasi privat yang menyajikan informasi segmen perusahaan dengan lebih komprehensif daripada informasi segmen yang disajikan pada laporan keuangan.

Perusahaan akan merasa bahwa biaya untuk menyajikan informasi segmen yang lebih komprehensif pada laporan keuangan lebih besar daripada manfaat yang didapat perusahaan dari adanya penurunan biaya modal ekuitas yang dikenakan oleh investor publik, karena porsi kepemilikan investor

**Tabel 5**
**Hasil Regresi Model 2 - COE Diukur Dengan EP**

$$COE_i = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot SEGDISCL_i + \alpha_2 \cdot ROA_i + \alpha_3 \cdot MTBV_i + \alpha_4 \cdot SIZE_i + \varepsilon_i$$

| Dependen Variabel : COE | | | |
|---|---|---|---|
| Independen Variabel | Ekspektasi Tanda | Koefisien | Signifikansi |
| C | ? | 0.3849 | 0.0737 |
| SEGDISCL | - | -0.0180 | 0.3835 |
| ROA | - | 0.6349 | 0.0000** |
| MTBV | - | -0.0056 | 0.0067** |
| SIZE | - | -0.0148 | 0.0372** |
| R-Squared | | 0.1317 | |
| Adj R-Squared | | 0.1126 | |
| F-statistic | | 6.8989 | |
| Prob(F-statistic) | | 0.0000** | |
| N (Sampel) | | 187 | |

** Signifikansi pada level 5%
* Signifikansi pada level 10%

COE adalah biaya modal ekuitas yang diukur dengan menggunakan proksi *Industry-Adjusted E/P Ratio* EP, SEGDISCL adalah tingkat pengungkapan informasi segmen, ROA adalah *Return on Asset* perusahaan, MTBV adalah *Martket to Book Value* perusahaan, dan SIZE adalah ukuran perusahaan.

publik relatif kecil. Oleh karena itu perusahaan belum memiliki motivasi yang kuat untuk menyajikan informasi segmen pada laporan keuangan secara lebih luas, sehingga pengungkapan informasi segmen yang sekarang belum mampu mempengaruhi biaya modal ekuitas perusahaan.

**Hasil Uji Sensitivitas**

Oleh karena pada pengungkapan informasi segmen terdapat perusahaan-perusahaan *single-segment*, yang mana biasanya perusahaan *single-segment* tersebut mengungkap informasi tidak lebih rinci sebagaimana yang dilakukan perusahaan multi-*segment*, maka pada model pertama dilakukan uji sensitivitas untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil simpulan pengujian jika perusahaan *single-segment* dikeluarkan dari sampel.

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa pengujian utama model 1 dengan menggunakan sampel penuh, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada model 1 secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen (luas pengungkapan informasi segmen) secara signifikan pada alpha 5%, yang ditandai dengan nilai probabilitas F-Stat 0.0000. Selanjutnya, dilakukan uji sensitivitas model 1 dengan dikeluarkannya sampel perusahaan *single segment*, dan hasilnya menunjukkan konsistensi dengan hasil pengujian utama tersebut.

Selain itu, dari tabel 6 juga dapat dilihat bahwa pengujian utama model 1 dengan menggunakan sampel penuh menghasilkan nilai *adjusted* $R^2$ model sebesar 0.23, dan ketika perusahaan *single segment* dikeluarkan dari sampel penelitian, nilai tersebut meningkat menjadi 0.26. Simpulan yang dapat diambil adalah dengan dilakukannya eliminasi perusahaan *single segment* pada sampel penelitian, hasil regresi model 1 menjadi lebih baik.

Terkait variabel-variabel independen dalam model 1, pengujian utama dengan menggunakan sampel penuh ditemukan

**Tabel 6**
**Hasil Uji Sensitivitas Regresi Model 1**

$$SEGDISCL_i = \beta_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 AUD_i + \beta_3 AGE_i + \beta_4 DIFF_i + \beta_5 PROFIT_i + \beta_6 LEV_i + \beta_7 LIQ_i + \beta_8 GROWTH_i + \beta_{9\text{-}10} IND_{(1\text{-}2)i} + \varepsilon_i$$

Dependen Variabel : SEGDISCL

| Independen Variabel | Ekspektasi Tanda | Sampel Penuh | | Eliminasi *Single Segment* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Signifikansi | Koefisien | Signifikansi |
| C | ? | -0.87770 | 0.00110 | -0.86523 | 0.00040 |
| SIZE | + | 0.05389 | 0.00000** | 0.05119 | 0.00000** |
| AUD | + | 0.03951 | 0.09545* | 0.03112 | 0.10110 |
| AGE | + | -0.01570 | 0.23595 | 0.00510 | 0.38685 |
| DIFF | + | 0.13538 | 0.03730** | 0.09156 | 0.09915* |
| PROFIT | + | 0.00939 | 0.31400 | 0.00290 | 0.41605 |
| LEV | + | 0.00720 | 0.05460* | 0.00841 | 0.00375** |
| LIQ | + | 0.01691 | 0.02445** | 0.01980 | 0.01400** |
| GROWTH | - | -0.02510 | 0.33785 | -0.01127 | 0.41635 |
| IND1 | ? | 0.00318 | 0.91060 | 0.02513 | 0.35890 |
| IND2 | ? | -0.05970 | 0.00858* | -0.03008 | 0.34210 |
| R-Squared | | 0.27864 | | 0.30321 | |
| Adj R-Squared | | 0.23765 | | 0.26020 | |
| F-statistic | | 6.79823 | | 7.04949 | |
| Prob(F-statistic) | | 0.00000** | | 0.00000** | |
| N (Sampel) | | 187 | | 173 | |

** Signifikansi pada level 5%
* Signifikansi pada level 10%

SEGDISCL adalah tingkat pengungkapan informasi segmen, SIZE adalah ukuran perusahaan, AUD adalah kualitas audit, AGE adalah umur perusahaan, DIFF adalah kepemilikan publik, PROFIT adalah ukuran profitabilitas perusahaan, LEV adalah tingkat *leverage* perusahaan, LIQ adalah tingkat likuiditas perusahaan, GROWTH adalah tingkat pertumbuhan perusahaan, dan IND adalah variabel kontrol jenis industri.

bahwa ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen model 1 (luas pengungkapan informasi segmen) pada alpha 5%, dan ketika dilakukan uji sensitivitas dengan mengeluarkan sampel perusahaan *single segment*, ditemukan kedua variabel tersebut tetap konsisten berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen model 1 pada alpha 5%.

Selanjutnya untuk variabel kualitas audit, kepemilikan publik, dan tingkat *leverage*, terdapat perubahan tingkat signifikansi pada ketiga variabel tersebut ketika regresi model 1 dilakukan dengan mengeluarkan sampel perusahaan *single segment*, khususnya terkait dengan variabel kualitas audit yang nilai probabilitas signifikannya menurun ke batas kritis 0.10. Akan tetapi, secara kualitatif dapat dikatakan ketiga variabel tersebut konsisten berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi segmen.

Sedangkan untuk variabel umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan, berdasarkan uji signifikansi, variabel-variabel tersebut konsisten tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen model 1, baik untuk regresi yang menggunakan sampel penuh maupun dilakukan eliminasi sampel *single segment*. Keseluruhan hasil pengujian utama dengan menggunakan sampel penuh dan perbandingannya dengan uji sensitivitas

dengan dikeluarkan sampel perusahaan *single segment*, dapat dilihat pada tabel 6.

Pengujian sensitivitas berikutnya dapat dilihat di tabel 7, yaitu regresi model dilakukan dengan menggunakan sampel penuh untuk pengujian utama model 2 dengan variabel dependen COE diukur dengan CAPM. Variabel-variabel independen pada model tersebut secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan pada alpha 5%, ditandai dengan nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0.02. Jika sampel perusahaan yang memiliki nilai beta negatif dikeluarkan, nilai probabilitas F-Stat model tersebut meningkat menjadi 0.00116. Berdasarkan tabel 7 juga didapat bahwa nilai *adjusted* $R^2$ model 2 sebesar 0.04 ketika regresi menggunakan sampel penuh, dan *adjusted* $R^2$ tersebut meningkat menjadi 0.085 jika mengeluarkan sampel dengan beta negatif. Simpulan yang dapat diambil adalah hasil regresi model 2 untuk variabel dependen COE yang diukur menggunakan CAPM menjadi lebih baik ketika perusahaan dengan nilai beta negatif dikeluarkan dari sampel penelitian.

Berdasarkan hasil uji sensitivitas terkait dengan variabel independen yang diuji pada model 2, ditemukan bahwa ketika regresi model menggunakan sampel penuh maupun dilakukan eliminasi perusahaan yang memiliki beta negatif pada sampel, luas pengungkapan informasi segmen konsisten belum dapat mempengaruhi biaya modal ekuitas perusahaan secara signifikan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil analisis didapat bahwa tingkat pengungkapan informasi segmen perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sudah cukup baik, dengan rata-rata tingkat pengungkapan informasi sebesar 65%.

**Tabel 7**
**Hasil Uji Sensitivitas Regresi Model 2 – COE Diukur Dengan CAPM**

$$COE_i = \alpha_0 + \alpha_1 SEGDISCL_i + \alpha_2 ROA_i + \alpha_3 MTBV_i + \alpha_4 SIZE_i + \varepsilon_i$$

| Dependen Variabel : COE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Independen Variabel | Ekspektasi Tanda | Sampel Penuh | | Eliminasi Beta Negatif | |
| | | Koefisien | Signifikansi | Koefisien | Signifikansi |
| C | ? | 0.0191 | 0.5712 | 0.0161 | 0.53970 |
| SEGDISCL | - | 0.0080 | 0.1970 | 0.0029 | 0.34925 |
| ROA | - | 0.0156 | 0.2161 | 0.0211 | 0.08800* |
| MTBV | - | -0.0005 | 0.0643* | -0.0005 | 0.02050** |
| SIZE | - | 0.0028 | 0.0181** | 0.0031 | 0.00150** |
| R-Squared | | 0.06471 | | 0.10840 | |
| Adj R-Squared | | 0.04190 | | 0.08569 | |
| F-statistic | | 2.83688 | | 4.77216 | |
| Prob(F-statistic) | | 0.02613** | | 0.00116** | |
| N (Sampel) | | 169 | | 162 | |

** Signifikansi pada level 5%
* Signifikansi pada level 10%

COE adalah biaya modal ekuitas yang diukur dengan menggunakan proksi *Capital Assets Pricing Model* CAPM, SEGDISCL adalah tingkat pengungkapan informasi segmen, SIZE adalah ukuran perusahaan, ROA adalah *Return on Asset* perusahaan, MTBV adalah *Martket to Book Value* perusahaan.

Hal-hal yang secara umum sering tidak diungkap oleh perusahaan adalah terkait dengan besaran pendapatan yang didapat dari transaksi antar segmen, dasar harga transaksi antar segmen tersebut, pelaporan segmen bentuk sekunder, jenis dan karakteristik produk/jasa masing-masing segmen dilaporkan, serta besaran transaksi dengan pelanggan utama.

Dalam penelitian ini juga menguji beberapa faktor karakteristik perusahaan sebagai determinan dari luas pengungkapan informasi segmen perusahaan. Dari hasil pengujian didapat bahwa ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan publik, *leverage*, likuiditas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan informasi segmen. Sementara variabel umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan.

Dari hasil pengujian didapat bahwa luas pengungkapan informasi segmen tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. Hal ini dapat disebabkan perusahaan masih belum mengungkap informasi segmen sesuai dengan apa yang disyaratkan standar pelaporan, masih banyak informasi segmen yang harusnya diungkap, akan tetapi tidak diungkap oleh perusahaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Porsi kepemilikan saham publik atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tergolong masih relatif rendah. Kepemilikan perusahaan-perusahaan publik kemungkinan lebih terkonsentrasi kepada kepemilikan keluarga. Pengungkapan informasi segmen pada laporan keuangan kemungkinan tidak mempengaruhi tingkat asimetri informasi investor tipe tersebut, karena investor dengan kepemilikan keluarga dapat memiliki akses lebih pada informasi perusahaan yang sifatnya privat dan lebih memadai.

**Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 1) Proksi yang digunakan untuk mengukur biaya modal ekuitas perusahaan masih terdapat beberapa kelemahan. Metode CAPM dikatakan memiliki kelemahan terhadap validitas asumsi-asumsi yang mendasari metode tersebut. Untuk penelitian berikutnya, dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur biaya modal ekuitas, 2) Pemberikan skor indeks pengungkapan informasi segmen syarat dengan adanya unsur subjektivitas dalam menafsirkan pengungkapan di dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian berikutnya, dapat menggunakan proksi yang berbeda dalam mengukur luas pengungkapan informasi segmen, misalnya nilai logaritma natural jumlah kata dalam pelaporan segmen, seperti yang digunakan oleh Saini dan Herrmann (2012), 3) Perusahaan yang lagi tumbuh dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tingkat pertumbuhan total penjualan perusahaan mengikuti Alfaraih dan Alanezi (2011). Akan tetapi, ukuran tersebut mungkin tidak terlalu tepat mencerminkan kondisi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam mengukur perusahaan yang lagi tumbuh, dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai dasar untuk menentukan suatu perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan yang lagi tumbuh. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggolongkan perusahaan yang lagi tumbuh dan yang tidak.

**Implikasi Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki implikasi kepada beberapa pihak yaitu:

a) Perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak perusahaan yang belum mengungkap informasi segmen pada laporan keuangan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh standar pelaporan. Kondisi ini yang mungkin menyebabkan pengungkapan informasi segmen pada laporan keuangan saat ini belum mampu menurunkan biaya modal ekuitas. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk dapat lebih

komprehensif menyajikan informasi segmen pada laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan yang mengatur.

b) Regulator. Melihat masih terdapat informasi segmen yang sifatnya wajib untuk diungkap akan tetapi tidak diungkapkan oleh perusahaan dan adanya pemberlakuan PSAK No. 5 (Revisi 2009) yang menggantikan PSAK No. 5 (Revisi 2000) belum dapat meningkatkan pelaporan segmen operasi perusahaan menjadi lebih komprehensif, maka regulator disarankan agar dapat melakukan peninjauan terhadap penerapan PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi, sehingga dapat ditemukan kendala-kendala apa yang dirasa perusahaan dalam menerapkan PSAK No. 5 tentang Segmen operasi secara utuh.

c) Investor dan Analis Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakteristik/faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkap informasi segmen pada laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, investor dan analis keuangan dapat mengekspektasikan adanya pengungkapan informasi segmen yang lebih luas dari perusahaan yang besar, diaudit oleh KAP Big-4, memiliki porsi kepemilikan saham publik yang tinggi, dan tingkat *leverage* dan likuiditas yang tinggi. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi investor dan analis keuangan dalam mengambil keputusan investasinya.

## DAFTAR PUSTAKA


Alfaraih, M. M. dan F. S. Alanezi. 2011. What Explains Variation In Segment Reporting? Evidence from Kuwait. *International Business dan Economic Research Journal* 10: 31-45.

Alsaeed, K. 2006. The Association between firm-specific characteristics and disclosure. *Managerial Auditing Journal* 21(5): 476 – 496.

Association for Investment Management and Research (AIMR). 1993. Financial Reporting in 1990s and Beyond: A Position Paper of the Association for Investment Management and Research. *Financial Accounting Policy Committee, Prepared by Peter H. Knuston*, Charlottesville, VA: AIMR.

Bailey, W., G. A. Karolyi, dan C. Salva. 2006. The economic consequences of increased disclosure: Evidence from international cross-listings. *Journal of Financial Economics* 81: 175–213.

Benardi, M. K., Sutrisno, dan P. Assih. 2009. Faktor-faktor yang memengaruhi luas pengungkapan dan implikasinya terhadap asimetri informasi. *Simposium Nasional Akuntansi 12.*

Berger, P. G dan R. N. Hann. 2007. Profitability and the Proprietary and Agency Costs of Disclosure. *The Accounting Review* 82(4), 869-906.

Bestari, M. dan S. V. Siregar. 2012. Determinan motif pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 15*.

Brown, P. R. 1997. Financial Data and Decision-Making by Sell-Side Analyst. *The Journal of Financial Statement Analysis*: 43-48.

Camfferman, K. dan T. Cooke. 2002. An analysis of disclosure in the annual reports of UK and Dutch companies. *Journal of International Accounting* 1: 3-30.

Chavent, M., Y. Ding, L. Fu, H. Stolowy, dan H. Wang. 2006. Disclosure and determinants studies: An extension using the Divisive Clustering Method (DIV). *European Accounting Review* 15(2): 181-218.

Cooke, T. E. 1989. Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. *Journal of International Financial Management and Accounting* 2: 113-24.

Core, J. E. 2001. A Review of the Empirical Disclosure Literature: Discussion,

*Journal of Accounting and Economics* 31 (1–3): 441–456.

Damodaran, A. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

Dhaliwal, D. S., O. Z. Li, A. Tsang, dan Y.G. Yang. 2011. Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Respondsibility Reporting. *The Accounting Review* 86(1): 59-100.

Fitriany dan S. Aulia. 2009. PSAK No. 5 (Revisi): Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan dan Dampaknya Terhadap Forward Earnings Response Coefficient. *Simposium Nasional Akuntansi 12*.

Francis, J. R., I. K. Khurana, dan R. Pereira. 2005. Disclosure incentives and effects on cost of capital around the World. *The Accounting Review* 80(4): 1125-1162.

Fama, E. dan K. French. 1992. The cross-section of expected stock returns. *The Journal of Finance* 47: 427-465.

Glaum, M. dan D. L. Street. 2003. Compliance with the Disclosure Requirements of Germany's New Market: IAS Versus US GAAP. *Journal of International Financial Management & Accounting* 14(1): 64-100.

Godfrey, J., A. Hodgson, A. Tarca, J. Hamilton, dan S. Holmes. 2010. *Accounting Theory* 7th Ed. Australia: John Wiley and Sons, Inc.

Grüning, M. 2011. Capital Market Implications of Corporate Disclosure: German Evidence. *BuR - Business Research* 4: 48-72.

Gumanti, T. A. dan N. Puspitasari. 2008. Siklus Kehidupan Perusahaan dan Kaitannya Dengan Investment Opportunity Set, Risiko, dan Kinerja Finansial. *Jurnal Akuntansi and Bisnis* 8(2): 139-150.

Jalila J., dan S. Devi. 2012. Ownership structure effect on the extent of segment disclosure: evidence from Malaysia. 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012) *Procedia Economics and Finance* 2: 247–256.

Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-60.

Komalasari, P. T. dan Z. Baridwan. 2001. Asimetri Informasi dan Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 4(1): 64-81.

Kristanti, P. 2007. Analisis Pelaporan Segmen dalam PSAK No. 5 (Edisi 1994) dan PSAK (Edisi Revisi*), Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surabaya* 7(2) (Mei): 1-14.

Lambert, R., C. Leuz, dan R.E. Verrecchia. 2007. Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital. *Journal of Accounting Research* 45(2), 385–420.

Lang, M. dan R. Lundholm. 1993. Cross-sectional determinants of analyst ratings of corporate disclosure. *Journal of Accounting Research* 31(2), 246-271.

Mardiyah, A. A. 2002. Pengaruh lnformasi Asimetri dan Disclosure terhadap Cost of Capital. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 5(2): 229-256.

Murni, S. A. 2004. Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dan Asimetri Informasi Terhadap Cost of Equity Capital pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 7: 192-206.

Prather-Kinsey, J. dan G. Meek. 2004. The effect of revised IAS 14 on Segment Reporting by IAS Companies. *European Accounting Review* 13(2): 213-227.

Prencipe, A. 2004. Proprietary costs and determinants of voluntary segment disclosure: Evidence from Italian listed companies. *European Accounting Review* 13(2): 319-340.

ROSC. 2010. Report on the Observance of Standards And Codes (ROSC) Indonesia. April, 2011. http://www. World bank.org/ifa/rosc_aa.html, diakses tanggal 25 Januari 2013.

Ross, S. A., R. W. Westerfield, dan B. D. Jordan. 2010. Fundamentals of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill.

Saini, J. S. dan D. Herrmann. 2012. Cost of Equity Capital, Segment Disclosure, and Information Asymmetry. *Working Paper*, Western Michigan University dan Oklahoma State University.

Samaha, K., K. Dahawy, K. Hussainey, dan P. Stapleton. 2012. The extent of corporate governance disclosure and its determinants in a developing market: The case of Egypt. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 28: 168–178.

Singhvi, S. dan H. B. Desai. 1971. An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. *Accounting Review* 46: 621-32.

Siregar, S. V. dan S. Utama. 2008. Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting* 43 (1): 1-27.

Wallace, R. S. O. dan K. Naser. 1995. Firm specific determinants of the comprehensiveness of mandatory disclosure in the corporate annual reports of firms listed on the stock exchange of Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy* 14: 311-68.

Wallace, R. S. O., K. Naser, dan A. Mora. 1994. The relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristics in Spain. *Accounting and Business Research* 25 (97): 41-53.

Wan-Hussin, W. N., N. Che-Adam, N.A. Lode, dan H. Kamardin. 2005. Determinants of early adoption of FRS 114 (Segment Reporting) in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal* 10(2): 1−20.

Zarzeski, M. T. 1996. Spontaneous Harmonization Effects of Culture and Market Forces on Accounting Disclosure Practices. *Accounting Horizons* 10(1): 18-37.

**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411 - 0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# *SIZE DISCOUNT*: BUKTI EMPIRIS DARI AKUISISI DI INDONESIA

**Suherman**
*suherman@feunj.ac.id*
**Mirza Azhari**
**Gatot N. Ahmad**
**Universitas Negeri Jakarta**

***ABSTRACT***

*One of the corporate actions often carried out by the company is acquisition. The purpose of the acquisition is to enhance thefirm value. However, empirical findings in developed capital markets such as the United States show that the acquisition lowers the value of the company (which is called as size discount) (Offenberg, 2010; Offenberg, et al., forthcoming). The purposes of this study are 1) to examine the effect of firm size on firm value in the context of acquisitions in developing capital market, particularly in Indonesia, and 2) to investigate whether the agency cost, level of diversification and growth opportunities moderate the relation between firm size and firm value. Sample of this research covers 35 acquiring-companieslisted on Indonesia Stock Exchange between 2008 and 2012. Firm value is measured with Tobin's Q, firm size is measured with sales, agency cost is measured with cummulative abnormal returns, diversification is measured with business segments, and growth opportunity is measured with price to earning ratio (PER). Using unbalanced panel data (46 observations/46 acquisitions) and controlling for profitability, leverage and liquidity, the result shows that firm size significantly affects the firm value. In addition, agency cost, diversification and growth significantly moderate the relation between firm size and firm value.*

*Key words: acquisitions, firm size, firm value, agency cost, diversification, growth*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dalam konteks akuisisi di pasar modal berkembang, khususnya di Indonesia, dan 2) untuk menyelidiki apakah biaya agensi, tingkat diversifikasi dan kesempatan pertumbuhan memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. Sampel penelitian ini meliputi 35 perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2008 dan 2012. Nilai perusahaan diukur dengan Tobin's Q, ukuran perusahaan diukur dengan penjualan, biaya keagenan diukur dengan tingkat pengembalian abnormal kumulatif, tingkat diversifikasi diukur dengan jumlah segmen bisnis yang dimiliki perusahaan, dan kesempatan pertumbuhan perusahaan diukur dengan rasio harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Dengan menggunakan data panel tidak seimbang (46 observasi/46 akuisisi) dan dikontrol oleh profitabilitas, hutang dan likuiditas, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, biaya agensi, diversifikasi dan pertumbuhan secara signifikan memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan.

*Kata kunci: akuisisi, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, biaya agensi, diversifikasi, pertumbuhan*

## PENDAHULUAN

Akuisisi merupakan keputusan strategi yang seringkali kontroversial dalam manajemen keuangan karena tidak hanya berhubungan dengan masalah bisnis dan keuangan tetapi juga menyangkut masalah hukum, perpajakan, perijinan, manajemen bahkan budaya dari perusahaan tersebut. Akuisisi adalah pembelian atau pengambil-alihan terhadap perusahaan lain (Brigham dan Daves, 2010). Sedangkan Akuisisi menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi tepat untuk memenuhi kekurangan sumber daya jika perusahaan yang diakuisisi memiliki sumber daya yang dibutuhkan. Di Indonesia aktivitas akuisisi masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Setiap perusahaan yang melakukan akuisisi, tentu akan meningkatkan ukuran perusahaan karena merupakan peleburan dari dua perusahaan atau lebih (Pearce dan Robinson, 2008). Akuisisi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, walaupun pada banyak kasus akuisisi justru berdampak pada menurunnya nilai perusahaan.

Fenomena bertambahnya ukuran perusahaan dan berkurangnya nilai perusahaan akibat akuisisi disebut *size discount* (Offenberg, 2010; Offenberg, *et al.*, *forth coming*). *Size discount* menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas karena bertentangan dengan teori skala ekonomi. Case dan Ray (2007) mengatakan dalam teori skala ekonomi dijelaskan bahwa dengan meningkatnya skala operasi akan didapat berbagai keuntungan ekonomis seperti efisiensi, kenaikan penerimaan dan menurunkan risiko. Himmelberg *et al.* (1999) mengatakan perusahaan besar biasanya mempekerjakan manajer yang lebih terampil daripada perusahaan kecil sehingga perusahaan besar memiliki keuntungan yang tentu diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sangat menarik untuk diteliti lebih jauh apakah dalam konteks di pasar modal Indonesia fenomena *size discount* terjadi, atau malah sebaliknya sesuai dengan teori skala ekonomi yang mengatakan bahwa semakin besar skala operasi suatu perusahaan, semakin tinggi efisien dan selanjutnya akan berdampak meningkatkan nilai perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa variabel moderating seperti biaya keagenan, tingkat diversifikasi, dan kesempatan pertumbuhan perusahaan. Offenberg (2010) mengungkapkan bahwa fenomena *size discount* dapat dijelaskan oleh biaya agensi. Pada kasus akuisisi, manager bisa saja memiliki kepentingan lain selain meningkatkan nilai perusahaan seperti kepentingan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Mohammed (2013) mengungkapkan bahwa biaya agensi merupakan tingkat efisiensi manajer dalam hal penggelolaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Apabila manajer memiliki kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan tentu manajer tidak akan boros menggunakan sumber daya perusahaan sehingga perusahaan pun menjadi efisien. Yermack (2006) mengemukakan bahwa penggunaan pesawat jet perusahaan oleh manajer berdampak pada pengurangan kesejahteraan pemegang saham. Penggunaan fasilitas perusahaan secara boros merupakan biaya agensi sebab menimbulkan konflik antara manajer dan pemilik.

Biaya agensi akan berdampak pada meningkatnya beban perusahaan disebabkan biaya yang ditimbulkan oleh manager tidak memiliki manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pemilik. Fenomena *size discount* dapat pula terjadi akibat perusahaan makin terdiversifikasi dimana perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Santos, *et al.* (2008) mengatakan akuisisi yang tidak terkait dengan bisnis lini utama perusahaan mengurangi nilai perusahaan. Selain biaya agensi dan diversifikasi, *size discount* dapat dijelaskan oleh kesempatan pertumbuhan yang dimiliki perusahaan. Reyna dan Encalada (2012) menemukan ukuran perusahaan berbanding terbalik dengan nilai perusahaan hanya terjadi pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Claessens, *et al.* (2002) mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan.

Kontribusi penelitian ini adalah 1) sepengetahuan peneliti, penelitian ini adalah penelitian kali pertama mengenai feno-

mena *size discount* dalam konteks akuisisi di Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan ukuran perusahaan dan nilai perusahaan di Indonesia adalah bukan dalam konteks akuisisi (lihat antara lain; Rupilu, 2011; Nuraina, 2012; Marhamah, 2013; Imron, *et. al.*, 2013; Dewi dan Wirajaya, 2013), 2) penelitian *size discount* kebanyakan dilakukan di pasar modal maju seperti di Amerika Serikat. Penelitian *size discount* di pasar modal berkembang, khususnya di Indonesia, memperluas penelitian-penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena *size discount* signifikan terjadi di Indonesia, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif kepada nilai perusahaan. Lebih jauh, biaya keagenan, tingkat diversifikasi, dan pertumbuhan signifikan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pada bagian berikut ditulis mengenai tinjauan teoretis dan perumusan hipotesis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran.

## TINJAUAN TEORETIS

Berdasarkan penelitian Daines (2001), Claessens, *et al.* (2002), Dhaoui (2010), Ibrahim dan Samad (2011), Jo dan Harjoto (2011), Abdullah, *et al.* (2014) diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Offenberg (2010) dan Offenberg, *et al.* (*forthcoming*) mengungkapkan bahwa fenomena *size discount* terjadi pada kasus akuisisi. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya kelemahan menjadi perusahaan besar.

Perusahaan besar biasanya memiliki pemegang saham yang tersebar di banyak pemilik dan mempekerjakan banyak karyawan sehingga untuk terjadinya konflik kepentingan lebih mungkin akan terjadi. Perusahaan besar juga memungkinkan terjadinya *free-rider*. Sistem birokrasi pada perusahaan besar biasanya rumit sehingga terjadi ketidakefisiensian dalam pengambilan keputusan.

$H_1$ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Offenberg (2010) mengatakan bahwa fenomena *size discount* dapat dijelaskan oleh biaya agensi. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa biaya agensi adalah biaya yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara manager dengan pemilik. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan manajer tidak selalu mengutamakan nilai perusahaan sebagai tujuan utamanya. Yermack (2006) mengatakan bahwa penggunaan pesawat jet perusahaan oleh manajer berdampak pada pengurangan kesejahteraan pemegang saham. Penggunaan fasilitas perusahaan secara boros merupakan biaya agensi dan ini menimbulkan konflik antara manajer dan pemilik. Pada kasus akuisisi, manager bisa saja memiliki kepentingan lain selain meningkatkan nilai perusahaan seperti kepentingan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Biaya agensi akan berdampak pada meningkatnya beban perusahaan disebabkan biaya yang ditimbulkan oleh manager tidak memiliki manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pemilik. Ibrahim dan Samad (2011) mengatakan baik manager maupun pemegang saham harus memiliki satu tujuan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Manager adalah *agent* yang mengelola kegiatan perusahaan sehingga tindakan manager akan menentukan nilai perusahaan. Pemilikpun dapat mengontrol tindakan manager agar tidak menyimpang dari tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

Goranova, *et al.* (2010) mengatakan konflik keagenan akan muncul pada saat pemilik fokus pada nilai perusahaan pengakuisisi dan nilai perusahaan diakuisisi, dengan kata lain fokus yang terpecah-pecah membuat kurangnya kontrol dari pemilik kepada manajer. Sangatlah penting bagi manajer dan pemilik untuk memiliki kepentingan yang sama. Wang (2010) menemukan bahwa biaya agensi mempengaruhi nilai perusahaan. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusaha-

an akan diperkuat oleh biaya agensi karena semakin besar biaya agensi mengindikasikan manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik.

$H_2$ : Biaya agensi memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan

Fenomena *size discount* dapat pula terjadi akibat perusahaan makin terdiversifikasi dimana perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Stulz (1994), Berger dan Ofek (1995), Daines (2001), Lamont dan Polk (2002), Baek, *et al.* (2004), dan Hoechle, *et al.* (2012) menunjukkan bahwa strategi diversifikasi justru mengurangi nilai perusahaan. Dengan kata lain perusahaan yang mengubah operasional dari *single-segment* menjadi *multi-segment* akan berdampak pada berkurangnya nilai perusahaan. Hal tersebut mungkin saja terjadi apabila penilaian investor bukan berdasarkan tingkat risiko. Offenberg (2010) menemukan perusahaan diversifikasi memiliki ukuran perusahaan yang besar tetapi nilai perusahaan yang rendah sedangkan perusahaan *single-segment* adalah perusahaan kecil tetapi memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Menambah segmentasi perusahaan menjadi *multi-segment* berarti meningkatkan ukuran perusahaan sebab secara umum diversifikasi dilakukan dua cara yaitu pendirian perusahaan baru atau melalui merger dan akuisisi. Santos *et al.* (2008) mengatakan akuisisi yang tidak terkait dengan bisnis lini utama perusahaan mengurangi nilai perusahaan. Baek, *et al.* (2004) mengungkapkan semakin banyak jenis usaha yang dikelola, semakin besar tingkat kompleksitas manager dalam mengelola perusahaannya. Ini mengakibatkan turunnya nilai perusahaan.

$H_3$ : Tingkat diversifikasi memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan

Reyna dan Encalada (2012) menemukan ukuran perusahaan berbanding terbalik dengan nilai perusahaan hanya terjadi pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, sedangkan pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi berhubungan positif. Jo dan Harjoto (2011) dan Abdullah, *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan secara positif mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang menginvestasikan dananya dalam proyek yang menguntungkan tentu diharapkan akan meningkatkan tingkat pengembalian di masa depan. Melalui akuisisi, perusahaan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan apabila perusahaan yang diakuisisinya memiliki prospek baik dimasa depan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang mengakuisisi. Akan tetapi bila akuisisi tidak berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan maka akuisisi hanya berdampak pada peningkatan ukuran perusahaan saja, tidak diikuti dengan nilai perusahaan. Claessens, *et al.* (2002) mengatakan perusahaan kecil mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih baik daripada perusahaan besar. Hal tersebut dapat disebabkan perusahaan besar sudah mencapai titik jenuh sehingga sulit meningkatkan tingkat pertumbuhan.

$H_4$ : Pertumbuhan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan sampel. Sampel yang diambil dari KPPU dan OJK harus memiliki kriteria sebagai berikut: (1). Perusahaan pengakuisisi yang sudah *go public* terdaftar di BEI pada periode 2008-2012. (2). Bukan perusahaan sektor keuangan. (3). Tersedianya kelengkapan data. Sampel penelitian terlihat pada tabel 1.

Metode pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi yang mengumpulkan data akuisisi berdasarkan pada komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) dan kantor OJK. Tanggal akuisisi dan informasi segmen perusahaan didapatkan dari lapor-

**Tabel 1**
**Sampel Penelitian**

| Kriteria Sampel | Perusahaan pengakuisisi |
|---|---|
| Perusahaan pengakuisisi pada data KPPU dan OJK | 90 |
| Bukan perusahaan go publik yang terdaftar di BEI periode 2008-2012 | (49) |
| Perusahaan keuangan | (4) |
| Tidak tersedianya kelengkapan data | (1) |
| Outlier | (1) |
| Total perusahaan yang dijadikan sampel | 35 |

**Sumber : Diolah penulis**

an tahunan perusahaan masing–masing di situs Bursa Efek Indonesia.

Data *PER, profitability, leverage, liquidity, firm size*dan *Tobin's q* didapatkan/dihitung dari ICMD ECFIN *(Institute for Economics and Financial Research)*. *Return* saham didapatkan dari situs *yahoo finance*.

Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Berikut tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu: 1). Mengakses situs http://kppu.go.id/ dan mendatangi kantor OJK untuk mengetahui perusahaan–perusahaan yang melakukan akuisisi. 2). Mengakses situs http://idx.co.id/ untuk mendapatkan laporan tahunan pengakuisisi pada periode 2008–2012. 3). Mendapatkan data ICMD dari ECFIN. 4). Mengakses situs http://sahamok.com, ICMD ECFIN dan laporan tahunan untuk menghitung tobin's q dan situs http://duniainvestasi.com/untuk menghitung biaya agensi.

**Variabel Penelitian**

**Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan adalah harga yang dianggap layak sehingga investor bersedia untuk membayarnya. Nilai perusahaan diproksikan oleh tobin's q. Rumus tobin's q adalah: Tobin's q = (EMV + D) / TA

dimana:

EMV = Jumlah saham biasa perusahaan yang beredar dikali dengan harga penutupan saham

D = Nilai buku dari total hutang

TA = Nilai buku total aktiva perusahaan

**Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dinyatakan dalam penjualan perusahaan diakhir tahun. Rumus ukuran perusahaan adalah: *Size* = Ln*Sales*

**Biaya Keagenan**

Biaya Agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dalam rangka menjamin manager menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan pemilik. Biaya agensi disebabkan pemilik dan manager memiliki kepentingan yang berbeda. Biaya agensi diproksikan oleh *cumulative abnormal return* (CAR). Penelitian ini mengikuti Offenberg (2010) menggunakan periode 8 hari yaitu, 5 hari sebelum dan 2 hari sesudah pengumuman. Goranova, *et al.* (2010) mengatakan periode yang panjang akan menjadi bias sebab akan mengambil dampak dari *corporate action* selain akuisisi. Langkah–langkah menghitung CAR adalah:

1. Menghitung *actual return* dari masing-masing data harga saham selama periode penelitian dengan rumus:

$$R_{it} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-i}}$$

dimana:

$P_{it}$ = harga saham i pada hari t

$P_{it-1}$ = harga saham i pada hari t-1

$R_{it}$ = *actual return* saham i pada hari t

2. Menghitung *return* pasar selama periode peristiwa, dengan rumus:

$$R_{mt} = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

dimana:
$IHSG_t$ = IHSG pada hari t
$IHSG_{t-1}$ = IHSG pada hari t-1
$R_{mt}$ = *return* pasar pada hari t

3. Menghitung koefisien regresi $\beta_i$ dan $a_i$ dengan rumus:

$$\beta_i = \frac{n\sum_{t=1}^{n} R_{mt}R_{it} - \sum_{t=1}^{n} R_{mt}\sum_{t=1}^{n} R_{it}}{n\sum_{t=1}^{n} R^2_{mt} - \left(\sum_{t=1}^{n} R_{mt}\right)^2}$$

$$\alpha_i = \frac{\sum_{t=1}^{n} R_{it} - \beta_i\sum_{t=1}^{n} R_{mt}}{n}$$

dimana:
n = jumlah sampel penelitian

4. Setelah menghitung koefisien $\beta_i$ dan $a_i$ diperoleh *expected return* dihitung dengan menggunakan *single market model*, yaitu:

$$E(R_{it}) = \alpha_i + \beta_i R_{mt}$$

dimana:
$R_{mt}$ = *return* pasar pada t
$a_i$ = *return* saham i yang tidak terpengaruh pasar
$\beta_i$ = tingkat pengaruh *return* pasar terhadap *estimated return* saham I
E ($R_{it}$) = *expected return* untuk saham i pada hari t

5. Menghitung besarnya *abnormal return* untuk setiap saham yang diteliti selama periode peristiwa dengan rumus:
$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it})$
dimana:
$AR_{it}$ = *abnormal return* saham i pada hari t
6. Menghitung *cumulative abnormal return* untuk setiap perusahaan yang diteliti dengan *event window* (-5,2). Rumus CAR adalah: CAR = ∑AR

**Diversifikasi**

Diversifikasi adalah jumlah segmentasi yang dioperasikan oleh perusahaan.
Diversifikasi = ∑Segmen

**Tingkat pertumbuhan**

Tingkat pertumbuhan adalah gambaran prospek perusahaan di masa depan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan menggambarkan semakin baik prospek perusahaan dimasa depan. Tingkat pertumbuhan diproksikan oleh *price earning ratio* (PER) dengan rumus:

$$\text{PER} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{EPS}}$$

dimana:
EPS = *earning per share*

**Profitabilitas**

*Profitabilitas* adalah jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset–aset perusahaan. *Profitabilitas* diproksikan oleh *return on asset* (ROA) dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

***Leverage***

*Leverage* adalah sumber dana eksternal yang dimana dana tersebut memiliki kewajiban pembayaran bunga. *Leverage* diproksikan oleh *debt to assets ratio* (DAR) dengan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

***Liquidity***

*Liquidity* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Likuiditas diproksikan oleh *Cash to sales ratio* (Offenberg, 2010) dengan rumus:

$$\text{CS} = \frac{\text{Kas}}{\text{Penjualan}}$$

**Persamaan Regresi**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel *unbalanced*. Model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$Tobins'q_{it} = a + \beta_1 size_{it} + \beta_2 CAR_{it} + \beta_3 size_{it} *CAR_{it} + \beta_4 Diversification_{it} + \beta_5 size_{it} *Difersification_{it} + \beta 6PERit + \beta_7 size_{it} *PER_{it} + \beta_8 ROA_{it} + \beta_9 DAR_{it} + \beta_{10} CS_{it} + \varepsilon_{it}$

dimana :

Tobin's q = Nilai perusahaan

*Size* = Ukuran perusahaan (Ln Penjualan)

CAR = Biaya agensi (*Cummulative abnormal return*)

*Diversification* = Jumlah segmen usaha

PER = Tingkat pertumbuhan (PER)

*Size* * CAR = interaksi antara *size* dan *agency cost*

*Size* * *Diversification* = interaksi antara *size* dan *diversification*

*Size* * PER = interaksi antara *size* dan *growth opportunities*

ROA = Profitabilitas (*return on assets*)

DAR = Hutang (*debt to total assets*)

CS = Likuiditas (*cash to sales*)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistif Deskriptif

Statistik deskriptif untuk Tobin's q, *Size,* CAR, Diversifikasi, PER, ROA, DAR dan CS pada perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2008-2012 seperti pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah sampel atau n data valid yang diteliti adalah 46 observasi. Nilai standar deviasi Tobin's q adalah 1.58 dengan nilai rata–rata Tobin's q adalah sebesar 2.18. Standar deviasi Tobin's q lebih kecil dari pada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa rasio Tobin's q selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang rendah. Tobin's q tertinggi sebesar 9.6 dimiliki oleh PT. Hanson International Tbk. (2010) dan Tobin's q terendah sebesar 0.67 dimiliki oleh PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk. (2009).

Nilai standar deviasi Size adalah 25 triliun dengan nilai rata–rata Size adalah sebesar Rp. 10 triliun. Standar deviasi Size lebih kecil daripada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa Size selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang rendah. Size tertinggi sebesar Rp. 163 triliun dimiliki oleh PT Astra International Tbk. (2011) dan Size terendah sebesar Rp. 20 milliar dimiliki oleh PT Sugih Energy Tbk. (2012).

Nilai standar deviasi CAR adalah 0.16 dengan nilai rata–rata CAR adalah sebesar 0.03. Standar deviasi CAR lebih besar dari pada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa rasio CAR selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang tinggi. CAR tertinggi sebesar 0.33 dimiliki oleh PT Nusantara Infrastrukture Tbk. (2010) dan CAR terendah sebesar -0.82 dimiliki oleh PT Bumi Resources Tbk. (2009). Rendahnya CAR yang dimiliki PT Bumi Resources Tbk. Mengindikasikan bahwa pemilik melepas kepemilikannya dengan harga yang murah pada saat perusahaan melakukan strategi akuisisi.

Nilai standar deviasi Diversifikasi adalah 1.69 dengan nilai rata–rata Diversifikasi adalah sebesar 3.19. Standar deviasi Diversifikasi lebih kecil daripada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa Diversifikasi selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang rendah. Diversifikasi tertinggi sebesar 7 dimiliki oleh PT Intiland Development Tbk. (2012 dan 2011) dan Diversifikasi terendah sebesar 1 dimiliki oleh 7 perusahaan Go Public dalam periode penelitian.

Nilai standar deviasi PER adalah 111.78 dengan nilai rata–rata PER adalah sebesar 32.44. Standar deviasi PER lebih besar dari pada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa rasio PER selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang tinggi.

PER tertinggi sebesar 616.94 dimiliki oleh PT. Rukun Rahaja Tbk. (2010) sebab

**Tabel 2**
**Statistik Deskriptif**

| | TOBINS_Q | SIZE (dalam jutaan) | CAR | DIVERSIFIKASI | PER | ROA(%) | DAR | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | 2.1895 | 10222881 | 0.0302 | 3.1956 | 32.4459 | 6.4432 | 0.5641 | 0.4106 |
| Median | 1.6582 | 2481892 | 0.0173 | 3.0000 | 13.9550 | 6.2200 | 0.5200 | 0.1433 |
| Maximum | 9.6676 | 1.63E+08 | 0.3326 | 7.0000 | 616.9400 | 33.6200 | 1.8400 | 3.1690 |
| Minimum | 0.6714 | 20071.00 | -0.8244 | 1.0000 | -145.3800 | -32.1600 | 0.1600 | 0.0068 |
| Std. Dev. | 1.5812 | 25140884 | 0.1686 | 1.6946 | 111.7834 | 11.3980 | 0.2862 | 0.5684 |
| Observations | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

pada tahun tersebut perusahaan mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan akibat dari penggunaan utang untuk membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. PER terendah sebesar -145.38 dimiliki oleh PT Sugih Energy Tbk. (2012).

Nilai standar deviasi ROA adalah 11.39% dengan nilai rata–rata ROA adalah sebesar 6.44% yang berarti bahwa secara rata–rata tiap penggunaan Rp. 100 aset menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 6. Standar deviasi ROA lebih besar daripada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa rasio ROA selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang tinggi. ROA tertinggi sebesar 33.62% dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (2011) dan ROA terendah sebesar -32.16% dimiliki oleh PT Mitra International Resources Tbk. (2012).

Nilai standar deviasi DAR adalah 0.28 dengan nilai rata–rata DAR adalah sebesar 0.56. Standar deviasi DAR lebih kecil dari pada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa rasio DAR selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang rendah. DAR tertinggi sebesar 1.84 dimiliki oleh PT. Hanson International Tbk. (2010) yang berarti bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang dari pada dana internal untuk membiayai aset perusahaan. DAR terendah sebesar 0.16 dimiliki oleh PT Sugih Energy Tbk. (2012).

Nilai standar deviasi CS adalah 0.56 dengan nilai rata–rata CS adalah sebesar 0.41. Standar deviasi CS lebih besar dari pada rata–rata (mean) yang mengindikasikan bahwa rasio CS selama periode penelitian berada pada fluktuatif serta variabilitas yang tinggi. CS tertinggi sebesar 3.16 dimiliki oleh PT Royal Oak Development Asia Tbk. (2012) dan CS terendah sebesar 0.006 dimiliki oleh PT. Hanson International Tbk. (2010).

**Uji Normalitas**

Uji normalitas menggunakan metode Jargue Bera dengan software Eviews 7.0. Model dianggap berdistribusi normal bila probabilitas Jarque-Bera hitung lebih besar dari 0.05. Gambar 1 menunjukkan distribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Correlation Matrix pada Eviews 7.0. Variabel terindikasi terkena mutikolinearitas tinggi apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,8.

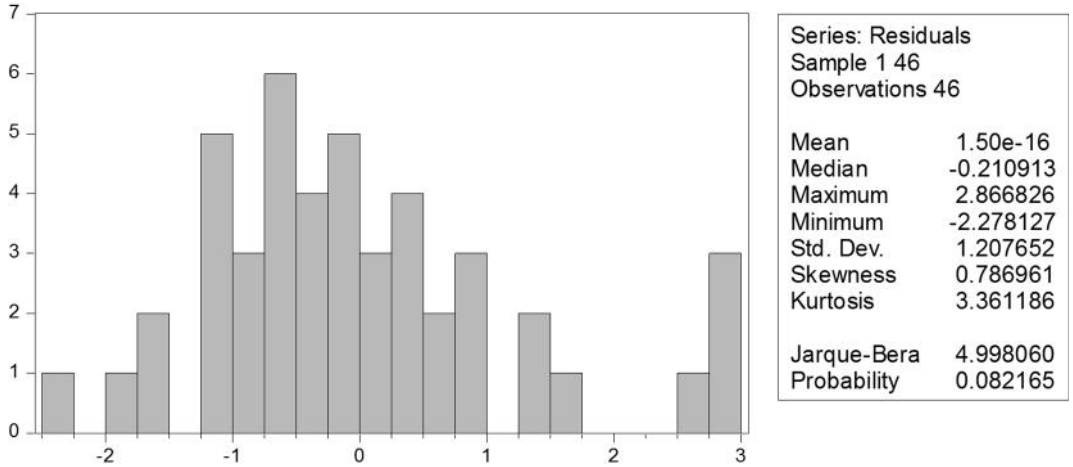


**Gambar 1**
**Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena multikolinearitas yang tinggi karena seluruh koefisien korelasi antar variabel masih di bawah 0,8.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji White pada Eviews. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari α=5% maka model bebas dari fenomena heteroskedastisitas.

Dari tabel 4 diketahui bahwa model bebas dari fenomena heteroskedastisitas dengan nilai probabilitas Obs*R-squared > 0.05.

**Uji Autokorelasi**

Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi maka dilakukan uji Breusch-Godfrey dengan menggunakan lag 2. Apabila nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari α=5% maka model bebas dari fenomena autokorelasi.

Pada tabel 5 diketahui bahwa model bebas dari autokorelasi karena nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa tidak ada hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya.

Untuk mendapatkan model regresi yang terbaik terlebih dahulu ditentukan jenis data panel apa yang paling baik untuk model penelitian. Terdapat tiga pilihan yaitu: *Pooled Ordinary Least Square* (POLS), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM).

**Tabel 3**
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| | SIZE | CAR | DIVERSIFIKASI | PER | ROA | DAR | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | 1.000000 | -0.182312 | 0.219164 | -0.107753 | 0.244012 | -0.168337 | -0.309415 |
| CAR | -0.182312 | 1.000000 | -0.017222 | -0.078289 | -0.078309 | -0.204473 | 0.187368 |
| DIVERSIFIKASI | 0.219164 | -0.017222 | 1.000000 | 0.084038 | -0.103206 | -0.070880 | -0.233070 |
| PER | -0.107753 | -0.078289 | 0.084038 | 1.000000 | 0.070805 | 0.164697 | 0.027357 |
| ROA | 0.244012 | -0.078309 | -0.103206 | 0.070805 | 1.000000 | 0.003271 | -0.083976 |
| DAR | -0.168337 | -0.204473 | -0.070880 | 0.164697 | 0.003271 | 1.000000 | -0.224630 |
| CS | -0.309415 | 0.187368 | -0.233070 | 0.027357 | -0.083976 | -0.224630 | 1.000000 |

**Tabel 4**
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Heteroskedasticity Test: White | | | |
|---|---|---|---|
| F-statistic | 2.243388 | Prob. F(10,35) | 0.0380 |
| Obs*R-squared | 17.96777 | Prob. Chi-Square(10) | 0.0555 |
| Scaled explained SS | 12.28046 | Prob. Chi-Square(10) | 0.2667 |

**Tabel 5**
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | | | |
|---|---|---|---|
| F-statistic | 1.837881 | Prob. F(2,33) | 0.1751 |
| Obs*R-squared | 4.610267 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0997 |

**Uji Chow**

Langkah pertama yang dilakukan adalah uji Chow untuk mengetahui jenis POLS atau bukan yang tepat untuk model tersebut. Dan hipotesis yang akan diuji dalam pengujian ini adalah:

$H_o$ : *Pooled least square*

$H_a$ : *Fixed effect*

Apabila nilai probabilitas $\chi^2$ lebih kecil dari α=5% maka Ho ditolak. Dengan kata lain, model yang tepat adalah bukan POLS dan akan dilakukan uji berikutnya, yaitu uji hausman.

Pada Tabel 6 diketahui bahwa hasil uji Chow pada model menunjukkan nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak, sehingga bukan metode POLS yang tepat untuk model ini dan selanjutnya dilakukan uji Hausman.

**Uji Hausman**

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah uji Hausman untuk mengetahui jenis *Random Effect Model* atau bukan yang tepat untuk model tersebut. Dan hipotesis yang akan diuji dalam pengujian ini adalah:

$H_0$ : *Fixed effects model*

$H_a$ : *Random effects model*

Bila mendapatkan nilai probabilitas $\chi^2$ lebih kecil dari α = 5% maka Ho diterima, sehingga FEM yang paling tepat digunakan. Sebaliknya $\chi^2$ lebih besar dari α = 5% maka Ho ditolak. Dengan kata lain, model REM yang dipakai.

Hasil Uji Hausman pada Tabel 7 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05, maka Ho diterima. Artinya, *Fixed Effects Model* yang paling tepat untuk digunakan.

**Hasil Regresi**

**Pengaruh *Size* terhadap Tobin's q**

Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien dari variabel *size* sebesar -5.007. artinya, pengaruh *size* terhadap tobin's q adalah negative.

**Tabel 6**
**Hasil Uji Chow**

| Redundant Fixed Effects Tests<br>Equation: Untitled | | | |
|---|---|---|---|
| Test cross-section fixed effects | | | |
| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
| Cross-section F | 262.515756 | (34,1) | 0.0489 |
| Cross-section Chi-square | 418.452048 | 34 | 0.0000 |

**Tabel 7**
**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|---|---|---|---|
| Cross-section random | 386.729703 | 10 | 0.0000 |

**Tabel 8**
**Hasil Uji Regresi**

Dependent Variable: TOBINS_Q
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/14 Time: 08:01
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (unbalanced) observations: 46

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| SIZE | -5.007234 | 0.546397 | -9.164093 | 0.0692 |
| CAR | -1.909170 | 0.463627 | -4.117902 | 0.1517 |
| SIZEXCAR | 0.099669 | 0.004177 | 23.86238 | 0.0267 |
| DIVERSIFIKASI | -0.349670 | 0.056741 | -6.162525 | 0.1024 |
| SIZEXDIVERSIFICATION | 0.109241 | 0.008106 | 13.47699 | 0.0472 |
| PER | -0.640944 | 0.026652 | -24.04854 | 0.0265 |
| SIZEXPER | 0.108558 | 0.004513 | 24.05605 | 0.0264 |
| ROA | 0.052333 | 0.005540 | 9.446339 | 0.0671 |
| DAR | 8.468516 | 0.233932 | 36.20083 | 0.0176 |
| CS | -2.458241 | 0.134177 | -18.32092 | 0.0347 |
| C | 28.33782 | 3.644646 | 7.775190 | 0.0814 |

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|---|---|---|---|
| R-squared | 0.999935 | Mean dependent var | 2.189563 |
| Adjusted R-squared | 0.997059 | S.D. dependent var | 1.581222 |
| S.E. of regression | 0.085745 | Akaike info criterion | -3.947008 |
| Sum squared resid | 0.007352 | Schwarz criterion | -2.158119 |
| Log likelihood | 135.7812 | Hannan-Quinn criter. | -3.276879 |
| F-statistic | 347.7796 | Durbin-Watson stat | 5.431049 |
| Prob(F-statistic) | 0.042521 | | |

Nilai probabilitas pada variabel *size* adalah 0.0692 < 0,10. Maka, *size* berpengaruh signifikan terhadap tobin's q pada tingkat kepercayaan 90%. Moller, *et al.* (2004), Offenberg (2009 dan 2010), dan Offenberg, *et al*. (*forthcoming*) menemukan perusahaan besar seringkali mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan perusahaan kecil. Himmelberg, *et al*. (1999) mengatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya agensi yang besar dari pada perusahaan kecil.

Penelitian ini sesuai dengan Ibrahim dan Samad (2011), Jo dan Harjoto (2011), Dhaoui (2010) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

**Pengaruh *Size* terhadap Tobin's q dimoderasi oleh CAR**

Nilai probabilitas pada variabel sizexcar adalah 0.0267 < 0,05 (lihat Tabel 8) yang artinya biaya agensi adalah variabel moderasi pada tingkat kepercayaan 95%. Offenberg (2010) menemukan penyebab dari *size discount* adalah ketidakmampuan pemilik dalam menekan biaya agensi sebab biaya agensi mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan antara manager dengan pemilik. Penelitian ini sesuai dengan Offenberg (2010) yang menyatakan bahwa biaya agensi adalah variabel yang memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

**Pengaruh *Size* terhadap Tobin's q dimoderasi oleh Diversifikasi**

Nilai probabilitas pada variabel sizexdiversifikasi adalah 0.0472 < 0,05 (lihat Tabel 8). artinya diversifikasi adalah variabel moderasi pada tingkat kepercayaan 95%. Offenberg (2010) menemukan perusahaan diversifikasi memiliki ukuran perusahaan yang besar tetapi nilai perusahaan yang rendah sedangkan perusahaan *single-segment* adalah perusahaan kecil tetapi memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Berger dan Ofek (1995) menemukan pada perusahaan diversifikasi, kerugian suatu segmen yang menjadi beban bagi segmen lain yang berkinerja baik. Penelitian ini sesuai dengan Offenberg (2010) yang menyatakan bahwa diversifikasi adalah variabel yang memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

**Pengaruh *Size* terhadap Tobin's q dimoderasi oleh PER**

Nilai probabilitas pada variabel sizexper adalah 0.0264 < 0,05 (lihat Tabel 8). artinya tingkat pertumbuhan adalah variabel moderasi pada tingkat kepercayaan 95%. Reyna dan Encalada (2012) menemukan *size discount* hanya terjadi pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Claessens, *et al.* (2002) mengatakan perusahaan kecil mempunyai prospek pertumbuhan yang lebih baik daripada perusahaan besar.

**Pengaruh varibel kontrol (ROA, DAR dan CS) terhadap Tobin's q**

ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tobin's q pada tingkat kepercayaan 90% (lihat Tabel 8). Hasil ini sesuai dengan Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sebab perusahaan dengan laba yang tinggi dapat mampu melakukan pendanaan dengan kas internal sehingga memiliki kewajiban bayar bunga yang rendah dan laba yang tinggi juga dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tobin's q pada tingkat kepercayaan 95% (lihat Tabel 8). Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) mengatakan penggunaan hutang akan memberikan keuntungan dari *tax shield*. Hasil ini sesuai dengan Wulandari (2006) yang menyatakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sebab dengan adanya modal asing maka manajemen perusahaan dituntut untuk berusaha mengoptimalkan pemakaian modal asing tersebut. CS berpengaruh negatif signifikan terhadap tobin's q pada tingkat kepercayaan 95% (lihat Tabel 8). Hasil tersebut menunjukkan semakin banyak uang kas yang dipegang oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan sebab uang tersebut tidak diputar kembali oleh perusahaan sehingga menyebabkan *opportunity cost* yang besar. Ini sesuai dengan Palepu (1986) yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Hasil diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (feno-

mena *size discount* signifikan terjadi) dalam konteks akuisisi di Indonesia. Pengaruh tersebut diperkuat (dimoderasi) secara signifikan oleh biaya keagenan, tingkat diversifikasi, dan pertumbuhan perusahaan. Diduga bahwa para manager mempunyai kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri daripada meningkatkan kepentingan pemegang saham (atau adanya tindakan-tindakan tersembunyi dari manajer puncak yang berakibat pada berkurangnya kesejahteraan pemegang saham).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dan faktor–faktor yang memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji analisis regresi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. (2). Biaya keagenan, tingkat diversifikasi, dan kesempatan pertumbuhan signifikan memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

### Saran

Peneliti menyarankan berikut dibawah ini: (1). Penelitian berikutnya sampel dipisahkan antara *good bidders* dan *bad bidders* (dibuat sub-sampel). Kemudian diteliti apakah fenomena *size discount* yang dimoderasi oleh biaya keagenan, diversifikasi dan pertumbuhan sama terjadi pada perusahaan *good bidders* dan *bad bidders. (2).* Penelitian berikutnya menggunakan pengukuran-pengukuran variabel yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F., Shah, A., dan Khan, U. S. 2014. Firm performance and the nature of agency problems in insiders-controlled firms: Evidence from Pakistan. *The Pakistan Development Review* 51(4): 161-183.

Baek, J. S., Kang, J. K., dan Park, K. S. 2004. Corporate governance and firm value: evidence from the Korean financial crisis. *Journal of Financial Economics* 71(2): 265-313.

Berger, P. G., dan Ofek, E. 1995. Diversification Effect on Firm Value. *Journal of Financial Economics* 37(1): 39-65.

Brigham, E. F., dan P. R. Daves. 2010. *Intermediate Financial Management*. 10th edition, South-Western Cengage Learning.

Case, E. Karl, dan Ray, C. Fair. 2007. *Prinsip – Prinsip Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Claessens, S, Djankov, S., Fan, J. P. H., dan Lang, L. H. P. 2002. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *Journal of Finance 57*(6): 2741-2771.

Daines, R. 2001. Does Delaware Law Improve Firm Value?. *Journal of Financial Economics 62*(3): 525-558.

Dewi, Ayu S. M. dan Wirajaya, A. 2013. Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2:* 358-372.

Dhaoui, A. 2010. "MNCs' Strategy in R&D: The Effect of the Decentralization on the Performance and on the Earnings Management. *Global Review of Business and Economic Research 6*(1): 83-97.

Goranova, M. L., Dharwadkar, R., dan Brandes, P. M. 2010. Owners on Both Sides of the Deal: Mergers and Acquisitions and Overlapping Institutional Ownership**.** *Strategic Management Journal* 31(10): 1114-1135.

Himmelberg, P. C., Hubbard, R. G., dan Palia, D. 1999. Understanding the determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance. *Journal of Financial Economics* 53(3): 353-384.

Hoechie, D., Schmid, M., Walter, Ingo., dan Yermack, D. 2012. How much of the diversification discount can be explained by poor corporate governance?.

*Journal of Financial Economics* 103(1): 41-60.

Ibrahim, H., dan Samad, F. A. 2011. Corporate Governance Mechanisms and Performance ofPublic-Listed Family-Ownership in Malaysia. *International Journal of Economics and Finance 3*(1): 105-115.

Imron, G. S., Hidayat, R., dan Alliyah, S. 2013. Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *POTENSIO* 18(2): 82-93.

Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.

Jo, H., dan Harjoto, M. A. 2011. Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics* 103(3): 351-383.

Lamont, O. A., dan Polk, C. 2002. Does diversification destroy value? Evidence from the industry shocks. *Journal of Financial Economics* 63(1): 51-77.

Lang, H. P. L., dan Stulz, R. M. 1994. Tobin's q, Corporate Diversification, and Firm Performance. *Journal of Political Economy* 102(6): 1248-1280.

Marhamah. 2013. Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaaan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. *Jurnal STIE SEMARANG* 5(3): 43-67.

Moeller, S. B., Schlingemann, F. P., dan Stulz, R. M. 2004. Firm size and the gains from acquisitions. *Journal of Financial Economics* 73(2): 201-228.

Mohammed, D. 2013. A dynamic panel model of capital structure and agency cost in Nigerian listed companies. *Global Journal of Business Research* 5(2): 33-44.

Nuraina, Elva. 2012. Pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang dan nilai perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 19(2): 110-125.

Offenberg, D. 2009. Firm size and the effectiveness of the market for corporate control. *Journal of Corporate Finance* 15(1): 66-79.

Offenberg, D.2010. Agency Costs and the Size Discount: Evidence from Acquisitions. *Journal of economics, finance and administrative studies* 15(29): 74-93.

Offenberg, D., Miroslava S. dan H. Gregory Waller. *Forthcoming*. Who Gains from Buying Bad Bidders?. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.

Palepu, K. G. 1986. Predicting Takeover Targets: A Methodological and Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Economics* 8(1): 3-35.

Pearce, A. John. dan Robinson B. R. 2008. *Manajemen Strategis – Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba empat.

Reyna, J. M. S. M., dan Encalada, J. A. D.2012. Ownership Structure, Firm Value andInvestment Opportunities Set: Evidence from Mexican Firms. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation* 8(3): 35-57.

Rupilu, Wilsna. 2011. Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik* 8(1): 101-127.

Santos, M. B. D., Errunza, V. R., dan Miller, D. P. 2008. Does corporate international diversification destroy value? Evidence from cross-border mergers and acquisitions. *Journal of Banking & Finance 32*(12): 2716-2724.

Sofyaningsih, S., dan Hardiningsih, P. 2011. Struktur kepemilikan, kebijakan dividen, kebijakan utang dan nilai perusahaan. *Journal dinamika keuangan dan perbankan* 3(1): 68-87.

Wang, G. C. 2010. The Impacts of Free Cash Flows and Agency Costs on Firm Performance. *Journal Service Science and Management* 3(4): 408-418.

Wulandri, N. 2006. Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi* 1(2): 120-136.

Yermack, D. 2006. Flights of fancy: corporate jets, CEO perquisites and inferior shareholder returns. *Journal of Financial Economics* 80(1): 211-242.

**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411 - 0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# MODEL PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

**Almasdi Syahza**
*syahza.almasdi@gmail.com*
**Suarman**
**Lembaga Penelitian Universitas Riau**

***ABSTRACT***

*Poverty is fenomenal problem in the history of Indonesia as nation-state. The poverty causes neglected and isolated areas where development disparity appears and affects the increasing lag of poor villages. One of the regencies in Province of Riau felt this condition is Regency of Kepulauan Meranti. Most of villages, there are 59 vilages (80.82%), are disadvantaged areas. The total of household are 45,564, and 56.76% of them (25,863 household) are poor which consist of 114,496 souls. Whereas this area has strategic geographic location because it is in the line of shipping and international trade Selat Malaka, near to neighbor country Malaysia and Singapore, and has potential as hinterland area of free trade zone Batam, Bintan, and Karimun (FTZ-BBK). The purpose of this research is to arrange the strategic plan model of disadvantaged area development in effort of accelerating rural economic development. The research conducted through survey by using development research. Technique used for sampling is purposive sampling method and analysis method used for this research is method of quantitaive and qualitative descriptive. The research found that the strategy of rural area development in effort to spur economic growth is cross-sectoral approach in all fields. In addition, the research also found the model of decreasing number of poor families by referring to four strategy principles of decreasing number of poor families.*

*Key words: disadvantaged areas, poverty, economic acceleration*

**ABSTRAK**

Kemiskinan menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation-state*. Kemiskinan tersebut menyebabkan daerah terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin terebut. Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang merasakan kondisi tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar dari desa yang ada yakni 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 56,76% (25.863 KK) merupakan rumah tangga miskin yang terdiri dari 114.496 jiwa. Pada hal daerah ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional selat malaka, berdekatan dengan negara tentangga Malaysia dan Singapura, serta berpotensi sebagai daerah *hinterland* dari kawasan *Free Trade Zone* Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK). Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatam pembangunan ekonomi di pedesaan. Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Untuk pengambilan sampel masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*, analisis digunakan adalah metode deskriptif kuantitaif dan kualitatif. Penelitian ini menemukan strategi pengembangan daerah pedesaan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendekatan lintas sektoral di semua bidang. Penelitian juga menemukan model penurunan jumlah keluarga miskin dengan mengacu kepada empat prinsip strategi penurunan jumlah keluarga miskin.

Kata kunci: daerah tertinggal, kemiskinan, percepatan ekonomi

## PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state.* Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga. Kemiskinan memperkuat arus urbanisasi ke kota. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidupnya (*safety life).* Kemiskinan menyebabkan keterbelakangan penduduk dan termarginalkan kehidupan mereka. Mereka tidak punya akses baik akses pengembangan ekonomi maupun akses terhadap kebijakan. Mereka menerima apa adanya. Dampak ini menyebabkan daerah mereka merasa terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin tersebut.

Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di Propinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 5 (lima) kecamatan dengan luas daerah 3.707.84 km$^2$. Jumlah penduduk sebanyak 216.329 jiwa. Untuk lebih jelasnya luas daerah dan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Daerah ini merupakan daerah yang terdiri dari empat gugus pulau besar, dan merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang ada di Provinsi Riau. Bila ditinjau dari geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada di jalur pelayaran dan perdagangan international Selat Malaka dan dua Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bagi pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti juga berdekatan dengan pengembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 dan bahagian yang tidak terpisahkan dari *Free Trade Zone* Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK).

**Tabel 1**
**Luas Daerah dan Jumlah Penduduk kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012**
**(keadaan sebelum pemekaran kecamatan)**

| No | Kecamatan | Luas Darah | | | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Km$^2$ | Ha | % | Jiwa | % |
| 1 | Tebing Tinggi | 849,50 | 84.950 | 22,91 | 85.742 | 39,64 |
| 2 | Tebing Tinggi Barat | 587,33 | 58.733 | 15,84 | 16.113 | 7,45 |
| 3 | Rangsang | 680,50 | 68.050 | 18,35 | 31.060 | 14,36 |
| 4 | Rangsang Barat | 241,60 | 24.160 | 6,52 | 34.370 | 15,89 |
| 5 | Merbau | 1.348,91 | 134.891 | 36,38 | 49.044 | 22,67 |
| | Jumlah | 3.707,84 | 370.784 | 100,00 | 216.329 | 100,00 |

**Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012**

Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), berubah menjadi suatu usaha untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional yang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Zainal, 2010).

Kedudukan strategis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdekatan dengan Batam sebagai FTZ terhadap Singapura akan memberikan berbagai peluang pengembangan kawasan *hinterland* Batam, melalui penetapan peran sinergis terhadap pengembangan aktifitas ekonomi dan sosial, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kawasan *hinterland* Batam (dalam hal ini wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat memainkan peranannya sebagai aktivitas pengembangan daerah baru dan penyangga ekonomi Kota Batam. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu *hinterland* Batam dapat menjadi *key success factor dan stimulator* bagi penyelenggaran Kawasan Ekonomi Khusus Batam Bintan dan Karimum (KEK-BBK). Disamping itu dapat pula mentransformasi diri agar memiliki daya saing dalam menangkap berbagai peluang ekonomi KEK-BBK. Pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung KEK-BBK harus dicermati sejak dini agar berbagai konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti benar-benar fokus dan terstruktur dengan baik.

Dalam upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *hinterland* KEK Batam, diperlukan arah pengembangan antara lain memperkuat fungsi Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infra struktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Meranti itu sendiri.

Tantangan yang dihadapi oleh daerah otonom yang baru khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan strategi tersebut adalah tercapainya ktriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah. Sedangkan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam kaitan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah (Syamsuar, 2010).

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (2012) di daerah tersebut terdapat 73 desa (Tebel 2). Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini (semasa bergabung dengan kabupaten induk) belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanan yang salah

dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berimbang di setiap kecamatan. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kabupaten kepulauan Meranti dengan tingkat kesejangan yang minimal.

Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat menguntungkan dari segi *hinterland* KEK Batam, maka ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah dapat di kurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Program ini dapat berbentuk pembangunan pertanian tanaman perkebunan, tanaman makanan dan hortikultura serta perikanan.

Dari uraian yang dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatam pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya membangun kabupaten yang mandiri. Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatam pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, yaitu: 1) Seberapa besar potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis agribisnis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Seberapa besar potensi perekonomian daerah, yang terkait dengan struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan; 3) Bagaimanakah perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Tabel 2**
**Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Desa Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 (keadaan sebelum pemekaran kecamatan)**

| No | Kecamatan | Rumah Tangga | Jumlah Desa | Rumah tangga Miskin | | Desa Tertinggal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Miskin | % | Desa | % |
| 1 | Tebing Tinggi | 17.745 | 16 | 4.953 | 27,91 | 10 | 62,50 |
| 2 | Tebing Tinggi Barat | 3.585 | 8 | 1.598 | 44,57 | 6 | 75,00 |
| 3 | Rangsang | 6.729 | 13 | 2.843 | 42,25 | 11 | 84,62 |
| 4 | Rangsang Barat | 6.608 | 15 | 2.307 | 34,91 | 14 | 93,33 |
| 5 | Merbau | 10.897 | 21 | 4.175 | 38,31 | 18 | 85,71 |
| | Jumlah | 45.564 | 73 | 15.876 | 34,84 | 59 | 80,82 |

**Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menentukan strategi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui pemanfaatan potensi sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti; 2) Menentukan potensi perekonomian daerah, yang menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan yang berbasis agribisnis; 3) Menentukan perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatam pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## TINJAUAN TEORETIS

### Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan

Paradigma pembangunan telah diwarnai konsep pemberdayaan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga ketiga pihak memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam mencapai tujuan pembangunan di segala bidang. Ketiga komponen tersebut harus bersinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai program atau kegiatan yang ada, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif, dan swasta seharusnya berkontribusi secara wajar didalam pembangunan daerah sebagai implementasi tanggung jawab sosialnya (Sumaryo, 2011).

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self-organizing* dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau sering dikenal dengan semboyan *put the farmers first*. Paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisitaif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Keterlibatan tersebut termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat (Pemberdayaan, 2009).

Dari data Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (Sahdan, 2009). Ke-

lemahan pembangunan di masa lalu tidak melibatkan masyarakat miskin sebagai aktor pelaku pembangunan, mereka lebih banyak terlibat sebagai buruh kasar dalam pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan berfikir juga menjadi penghalang dapat ikut campur dalam proses pembangunan. Ketidak mampuan ini menyebabkan timbulnya masyarakat miskin dan daerah miskin.

**Konsep Daerah tertinggal dan Pusat Pertumbuhan**

Daerah-daerah tertinggal sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan; seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak dan lain-lain. Di samping itu masyarakat daerah tertinggal tersebut relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat. Untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan terobosan dalam bentuk program penataan ruang, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata karena pertumbuhan ekonomi ini bisa saja hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, terutama di perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Berdasarkan data yang ada, di daerah Riau terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Demikian juga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial yang pada gilirannya membahayakan kestabilan nasional. Akibat lanjut dari kesenjangan ini adalah munculnya daerah-daerah tertinggal dan miskin yang terbelakang dalam pembangunan terutama daerah-daerah di pedesaan. (Syahza, 2005).

Kesenjangan di daerah tertinggal ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Di daerah pedesaan sektor pertanian sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian pedesaan, karena sebagian besar kegiatan pertanian masih dilaksanakan secara konvensional. Hal ini terjadi tidak saja dilingkup pembangunan pertanian di wilayah kabupaten, tapi juga kegiatan tersebut dilakukan di wilayah perkotaan. Di daerah pedesaan dalam pengembangan sektor pertanian terlihat peran dominan pedagang pengumpul dan bandar besar (produsen sekunder) sebagai penguasa modal dan mengatur tataniaga komoditi pertanian. Akibatnya petani sebagai produsen primer diperkirakan hanya memperoleh manfaat keuntungan dari kegiatan usaha tani dan tataniaga sekitar 5-15 persen, bahkan sering merugi. Sementara 15-95 persen manfaat keuntungan diperoleh oleh produsen sekunder (Kastaman, 2007).

Bagi Indonesia dalam pembangunan di masa datang akan menghadapi tiga kelompok permasalahan mendasar, yaitu; Pertama, lapangan kerja produktif dan pengangguran. Masalah ini terkait dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor sekunder (industri dan kontruksi); Kedua, ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa; dan ketiga, ketidakseimbangan ekonomi antar daerah (Syahza, 2007).

**Kesenjangan Ekonomi Masyarakat**

Penyebab kesenjangan ekonomi **di** dalam negeri adalah kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mengutamakan ke-

pentingan pemodal industri di kota-kota ketimbang rakyat pedesaan. Di tingkat desa, pemerintah lebih banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan sebagian kecil elit desa daripada sebagian besar buruh tani (Alim, 2007). Hasil penelitian Syahza. A dan Suarman (2008), menjelaskan untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

Di Indonesia sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Lebih lanjut diungkapkan Suyono (2007), dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan kokoh, sehingga di pedesaan dapat tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era pengindustrian. Lebih khusus, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu dan pertanian harus mendapatkan prioritas utama.

Dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih (Basri, 2007). Banyak faktor yang dijadikan sebagai tolok ukur suatu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Faktor-faktor itu adalah ketersediaan jalan utama desa, lapangan usaha bagi mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatan penduduk per km$^2$, sumber air minum, sumber bahan bakar, persentase penggunaan listrik dan persentase pertanian (Yunita, 2006).

Menurut Edy (2009), tolak ukur berhasilnya pembangunan daerah tertinggal dalam konteks pembangunan nasional didasari pada 3D atau tiga daya, yaitu: 1) daya struktur; 2) daya masyarakat; dan 3) daya koordinasi lintas-sektor yang mencakup program pembangunan antar sektor, antar daerah, dan pembangunan khusus. Dalam pelaksanaan, ketiga daya itu harus dilakukan secara terpadu, terarah, dan sistematis. Pada akhirnya, pemberian ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada

rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dapat bersinergi dengan upaya menanggulangi pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan pembangunan nya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan, bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dan daerah maju. Kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal, memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Hasil penelitian Suhendra (2010), untuk memacu pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal, diperlukan investasi untuk modal awal pembangunan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah investasi merupakan satu bagian yang penting dari pembangunan tersebut. Terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan dalam menghasilkan otput dan nilai tambah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan investasi secara umum dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah pada umumnya dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan fisik dan nonfisik yang tidak dapat dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat/swasta. Khusus untuk negara yang sedang berkembang, kemampuan pemerintah untuk biaya investasi tersebut sangat terbatas terutama untuk prasarana dan sarana infrastruktur.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Guna mendapatkan informasi secara umum tentang keadaan daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan, maka penelitian ini banyak memanfaatkan data primer yang didapatkan melalui survey. Data sekunder hanya bersifat sebagai pendukung.

Secara spesifik ruang lingkup studi Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatam Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diterangkan sebagai berikut: 1) Analisis Kebijaksanaan Pembangunan Daerah. Meliputi kebijaksanaan pengembangan tataruang daerah, pengembangan ekonomi daerah, sektor-sektor prioritas/strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan daerah tertinggal; 2) Kajian terhadap wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan daerah tertinggal; 3) Analisis ekonomi wilayah studi; 4) Kajian terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan desa tertinggal.

Penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan pemilihan lokasi dilakukan secara *cluster* di daerah pedesaan dengan pertimbangan jumlah desa tertinggal, keluarga miskin dan jumlah penduduk per kecamatan. Untuk pengambilan sampel masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpencaran, karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian yang beragam, dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui kuesioner dan wawancara secara mendalam.

Data yang dikumpulkan merupakan informasi dari masyarakat dan pemuka masyarakat di pedesaan, antara lain: potensial wilayah untuk pengembangan,

komoditas yang telah diusahakan masyarakat pedesaan dan komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan; data sosial dan ekonomi masyarakat. Variabel yang diukur dalam studi ini adalah variabel yang diperlukan untuk pembangunan desa tertinggal yang meliputi kelayakan usaha dan kelayakan berkembang di masa depan.

Guna mengetahui kedua kelayakan tersebut maka diperlukan data-data yang dapat memberikan informasi dalam studi ini, antara lain: 1) Data kebijaksanaan pembangunan daerah, yang meliputi; kebijaksanaan pengembangan tata ruang daerah; kebijkasanaan pengembangan ekonomi daerah; dan kebijaksanaan terhadap sektor-sektor prioritas/strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan desa tertinggal; 2) Data wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan, meliputi: analisis ketersediaan lahan, penggunaan dan status lahan, status hutan, geologi tata lingkungan dan rencana lintas sektoral; 3) Data tata ruang, meliputi: analisis sebaran kegiatan/aglomerasi; analisis sistem transportasi; dan analisis hirarki pemukiman; 4) Data ekonomi wilayah, meliputi: kondisi dan pertumbuhan ekonomi wilayah studi; sektor/komoditas yang memegang peranan penting; keterkaitan antar sektor; daya tarik wilayah terhadap swasta; sektor-sektor yang mempunyai peluang untuk dikembangkan; dan komoditas unggulan/kegiatan usaha yang potensial dikembangkan; 5) Pola kegiatan usaha sesuai dengan kesesuaian lahan dan keunggulan komparatif, antara lain: komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah studi; dan keterkaitan antara komoditas ungulan yang dikembangkan dengan sektor lain; dan 6) Data kelayakan usaha potensial/komoditas unggulan.

Memperoleh informasi data primer dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/ informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian (Syahza, 2013).

Kekhususan lain dari RRA ini adalah survey pengumpulan informasi dilakukan oleh peneliti yang multidisipliner atau peneliti yang mampu melihat masalah secara multidisipliner. Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan diskusi diantara peneliti, saling tukar informasi tentang suatu masalah tertentu. Kalau ditemui perbedaan pandangan dalam suatu masalah yang disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga akan didapatkan persepsi yang sama diantara peneliti.

Selain dari data primer juga diperlukan data sekunder yang dikumpulkan dari kantor dan instansi yang terkait. Data sekunder ini akan dikonfirmasikan dengan informasi dan data primer yang didapatkan ditingkat lapangan.

Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian sesuai dengan kebutuhan studi kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan secara deskriptif. Di samping itu juga dilakukan analisis kuantitatif melalui pendekatan konsep pengembangan tata ruang wilayah ditinjau

dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, kebijakan pemerintah, daya dukung lahan, serta sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sasaran yang hendak dicapai adalah memacu pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat desa tertinggal. Untuk itu perlu diinventarisir sumberdaya yang berpotensi untuk dikembangkan dari si ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tempatan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dari data yang ada diperoleh informasi jumlah rumah tangga miskin sebanyak 25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari 114.496 jiwa. Jumlah anak yang bersekolah sebanyak 23.461 anak (berdasarkan Usia 7 s/d 18 th) dan jumlah anak tidak sekolah 7.474 anak. Dari sisi perkerjaan sebanyak 49.070 jiwa bekerja (usia produktif L/P), tidak bekerja (pada usia produktif L/P) sebanyak 23.621 jiwa.

Terkait dengan lapangan usaha, jumlah kepala rumah tangga yang bekerja 23.322 KRT (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya). Jumlah individu yang berkerja 48.753 (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya).

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk agak rumit bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi di daerah, antara lain: 1) kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; 2) angka kemiskinan masih relatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4) rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasi lingkungan hidup.

Sesuai dengan kondisi daerahnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang berada di wilayah pesisir Propinsi Riau. Faktor geografi tersebut menjadi kesulitan utama dalam pembangunan, karena membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dapat diketahui dan diidentifikasi angka kemiskinan serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%), atau 75.000 jiwa; 2) infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan); 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai); 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi

untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

Untuk penanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, prioritas program pengembangan difokuskan di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan atau kawasan andalan. Kawasan andalan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Pulau tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, dan Pulau Padang. Berdasarkan informasi dan hasil kajian di lapangan, di daerah yang berpotensi dikembangkan pusat pertumbuhan. Perspektif pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Selatpanjang dan Ransang; 2) Pengembangan cluster industri berbasis pertanian; 3) Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri dorak; 4) Pengembangan kawasan industri tebing tinggi barat; 5) Pengembangan kawasan indsutri pulau ransang; 5) Pengembangan komoditas unggulan daerah dalam rangka ketahanan pangan operasi pangan Riau makmur (OPRM); 6) Pengembangan perikanan, penangkapan ikan dan budidaya ikan khususnya patin jambal dan pertambakan udang; 7) Pengembangan bidang peternakan khususnya ternak sapi, kambing, dan itik; 8) Revitalisasi perkebunan karet, kelapa, sagu, kopi dan kakao.

Pemerintah selalu mengembangkan program penanggulangi kemiskinan baik secara daerah maupun secara nasional. Kemiskinan di daerah pedesaan maupun di perkotaan terbentuk secara berantai. Sebuah keluarga miskin akan sulit keluar dari kemiskinan tersebut disebabkan berapa hal, antara lain: Pertama: Pendidikan dan keterampilan, keluarga miskin mempunyai kemampuan pengetahuan yang rendah dan berakibat kepada keterampilan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan tingkat keahlian yang dimiliki juga rendah. Secara berkesinambungan mereka ini memperoleh pendapatan yang rendah pula. Kedua: Begitu juga dari sisi kesehatan dan gizi. Keluarga miskin mempunyai gizi yang tidak memadai dan menyebabkan stamina rendah yang berdampak terhadap kinerja rendah. Akhirnya bermuara kepada pendapatan yang rendah dan menyebabkan mereka tetap miskin. Ketiga: Kepemilikan faktor produksi. Keterbatasan pendapatan menyebabkan kemampuan menabung rendah dan tidak punya investasi. Kondisi ini akan berdampak terhadap pendapatan di masa datang. Pada Gambar 1 disajikan terbentuknya kemiskinan dengan menyajikan bentuk-bentuk lingkaran kemiskinan di pedesaan khususnya di wilayah pesisir.

Dari pendekatan yang selama ini dipakai, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Dari data Bappenas (2004), indikator kemiskinan adalah, antara lain; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

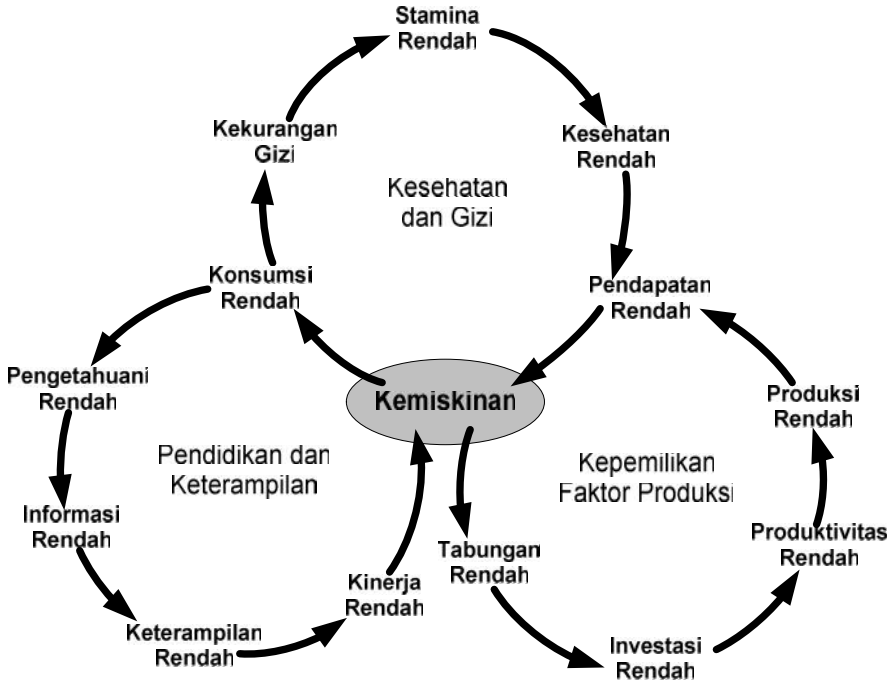


**Gambar 1**
**Lingkaran Terbentuknya Kemiskinan di Pedesaan Wilayah Pesisir**
**Sumber: Hasil Penelitian Fundamental (Syahza, 2013)**

Salah satu sebab meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan antar daerah di masyarakat pedesaan adalah karena adanya distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan yang dikuasai kelompok ekonomi kuat, dimana mereka ini dekat dengan kekuasaan. Dampaknya terhadap kepemilikan faktor produksi seperti tanah, modal tidak merata dan tidak adil. Selain itu rendahnya tekno logi produksi, sedikitnya teknologi pengolahan hasil, akses pemasaran serta rendahnya keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak untuk kegiatan produksi, akibatnya pendapatan mereka menjadi sangat rendah. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pesatnya pembanguan sektor perkebunan, kegiatan HPH dan HTI telah mendesak mereka sehingga memberikan dampak negatif terhadap kepemilikan lahan bagi keluarga miskin di pedesaan.

Kriteria keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang berarti adanya penurunan jumlah keluarga miskin. Penurunan jumlah keluarga miskin ini merupakan faktor terpenting, oleh karena itu selalu diupayakan dengan berbagai strategi kebijakan khusus melalui lintas instansi dan lintas program. Upaya penurunan banyaknya keluarga miskin diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan dan perbaikan sektor ekonomi dengan pemberian pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke sumber daya, dan bantuan modal usaha produktif. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

Menekan keluarga miskin dapat dilakukan melalui percepatan pembanguan pedesaan. Menurut Syahza (2008), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat

dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; ketiga, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan keempat, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Kemiskinan di daerah terbentuk pada umumnya karena alasan klasik, yakni kekurangan modal usaha, lemahnya sumberdaya manusia, kurangnya akses pasar, infrastruktur yang tidak sempurna, lemahnya informasi, lemahnya kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Dari sisi lain juga lemahnya pelayanan sosial untuk masyarakat terutama kesehatan dan pendidikan. Guna mengatasi masalah tersebut maka dilakukan penanggulangi kemiskinan dipedesaan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin. Strategi yang dimaksud antara lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesehatan, pendidikan, kelembagaan ekonomi dan nonekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan (TNP2K, 2012). Pada Gambar 2 disajikan strategi penurunan keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

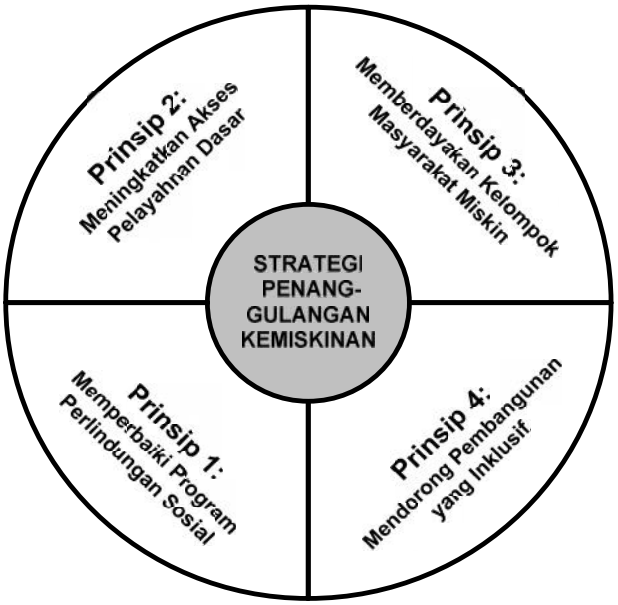


**Gambar 2**
**Strategi Penurunan Jumlah Keluarga Miskin**
**Sumber: TNP2K, 2012**

Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga dalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Program pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari

dalam untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Pemberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Pemberdayaan, 2009).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Di pedesaan sebagian besar penduduknya menggantungkan nasibnya kepada sektor pertanian. Karena itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan agribisnis berwawasan lingkungan.

Pengembangan agribisnis ramah lingkungan merupakan perencanaan pembangunan pertanian di pedesaan dalam jangka panjang yang memperhatikan dukungan kekuatan alam secara berkelanjutan. Tingkat ekploitasi terhadap sumberdaya alam disesuaikan dengan daya dukung dan resitensi sumberdaya alam yang ada sehingga produktivitas sumberdaya setempat dari waktu kewaktu tetaplah stabil. Alternatif lain pengurasan atau pengrusakan akibat kegiatan agribisnis diupayakan ditanggulangi dengan penambahan investasi yang dikhususkan untuk mengembalikan mutu sumberdaya alam. Konsekuensi logis dalam melaksanakan pembangunan pertanian adalah mendorong inovasi kelembagaan dengan keahlian yang meliputi pengetahuan pasar, agribisnis dan keuangan pedesaan (Kusnandar *et al*, 2013).

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Prinsip keempat dalam pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang

dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat *multiplier effect* pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Dengan strategi tersebut akan dapat mengurang jumlah desa tertinggal.

Desa tertinggal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Beberapa dari daerah miskin ini merupakan sumberdaya alam yang cukup kaya tetapi masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Di samping itu dengan program pemberdayaan masyarakat desa tertinggal ini akan mengurangi ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar daerah. Salah satu usaha mengurangi ketimpangan pendapatan adalah melalui pembangunan pertanian di pedesaan.

Kesenjangan di daerah tertinggal semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat tetapi dalam jangka panjang kesenjangan yang bersifat akumulatif ini akan menyebabkan daerah yang tertinggal akan semakin jauh tertinggal sementara yang maju akan tetap maju dengan percepatan yang semakin sulit dikejar. Hal ini karena adanya perbedaan sumberdaya menusia, pertumbuhan awal dan hasil pembangunan berjalan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi bila ada intervensi pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing secara lebih fair dengan daerah lain.

Pusat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek tetesan ke bawah (*trickling down effect* atau *spread effect*) dan efek polarisasi (*polarization effect* atau *backwash effect*) pada wilayah yang ada disekitarnya (*hinterland*), pendapatan wilayah akan lebih besar jika investasi pembangunan dikonsentrasikan pada pusat pertumbuhan dibandingkan jika investasi pembangunan yang sama digunakan secara menyebar dalam seluruh wilayah yang bersangkutan. Efek pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya masih bersifat umum, yaitu pusat-pusat pertumbuhan akan menyebarkan efek yang beraneka ragam terhadap perekonomian wilayah sekitarnya melalui saluran yang beraneka ragam pula. Pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang industri-industri yang akan memancarkan berbagai bentuk keuntungan (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya berupa permintaan hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya sehingga perekonomian wilayah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi akan ikut berkembang.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merupakan daerah maju akan memberikan dua jenis efek ekonomi yang langsung terhadap wilayah sekitarnya yakni efek yang menyenangkan dan efek yang tidak menyenangkan. Efek yang dikemukakan pertama adalah efek menyebar ke bawah (*trickling down effect*) yaitu meningkatnya pembelian hasil-hasil produksi dan terserapnya tenaga kerja menganggur dari wilayah sekitar oleh industri-industri yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan efek yang tidak menyenangkan adalah efek polarisasi (*polarization effect*) yakni semakin lemahnya daya saing industri-industri yang ada di wilayah sekitar terhadap industri yang serupa di pusat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya penghematan aglomerasi.

Program penanggulangi kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah secara

nasional maupun di tingkah daerah. Pemerintah telah melakukan beberapa program secara nasional maupun daerah, antara lain: 1) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) melalui bantuan modal; 2) Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); 3) Program dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE); 4) P2MPD; 5) PPK; 6) Program PNPM mandiri Pedesaan; 7) P2KP; 8) Program RLH (Rumah Layak Huni); 9) Program UMKM; 10) BLT (Bantuan Langsung Tunai); 11) BOS (Bantuan Operasional Sekolah); 12) Program Raskin; 13) OPRM (Operasi Pangan Riau Makmur); 14) Program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2i).

Terkait dengan beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan untuk mencapai visi Indonesia tahun 2020 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin (Kompasiana, 2012). Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan (Kompasiana, 2012).

Terkait dengan penanggulangi penurunan jumlah keluarga miskin, pada Gambar 3 disajikan model penurunan jumlah keluarga miskin melalui pendekatan lintas sektoral. Komponen yang terlibat dalam rangka penurunan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) hukum dan pertahanan termasuk kesadaran masyarakat yang bermuara kepada rasa aman dan keamanan; 2) pembangunan politik dalam masyarakat yang dimulai dari bangku sekolah yang bermuara kepada kecintaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia; 3) pembangunan budaya termasuk melestarikan kebudayaan lokal yang targetnya kepada pembentukan manusia berkarakter; 4) pembangunan sosial yang bermuara kepada rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat; 5) pembangunan ekonomi dan memacu pertumbuhan yang stabil dan kesejahteraan masyarakat; 6) pembangunan

pelayan dasar yang menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas dan mempunyai jiwa kewirausahaan.

Pelakanaan program tersebut seharusnya melibatkan semua komponen, antara lain: pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, dan perguruan tinggi. Program penanggulangi kemiskinan bukan berarti menghabiskan orang miskin, melainkan program tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar keluarga miskin tersebut. Bagi keluarga miskin kebutuhan dasar terpenuhi dan kebutuhan pokok tidak mem beratkan beban keluarga, maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Untuk itu program penanggulangi kemiskinan harus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha sebagai sumber pendapatan bagi keluarga miskin. Secara umum keluarga miskin memang sulit untuk ditingkatkan kesejahteraanya, hal tersebut terkait dengan kepemilikan faktor produksi seperti tidak punya lahan sebagai tempat berusaha, kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, tidak punya keahlian dalam berusaha, dan keluarga miskin hanya memiliki sumberdaya manusia yang kualitasnya rendah atau hanya sebatas tenaga kerja tidak terdidik.

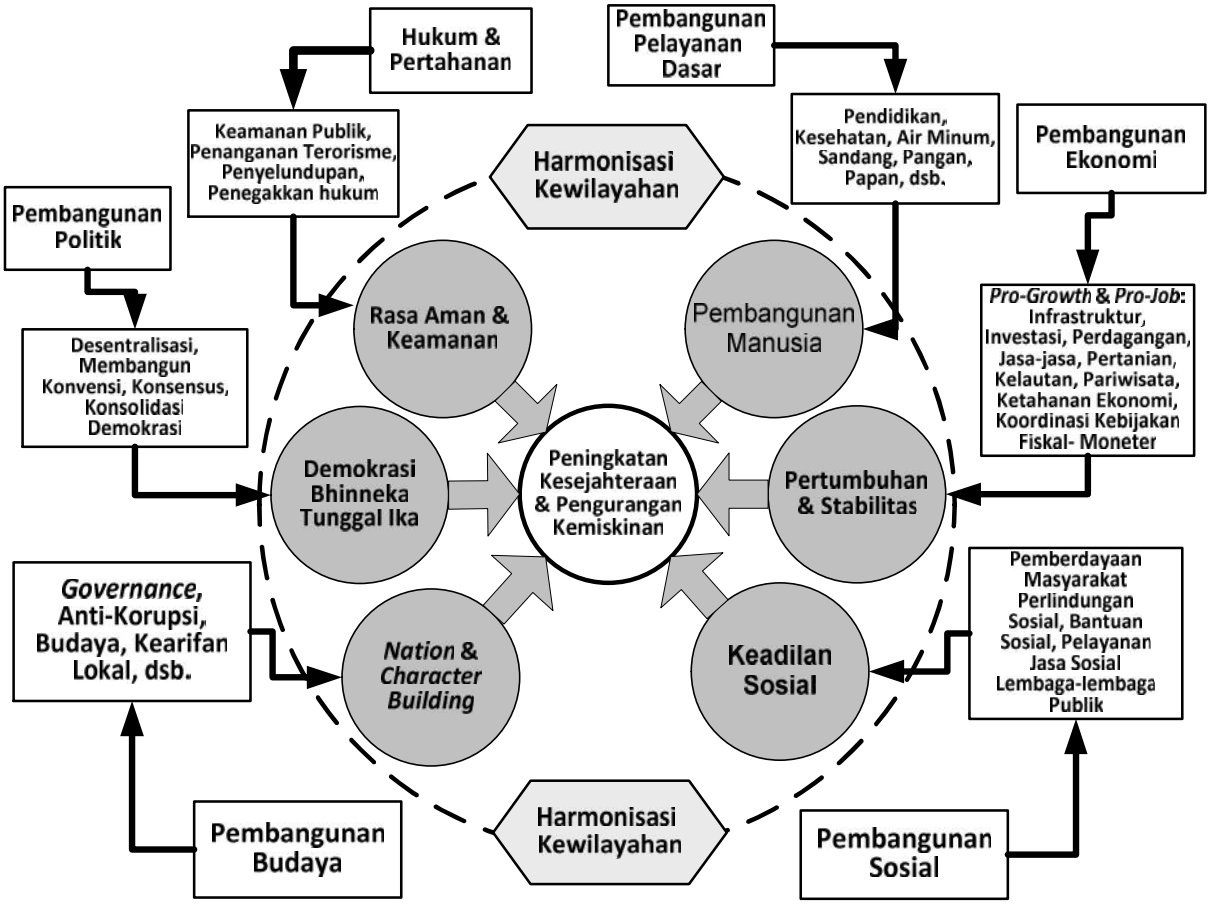


**Gambar 3**
**Model Penurunan Jumlah Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Lintas Sektoral di Wilayah Pesisir**
**Sumber: TNP2K, 2012, telah dimodifikasi**

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu proyek pembangunan adalah peningkatan dan pemeratan pendapatan. Pengertian pemerataan pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan ini umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Kalau ditelaah lebih lanjut tentang sasaran pembangunan yakni pemerataan pembangunan masih merupakan tanda tanya yang patut dikaji terutama bila dikaitkan dengan aspek spasialnya. Apakah dengan semakin tumbuh dan berkembangnya investasi swasta yang ditandai dengan semakin pesatnya penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan memperkecil disparitas spasial ?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut tidak, jelas yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang dan *spread effect* serta *strikling down effect* (banyaknya bahan baku dari daerah yang belum berkembang yang dapat dipasarkan ke daerah yang telah berkembang karena kebutuhan di daerah tersebut meningkat) yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan tidak diminati oleh investor. Adanya hal-hal yang dikemukakan di atas mendorong keharusan adanya *government intervention* (campur tangan pemerintah) untuk mengurangi tingkat *Regional Inequalities* tersebut.

Memacu ekonomi di daerah tertinggal perlu juga membuka peluang pasar bagi produk pedesaan terutam untuk sektor pertanian. Selama ini pemasaran produk pertanian di pedesaan menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, antara lain: 1) kesinambungan produksi; 2) kurang memadainya pasar; 3) panjangnya saluran pemasaran; 4) rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5) berfluktuasinya harga; 6) kurang tersedianya informasi pasar; 7) kurang jelasnya jaringan pemasaran; 8) rendahnya kualitas produksi; dan 9) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Syahza. A dan Henny, 2010).

Seperti yang diungkapkan Tobari dan Budi Dharmawan (2004). Pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor harus mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari setiap wilayah, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi pada wilayah tersebut. Pembangunan dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah. Pembangunan wilayah melalui pendekatan sektor pertanian harus mampu memanfaatkan keunggulan komparatif setiap wilayah yang berbeda. Dengan perbedaan keunggulan komparatif tersebut akan menyebabkan masing-masing daerah mempunyai cara pengembangan potensinya. Potensi yang dimiliki tersebut merupakan sektor basis yang mempunyai nilai tambah tinggi jika dikembangkan secara agribisnis.

**Peluang untuk diteliti kembali**

Apabila diamati pembangunan di Daerah Riau yang terjadi selama ini, adalah *polarization effect*, seperti terjadinya urbanisasi oleh tenaga kerja pedesaan, pemusatan industri pengolahan di daerah perkotaan. Sementara *spread effect* serta *strikling down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi, seperti tidak berminatnya investor melakukan investasi di daerah pedesaan (sumber bahan baku). Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan kurang diminati oleh investor.

Supaya terjadi *spread effect* serta *strikling down effect* yang diharapkan di pedesaan untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan nilai tambah komoditi lokal di pedesaan maka sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan pedesaan. Untuk melahirkan kebijakan tersebut sangat diperlukan penelitian lebih lanjut yang sangat komprehensif. Penelitian tersebut terkait dengan pendekatan lintas sektoral pedesaan, antara lain: pembangunan ekonomi, pembangunan budaya, pembangunan sosial, pembangunan politi, pembangunan pelayan dasar, dan pembangunan politik serta pertahanan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *hinterland* KEK Batam, diperlukan arah pengembangan antara lain memperkuat fungsi Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infra struktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Meranti itu sendiri.

Strategi untuk mengurangi jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan melalui kegiatan, antara lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesehatan, pendidikan, kelembagaan ekonomi dan non-ekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan.

Program yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi kemiskinan tertuju kepada lima kegiatan, antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Pengembangan daerah pedesaan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti hendaknya dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral, antara lain: 1) pendekatan hukum dan pertahanan termasuk kesadaran masyarakat yang bermuara kepada rasa aman dan keamanan; 2) pembangunan politik dalam masyarakat yang dimulai dari bangku sekolah yang bermuara kepada kecintaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia; 3) pembangunan budaya termasuk melestarikan kebudayaan lokal yang targetnya kepada pembentukan manusia berkarakter; 4) pembangunan sosial yang bermuara kepada rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat; 5) pembangunan ekonomi dan memacu pertumbuhan yang stabil dan kesejahteraan masyarakat; 6) pembangunan pelayan dasar yang menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas dan mempunyai jiwa kewirausahaan

**DAFTAR PUSTAKA**


Alim. MK, 2007, Negara vs Kemiskinan Di Pedesaan, *http://uploadoverload.blogs.-friendster.com*, 10 Agustus 2013.

Bappenas. 2004. Pokja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Komite Penanggulangan Kemiskinan, *https://openlibrary.org/publishers*, diakses 15 April 2013.

Basri. M,. 2007. *Desa dan Kemiskinannya,* http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/30/Jabar/11719.htm, diakses 31 Maret 2012.

Edy, L. 2009. 28 Desa Tertinggal Dapat Penghargaan Presiden RI, *http://ads2. kompas.com/kpdt/index.php/news*,diakses 23 Januari 2013.

Kompasiana, 2012., Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kemiskinan, *http:// ekonomi.kompasiana.com/moneter/*, diakses 18 Oktober 2012.

Kusnandar., D W. Padmaningrum, W. Rahayu, dan A. Wibowo., 2013. Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 92-101. Fakultas Ekonomi Muhammadyah Surakarta, Surakarta.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2012., *Data Statistik Otonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*, Pemda kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang.

Pemberdayaan., 2009, Konsep Pemberdayaan, Membantu Masyarakat Agar Bisa Menolong Diri Sendiri, *http://www. pemberdayaan.com/pembangunan*, diakses 4 April 2013.

Kastaman. R., 2007, Upaya Peningkatan Pendapatan Petani yang Maksimal Melalui Pengaturan Pola Pemilihan Komoditi Model Sinergi. *Jurnal Sosiohumaniora* 9(3): 211-225. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Suhendra. I., 2010, Faktor Penentu Investasi Swasta di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi* 15: 131-150. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Sumaryo., 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tingkat Keberdayaan Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(2): 272-280. Fakultas Ekonomi Muhammadyah Surakarta, Surakarta.

Suyono. H. 2007. Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat. (On-line). *http://www.hupelita.com/baca.php?id=275 11*, diakses pada 31 Juli 2012.

Sahdan. G. 2009. Menanggulangi Kemiskinan Desa, *http://www.ekonomirakyat.org,* diakses 6 Desember 2013

Syahza, A. 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau. *Jurnal Ekonomi* 10: 220-231. PPD dan I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

----------., 2007. Percepatan Pemberdayaan Ekonmomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi* 12:106-118. PPD dan I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

----------., 2008, Model Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan. *JurnalEkonomi* 13: 60-70, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

----------., 2013. *Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir* (Penelitian Fundamental Tahun II), Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.

----------., 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 126-139. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syahza, A dan Suarman., 2008, Pemasaran Produk Pertanian Melalui Koperasi Berbasis Agribisnis. *Jurnal Sorot* 3(1): 9-

20. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Syahza, A dan I. Henny., 2010. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan. *Jurnal Sosiohumaniora* 12(3): 207-220. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Syamsuar. 2010. Harapan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.

Tobari., dan B, Dharmawan. 2004. Profil Pengembangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Pedesaan* 4(2): 129-137. Lembaga Penelitian Universitas Soedirman Purwokerto.

TNP2K. 2012. Program Penanggulangi Kemiskinan di Indonesia, *http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas*, diakses 17 Mei 2013.

Zainal. R, 2010., Menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Hiterland Free Trade Zone Batam, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.

**Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan** **ISSN 1411 - 0393**
**Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012**

# STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI JAWA TIMUR

**Hakim Miftakhul Huda**
*hamihud@yahoo.co.id*
**Yeti Lis Purnamadewi**
**Muhammad Firdaus**
**Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) dan Institut Pertanian Bogor (IPB)**

***ABSTRACT***

*Fisheries subsector in East Java has big potential not only in marine and inland fisheries, but also in fish processing. But the fisheries development so far has not contributed significantly in the economy sector in East Java. Development of an integrated fishery is expected to provide bigger contribution to regional economic development in East Java. This study aims to determine the strategy of fisheries development in East Java based on sectoral and spatial approach. Analysis of the data used is the descriptive analysis, the shift share analysis and the analysis of input-output tables. Marine fisheries subsector contributes biggest value added if it is compared with others subsectors, such as inland fisheries and fish processing subsectors. The results showed that the fish processing has advantages in the formation of the output, increasing revenue and creating job opportunity also including sub-sector that has big potential to be developed in East Java. Spatially fisheries development priorities should be focused on competitive and specialized area such as Lamongan, Banyuwangi, Pamekasan, Trenggalek, and Pacitan also supported by area that only competitive advantage or specialized.*

*Key words: competitive advantage, fisheries, input-output, shift-share analysis*

**ABSTRAK**

Subsektor perikanan di Jawa Timur mempunyai potensi yang besar baik perikanan laut, darat maupun pengolahan ikan. Namun pengembangan perikanan sejauh ini belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian di Jawa Timur. Pengembangan perikanan secara terintegrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi wilayah di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menentukan strategi pengembangan perikanan di Jawa Timur berdasarkan pendekatan sektoral dan spasial. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, shift share analysis dan analisis tabel input output. Subsektor perikanan laut memberikan kontribusi nilai tambah perikanan terbesar dibandingkan subsektor perikanan darat dan pengolahan ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan ikan mempunyai indeks daya penyebaran yang tinggi, keunggulan dalam pembentukan output, peningkatan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja serta termasuk subsektor yang berpotensi besar untuk dikembangkan di Jawa Timur. Prioritas pengembangan perikanan secara spasial sebaiknya difokuskan pada daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi subsektor perikanan yaitu Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, Pamekasan, Trenggalek dan Pacitan serta didukung oleh daerah yang hanya unggul secara kompetitif atau spesialisasi.

Kata kunci : keunggulan kompetitif, perikanan, input-output, analisis *shift-share*

## PENDAHULUAN

Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata Jawa Timur sebagian besar terkonsentrasi dalam koridor Utara Selatan yang merupakan pusat-pusat perekonomian di Jawa Timur (Arifin, 2009). Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung

secara terus menerus dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Jawa Timur juga terdapat ketimpangan yang tinggi antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebagian besar kabupaten/kota mempunyai nilai PDRB per kapita yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hanya terdapat delapan kabupaten/kota yang mempunyai nilai PDRB per kapita diatas rata-rata Jawa Timur (BPS, 2013). Pada sisi yang lain, daerah yang pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya dibawah rata-rata Jawa Timur merupakan penghasil sumberdaya perikanan utama di Jawa Timur seperti Kabupaten Banyuwangi, Sumenep, Trenggalek dan Pacitan. Perbedaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, teknologi, iklim usaha dan infrastruktur dapat mempengaruhi peluang daerah untuk tumbuh dan berkembang (Arifien *et al*., 2012; Mardiantony dan Ciptomulyono, 2012; Permana dan Asmara, 2010; Prawira dan Hamidi, 2013).

Provinsi Jawa Timur mempunyai daratan seluas 47.220 km$^2$ dan laut seluas 75.700 km$^2$ dengan panjang pantai 2.128 km. Topografi Jawa Timur bagian selatan didominasi oleh pegunungan yang membentang dari barat sampai timur, sedangkan bagian utara terdiri dari dataran rendah yang relatif landai. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki menempatkan sektor pertanian yang didalamnya terdapat subsektor perikanan menjadi kontributor PDRB terbesar ketiga di Jawa Timur setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian dimana subsektor perikanan termasuk di dalamnya merupakan sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja yaitu sebesar 7.472.200 jiwa atau 39% dari total angkatan kerja pada tahun 2012 (BPS, 2013).

Dalam skala nasional, Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 masih menjadi kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan nasional dengan kontribusi sebesar 11,98% (KKP, 2013). Dalam segi permintaan, ikan menjadi faktor penyelamat bagi ketahanan pangan di kebanyakan negara di Asia karena harganya yang relatif lebih murah daripada daging, telur dan ayam. Pada sisi yang lain, saat ini terjadi tren pergeseran paradigma dan gaya hidup dari konsumsi daging merah (*red meat*) ke daging putih/ ikan (*white meat*) yang dianggap lebih aman bagi kesehatan (Susilowati, 2006).

Potensi sumberdaya perikanan di Jawa Timur masih cukup besar, khususnya untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap laut yang berada di selatan Provinsi Jawa Timur. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap laut di selatan Jawa Timur pada tahun 2012 baru mencapai 77,95% dari potensi pemanfaatan lestari. Pada bidang perikanan budidaya, tingkat pemanfaatan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya di Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2012 masih mencapai 22,03% dari luas lahan yang berpotensi untuk kegiatan perikanan budidaya. Potensi pengembangan perikanan budidaya belum dilakukan secara optimal. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya diantaranya adalah usaha budidaya dianggap sebagai usaha sampingan, kesulitan pemasaran dan kesalahan alokasi program bantuan (Fejika PI *et al*., 2007; Wahyuni *et al*., 2013).

Usaha produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian. Produksi ikan cenderung dikonsumsi dalam kondisi segar dengan perlakuan yang minim sehingga nilai tambah yang diperoleh belum maksimal. Pada sisi yang lain, industri pengolahan ikan mampu meningkatkan nilai tambah perikanan dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dengan besaran upah yang menjadi faktor utama (Budiawan, 2013; Sholeh, 2005).

Pembangunan subsektor perikanan di Provinsi Jawa Timur, kedepannya diharapkan dapat menjadi sektor strategis untuk meningkatkan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan peranan dan

keterkaitan dengan sektor-sektor lain dalam internal wilayah. Keterkaitan subsektor perikanan harus ditingkatkan agar mampu menarik sektor-sektor di hulunya (sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang) dan mendorong sektor-sektor di hilirnya (sektor yang memiliki keterkaitan ke depan). Semakin kuat keterkaitan subsektor perikanan dengan sektor-sektor lain, akan semakin besar pula pengaruhnya dalam perkembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan menentukan strategi pengembangan perikanan di Jawa Timur berdasarkan pendekatan sektoral dan spasial.

## TINJAUAN TEORETIS

Komponen penting dalam pengembangan wilayah adalah keterpaduan sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Dalam pandangan sistem industri, keterpaduan sektoral berarti keterpaduan sistem input dan output industri yang efisien dan sinergis. Oleh karena itu, pengembangan wilayah ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi *et al.*, 2011).

Teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*) yang diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955 menyebutkan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage*. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, berproduksi dalam waktu relatif singkat dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian (Tarigan, 2005).

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries* (Sjafrizal, 2008).

Setelah berlakunya otonomi daerah, setiap daerah memiliki independensi dalam menetapkan sektor atau komoditi yang akan menjadi prioritas pengembangan. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan ataupun kelemahan diwilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2005).

Salah satu konsep pengembangan wilayah berbasiskan sumberdaya alam adalah konsep agropolitan yang merupakan paradigma pembangunan yang terintegrasi pada suatu wilayah tertentu yang berbasis sektor pertanian dalam pengertian *on-farm* dan *off-farm* dan segala penunjangnya. Dalam implementasi wilayah agropolitan hendaknya mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi, lingkungan dan sosial untuk membentuk (1) pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) kenaikan pendapatan; (3) perbaik-an distribusi pendapatan; (4) peningkatan aliran komoditi, barang, jasa dan modal; (5) peningkatan kualitas sumberdaya alam dan

lingkungan; serta (6) perbaikan fungsi dan efektifitas kelembagaan pemerintah maupun sosial di dalam wilayah (Nugroho, 2008).

Strategi pembangunan dengan basis sumber daya alam dapat pulih (seperti sektor perikanan) merupakan suatu hal yang tepat dikembangkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan (1) potensi sumber daya Indonesia yang sangat besar; (2) keterkaitan industri hulu (*backward-linkages* industri) dan keterkaitan industri hilir (*forward-linkages industries*) yang kuat dan diharapkan dapat menciptakan efek ganda (*multiplier efects*) yang besar; (3) penyerapan tenaga kerja yang besar; (4) dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang dapat pulih bisa dan biasanya berlangsung di daerah perdesaan; (5) karena bersifat dapat pulih, maka bisa mewujudkan pola pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dahuri, 2002).

**Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai pengembangan ekonomi wilayah terutama pada sektor perikanan telah banyak dilakukan pada beberapa daerah di Indonesia baik dalam lingkup kabupaten/kota ataupun provinsi. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi sektor unggulan dalam pengembangan wilayah karena memiliki nilai keterkaitan dan dampak pengganda yang kecil (Hendarto, 2010; Panggabean, 2013; Putra, 2011; Susanto, 2011; Syarief, 2013).

Dault *et al*. (2008) melakukan penelitian mengenai peran sektor perikanan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan otonomi daerah berdampak terhadap menurunnya permintaan, penawaran, output, nilai tambah dan neraca perdagangan pada sektor perikanan di Jawa Tengah.

Miradani (2010) melakukan penelitian mengenai analisis perencanaan pembangunan agroindustri Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan berdasarkan analisis keterkaitan dan angka pengganda tabel input output *updating* tahun 2008 adalah (1) sektor pemotongan hewan, (2) pengolahan dan pengawetan ikan dan biota dan (3) beras. Berdasarkan analisis LQ dan SSA diketahui bahwa sentra pengolahan ikan dan biota terdapat di Banyuwangi, Lamongan dan Tuban.

Hasil penelitian Arifin (2006) menyebutkan bahwa lokasi industri manufaktur berbasis perikanan di Jawa Timur cenderung terkonsentrasi di Kabupaten Banyuwangi, Pasuruan, Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Pertumbuhan industri perikanan di Jawa Timur tidak merata antar daerah. Di beberapa kabupaten/kota mengalami kepadatan industri yang tinggi, sementara sebagian yang lain justru mengalami tingkat kepadatan yang rendah.

**METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi Tabel I-O Provinsi Jawa Timur tahun 2010 yang terdiri dari 110 sektor, PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012, statistik perikanan Jawa Timur tahun 2012. Pendekatan analisis data dilakukan melalui deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, *Input-Output* (I-O), dan *Shift share analysis* (SSA).

**Analisis Input-Output**

Tabel Input Output (I-O) pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor lainnya, dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Penggunaan Tabel I-O dapat melihat bagaimana output dari suatu sektor ekonomi didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor memperoleh input yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya.

Analisis yang dilakukan terhadap Tabel I-O adalah analisis keterkaitan dan angka pengganda sektoral. Hasil perhitungan ini menghasilkan koefisien teknis (matriks A) dan invers matriks Leontief (matriks B) yang selanjutnya diolah kembali sehingga diperoleh data mengenai keterkaitan sektoral dan angka pengganda (*multiplier*). Koefisien teknologi sebagai parameter yang paling utama dalam analisis I-O secara matematis diformulasikan sebagai rumus berikut:

$$a_{ij} = \frac{x_i}{x_j} \text{ atau } x_{ij} = a_{ij}.X_j \quad (1)$$

dimana:

$a_{ij}$ : rasio antara banyaknya output sektor $i$ yang digunakan sebagai input sektor $j$ ($x_{ij}$) terhadap total input sektor $j$ ($X_j$) atau disebut pula sebagai koefisien input.

Beberapa parameter teknis yang dapat diperoleh melalui analisis I-O adalah sebagai berikut (Rustiadi *et al.*, 2011).

1. Keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkage*) (DBL) yang menunjukkan efek permintaan suatu sektor terhadap perubahan tingkat produksi sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut secara langsung.

   $$B_j = \sum_i^n a_j \quad (2)$$

   Untuk mengukur secara relatif (perbandingan dengan sektor lainnya) terdapat ukuran *normalized* yang merupakan rasio antara kaitan langsung ke belakang sektor $j$ dengan rata-rata *backward link-age* sektor-sektor lainnya.

   $$B_j^* = \frac{B_j}{\frac{1}{n}\sum_j B_j} = \frac{n.B_j}{\sum_j B_j} \quad (3)$$

   Nilai $B^*_j > 1$ menunjukkan bahwa sektor $j$ memiliki keterkaitan ke belakang yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam memenuhi turunan permintaan yang ditimbulkan oleh sektor ini.

2. Keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage*) (DFL) yang menunjukkan banyaknya output suatu sektor yang dipakai oleh sektor-sektor lain.

   $$F_i = \sum_j^n \frac{X_{ij}}{X_j} = \sum_j a_{ij} \quad (4)$$

   Untuk mengukur secara relatif (perbandingan dengan sektor lainnya) terdapat ukuran *normalized* yang merupakan rasio antara kaitan langsung ke depan sektor $i$ dengan rata-rata *forward linkage* sektor-sektor lainnya. *Normalized* $F_i$ atau $F_i^*$ dirumuskan sebagai berikut:

   $$F_i^* = \frac{F_i}{\frac{1}{n}\sum_i F_i} = \frac{nF_i}{\sum_i F_i} \quad (5)$$

   Nilai $F_i^* > 1$ menunjukkan bahwa sektor $i$ memiliki keterkaitan ke depan yang kuat terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dalam suatu wilayah.

3. Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (*direct indirect backward linkage*) (DIBL) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung dari kenaikan permintaan akhir satu unit sektor tertentu yang dapat meningkatkan total output seluruh sektor perekonomian.

   $$B_j = \sum_i b_j \quad (6)$$

   di mana $b_{ij}$ adalah elemen-elemen matriks B atau $(I-A)^{-1}$ yang merupakan matriks Leontief.

4. Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (*direct indirect forward linkage*) (DIFL), yaitu peranan suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir dari seluruh sektor perekonomian.

   $$FL_i = \sum_j b_{ij} \quad (7)$$

5. Indeks daya penyebaran (*backward linkages effect ratio*) (IDP) yang menunjukkan kekuatan relatif permintaan akhir suatu sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian.

   $$\beta_i = \frac{\sum_i b_j}{\frac{1}{n}\sum_i \sum_j b_j} = \frac{n\sum_i b_j}{\sum_i \sum_j b_j} \quad (8)$$

   Besaran nilai $\beta_i$ dapat mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Bila = 1, hal tersebut berarti bahwa daya penyebaran sektor $j$ sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.

   Nilai $\beta_i > 1$ menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor $j$ berada di atas

rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya nilai $\beta_i < 1$ menunjukkan daya penyebaran sektor *j* lebih rendah dari rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.

6. Indeks derajat kepekaan (*forward linkages effect ratio*) (IDK) menjelaskan pembentukan output di suatu sektor yang dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian. Ukuran ini digunakan untuk melihat keterkaitan kedepan (*forward linkage*).

$$\propto_i = \frac{\sum_j b_j}{\frac{1}{n}\sum_i \sum_j b_j} \quad (9)$$

Nilai $\alpha_i > 1$ menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor *i* lebih tinggi dari rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi, dan sebaliknya $\alpha_i < 1$ menunjukkan derajat kepekaan sektor *i* lebih rendah dari rata-rata seluruh sektor ekonomi.

7. *Multiplier* adalah koefisien yang menyatakan kelipatan dampak langsung dan tidak langsung dari meningkatnya permintaan akhir suatu sektor sebesar satu unit terhadap produksi total semua sektor ekonomi suatu wilayah.
   a. *Output multiplier* (OM), merupakan dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap total output seluruh sektor di suatu wilayah.
   b. *Total value added multiplier* (VAM) atau PDRB multiplier adalah dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan PDRB.

      $V = \hat{\upsilon}X \quad (10)$

      dimana:

      V : matriks NTB

      $\hat{\upsilon}$ : matriks diagonal koefisien NTB

      X : matriks output, $X = (I-A)^{-1}.F^d$
   c. *Income multiplier* (IM), yaitu dampak meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga di suatu wilayah secara keseluruhan.

      $W = \hat{w}X \quad (11)$

      dimana:

      W : matriks *income*

      $\hat{w}$ : matriks diagonal koefisien *income*

      X : matriks output, $X = (I-A)^{-1}.F^d$

***Shift Share Analysis* (SSA)**

*Shift Share Analysis* (SSA) digunakan untuk memahami pergeseran struktur aktifitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan daerah agregat yang lebih luas. Hasil analisis *shift-share* menjelaskan kinerja (*performance*) suatu aktifitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya dalam wilayah total. Analisis *shift-share* mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktifitas di suatu wilayah (Panuju dan Rustiadi, 2005). Herzog dan Olsen (1977) menyebutkan persamaan SSA sebagai berikut:

$$d_{ij} = g_{ij} + m_{ij} + c_{ij} \quad (12)$$

$$d_{ij} = E_{ij(t0)}\, r_P + E_{ij(t0)}\,(r_{i,p} - r_P) + E_{ij(t0)}\,(r_{ij} - r_{i,p}) \quad (13)$$

dimana:

$$r_{ij} = (E_{ij(t1)} - E_{ij(t0)})/E_{ij(t0)} \quad (14)$$

$$r_{i,p} = (E_{ip(t1)} - E_{ip(t0)})/E_{ip(t0)} \quad (15)$$

$$r_P = (E_{p(t1)} - E_{p(t0)})/E_{p(t0)} \quad (16)$$

keterangan:

$d_{ij}$ : *total shift*

$g_{ij}$ : komponen *share*

$m_{ij}$ : komponen *proportional shift*

$c_{ij}$ : komponen *differential shift*

$E_{ij}$ : nilai PDRB subsektor perikanan dalam kabupaten/kota j di Provinsi Jawa Timur

$E_{ip}$ : nilai PDRB subsektor perikanan di Provinsi Jawa Timur

$E_p$ : nilai total PDRB Provinsi JawaTimur

$r_{ij}$ : laju pertumbuhan subsektor perikanan di kabupaten/kota j di Jawa Timur

$r_{i,p}$ : laju pertumbuhan subsektor perikanan di Provinsi Jawa Timur

t1 : titik tahun akhir

t0 : titik tahun awal

SSA mampu menjelaskan kinerja suatu aktivitas atau sektor di suatu wilayah dan membandingkannya dengan wilayah total serta menggambarkan sebab terjadinya pertumbuhan aktivitas di suatu wilayah. Sebab

terjadinya perubahan aktivitas dapat dibagi tiga yaitu: (1) sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah), (2) sebab dari dinamika aktivitas/sektor dari total wilayah, dan (3) sebab dari dinamika wilayah secara umum. Kinerja perubahan aktivitas/sektor dapat dilihat dari komponen analisis SSA yaitu: (1) komponen laju pertumbuhan total (*total shift*), yang menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah, (2) komponen pergeseran proporsional (*pro-portional shift*), menunjukkan pertumbuhan total aktivitas atau sektor tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor atau aktivitas total wilayah, dan (3) komponen pergeseran diferensial (*differential shift*), menjelaskan tingkat *competitiveness* suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor atau aktivitas tersebut dalam wilayah (Dinc dan Haynes, 1999; Panuju dan Rustiadi, 2005).

Berdasarkan ketiga komponen pertumbuhan wilayah tersebut dapat ditentukan dan diidentifikasi perkembangan suatu sektor ekonomi pada suatu wilayah. Apabila komponen pergeseran proporsional ditambah dengan komponen pergeseran diferensial ≥ 0 maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ke i di wilayah ke j termasuk ke dalam kelompok progresif (maju). Sementara itu, jika komponen pergeseran proporsional ditambah dengan komponen pergeseran diferensial < 0 menunjukan bahwa pertumbuhan sektor ke i pada wilayah ke j tergolong pertumbuhannya lambat. Suatu sektor disebut maju jika perkembangan sektor tersebut pada periode berikutnya dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya, dan sebaliknya yang dimaksud dengan sektor yang lambat adalah perkembangan sektor tersebut pada periode selanjutnya dinilai lebih buruk dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya (Priyarsono *et al*., 2007).

Esteban-Marquillass (1972) berusaha mengatasi satu kelemahan dari analisis *shift-share* klasik, yaitu masalah pembobotan yang dijumpai sebagai pengaruh persaingan sebagai komponen ketiga. Melalui analisis *shift-share* modifikasi Esteban-Marquilas dapat dideteksi sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada suatu wilayah (Esteban, 2000). Modifikasi yang dilakukan oleh Esteban-Marquillas (1972) ini mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif ($c_{ij}$) dari teknik *shift-share* klasik sehingga mengandung unsur baru $E^*_{ij}$, yang didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah ($E_{ij}$), bila struktur wilayah sama dengan struktur nasional atau $E_{ij(t0)} = E^*_{ij(t0)}$ maka $E^*_{ij(t0)}$ dirumuskan menjadi:

$$E^*_{ij(t0)} = E_{j(t0)} (E_{i,p(t0)}/E_{p(t0)}) \quad (17)$$

Apabila $E_{ij(t0)}$ diganti dengan $E^*_{ij(t0)}$ maka persamaan

$$c_{ij} = E_{ij(t0)} (r_{ij} - r_{i,p}) \quad (18)$$

dapat pula diganti menjadi

$$c^*_{ij} = E^*_{ij(t0)} (r_{ij} - r_{i,p}) \quad (19)$$

keterangan:

$c_{ij}$ : Perubahan PDRB subsektor perikanan di kabupaten/kota j di Jawa Timur yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor (subsektor)

$E_j$ : Total PDRB di kabupaten/kota j di Jawa Timur

Pengaruh efek alokasi (*allocation effect*) yang belum dijelaskan pada SSA klasik dapat diperoleh melalui SSA modifikasi Esteban-Marquillass dengan persamaan berikut (Herzog dan Olsen, 1977):

$$a_{ij} = (E_{ij(t0)} - E^*_{ij(t0)}) (r_{ij} - r_{i,p}) \quad (20)$$

dimana :

$a_{ij}$ : efek alokasi subsektor perikanan di Kabupaten/kota j di Jawa Timur

$(E_{ij(t0)} - E^*_{ij(t0)})$ : tingkat spesialisasi subsektor perikanan di kabupaten/kota j di Jawa Timur

$(r_{ij} - r_{i,p})$ : tingkat keunggulan kompetitif sub sektor perikanan di kabupaten/kota j di Jawa Timur

**Tabel 1**
**Kemungkinan yang Terjadi Pada Efek Alokasi hasil SSA Esteban-Marquilass**

| Kode | Kriteria | Efek Alokasi ($a_{ij}$) | Komponen | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Spesialisasi ($E_{ij(t0)}-E^*_{ij(t0)}$) | Kompetitif ($r_{ij}-r_{i,p}$) |
| 1 | *Competitive disadvantage, specialized* | Negatif | Positif | Negatif |
| 2 | *Competitive disadvantage, not specialized* | Positif | Negatif | Negatif |
| 3 | *Competitive advantage, not specialized* | Negatif | Negatif | Positif |
| 4 | *Competitive advantage, specialized* | Positif | Positif | Positif |

**Sumber : Herzog dan Olsen, 1977**

Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan SSA Esteban-Marquillass dapat dilihat pada tabel 1.

Analisis SSA dalam penelitian ini menggunakan obyek data PDRB subsektor perikanan atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Periode tahun yang dipilih dalam analisis SSA adalah tahun 2008 dan 2012 sehingga dapat diketahui bagaimana pertumbuhan aktifitas subsektor perikanan pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil analisis mampu memetakan kabupaten/kota mana saja yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada subsektor perikanan di Jawa Timur.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Profil Perikanan Jawa Timur

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kawasan laut hampir empat kali luas daratannya dengan garis pantai kurang lebih 2.916 km. Subsektor perikanan dapat dikelompokkan menjadi perikanan *on-farm* dan perikanan *off-farm*. Perikanan *on-farm* terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat, sedangkan perikanan *off-farm* terdiri dari pengolahan ikan. Perikanan *on-farm* merupakan kegiatan produksi perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi budidaya laut, budidaya tambak dan perikanan tangkap laut sedangkan perikanan darat meliputi penangkapan ikan perairan umum, budidaya kolam, budidaya jaring apung, budidaya minapadi, budidaya sawah tambak dan budidaya karamba. Pengolahan ikan merupakan kegiatan pasca produksi yang meliputi pengalengan, pembekuan, penggaraman, pemindangan, pengasapan, fermentasi, pereduksian dan pelumatan.

Kegiatan perikanan tangkap laut membutuhkan infrastruktur tempat pendaratan atau pelabuhan perikanan guna mendukung kegiatan usaha perikanan tangkap. Tipe pelabuhan paling besar yang ada di Jawa Timur adalah pelabuhan tipe B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). PPN di Jawa Timur ada dua yaitu PPN Brondong di Kabupaten Lamongan dan PPN Prigi di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pelabuhan tipe C atau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Jawa Timur berjumlah enam, yaitu: PPP Lekok di Kabupaten Pasuruan, PPP Mayangan di Kota Probolinggo, PPP Muncar di Banyuwangi, PPP Paiton di Kabupaten Probolinggo, PPP Pondokdadap di Kabupaten Malang serta PPP Puger di Kabupaten Jember. Disamping itu juga terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di semua kota/kabupaten yang memiliki pesisir di Jawa Timur. Jumlah PPI yang terdapat di Provinsi Jawa Timur berjumlah 87 PPI (KKP, 2013). Kegiatan perikanan tangkap laut di Jawa Timur dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu pantai utara jawa dan pantai selatan jawa. Wilayah yang termasuk pantai utara Jawa adalah Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Wilayah pantai selatan Jawa meliputi

Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Besarnya potensi perikanan tangkap di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 2.

Jumlah alat tangkap di Jawa Timur sebanyak 171.502 unit yang terdiri dari 143.019 unit alat tangkap di laut dan 28.483 unit alat tangkap di perairan umum daratan. Unit penangkapan ikan di Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, pancing, perangkap, alat pengumpul kerang, alat pengumpul rumput laut dan lain-lain. Pukat kantong yang ada di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi payang, dogol dan pukat pantai, sedangkan jaring insang terbagi menjadi jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang tetap dan jaring tiga lapis (*trammel net*). Jaring angkat yang ada di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi bagan perahu/rakit, bagan tancap, serok, dan jaring angkat lainnya. Pancing terbagi menjadi rawai hanyut lain selain rawai tuna, rawai tetap, pancing tonda dan pancing lainnya, sedangkan perangkap dibagi menjadi bubu dan perangkap lainnya. Alat pengumpul terbagi menjadi alat pengumpul kerang. Alat tangkap lainnya terbagi menjadi jala, tombak dan sebagainya.

Jumlah nelayan di Jawa Timur mencapai 251.849 orang. Sebaran nelayan di pantai utara Jawa Timur terbanyak terdapat di Kabupaten Sumenep sebanyak 40,015 orang (18%), selanjutnya jumlah nelayan terbanyak di pantai Selatan Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 25.598 orang atau 11% dari jumlah nelayan di Jawa Timur.

Kegiatan usaha *on-farm* perikanan selain perikanan tangkap adalah perikanan budidaya yang meliputi tambak, laut, kolam, karamba, jaring apung, sawah tambak dan minapadi. Kegiatan budidaya perikanan ditandai dengan penebaran benih ikan yang dibudidayakan. Berdasarkan jenisnya, benih ikan berasal dari air tawar dan air laut. Benih dari air tawar meliputi ikan tawes, ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan patin, ikan hias air tawar, katak, udang galah, dan lobster air tawar. Benih dari air payau yakni ikan kerapu, ikan kakap, ikan bandeng, udang windu, udang vaname, udang putih, *gracilaria*, dan rumput laut *cottoni*.

Usaha perikanan budidaya di Jawa Timur mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 274.741 orang tenaga kerja pada tahun 2012 (Tabel 3). Jumlah terbanyak adalah pembudidaya kolam, diikuti pembudidaya laut dan tambak. Jumlah pembudidaya terbanyak terdapat di Kabupaten Sumenep sebesar 80.567 (29%) diikuti Lamongan sebesar 46.395 (16,9%). Luas areal lahan yang paling besar digunakan untuk budidaya adalah budidaya laut dimana Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten dengan luas lahan budidaya laut terluas di Jawa Timur yang mencapai 287.325 ha (99%).

**Tabel 2**
**Potensi Perikanan Tangkap di Jawa Timur tahun 2012**

| No. | Jenis Perikanan Tangkap | Jumlah Armada (unit) | Jumlah Alat Tangkap | Jumlah Nelayan (orang) | Produksi (ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laut | 55.476 | 143.019 | 226.303 | 367.921,1 |
| | Pantai Utara Jawa | 42.540 | 93.185 | 165.869 | 250.976,3 |
| | Pantai Selatan Jawa | 12.936 | 49.834 | 60.434 | 116.944,8 |
| 2 | Perairan Umum Daratan | 2.517 | 28.483 | 25.546 | 13.881,5 |
| | Jumlah | 57.993 | 171.502 | 251.849 | 381.803 |

**Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2013**

Jumlah produksi perikanan budidaya Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai 929.173,87 ton dengan kontributor terbesar dari budidaya laut yang mencapai 563.087,4 ton (61%).

Usaha pasca panen atau off-farm perikanan memanfaatkan output perikanan on-farm baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Usaha pengolahan ikan di Jawa Timur pada tahun 2011 mencapai 10.384 unit usaha (Tabel 4). Usaha pengolahan ikan terbanyak adalah penggaraman, pengasapan dan pemindangan. Berbagai usaha pengolahan ikan tersebar hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

Usaha pengolahan perikanan di Jawa Timur melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak mencapai 306.706 orang.

**Tabel 3**
**Potensi Perikanan Budidaya di Jawa Timur tahun 2012**

| No. | Jenis Budidaya | Luas Pemanfaatan Lahan (ha) | Jumlah Pelaku Usaha (orang) | Produksi (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tambak | 53.542,40 | 36.852 | 170.433,81 |
| 2 | Laut | 290.487,13 | 79.610 | 563.087,40 |
| 3 | Kolam | 3.081,65 | 104.229 | 110.269,16 |
| 4 | Karamba | 1,01 | 1.337 | 428,00 |
| 5 | Jaring apung | 253,56 | 4.007 | 11.700,50 |
| 6 | Sawah tambak | 37.096,45 | 42.125 | 66.101,70 |
| 7 | Minapadi | 4.316,74 | 6.581 | 7.153,30 |
| | Jumlah | 338.778,94 | 274.741 | 929.173,87 |

**Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2013**

**Tabel 4**
**Potensi Pengolahan Ikan di Jawa Timur tahun 2011**

| No. | Jenis Kegiatan Pengolahan | Jumlah Unit Pengolahan Ikan (unit) | Jumlah Pengolah (orang) | Produksi (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengalengan | 45 | 17.845 | 9.574 |
| 2 | Pembekuan | 190 | 60.243 | 26.803 |
| 3 | Penggaraman/Pengeringan | 2.569 | 85.685 | 121.760 |
| 4 | Pemindangan | 2.151 | 50.415 | 315.655 |
| 5 | Pengasapan/Pemanggangan | 2.365 | 17.873 | 20.923 |
| 6 | Fermentasi | 897 | 11.355 | 3.814 |
| 7 | Pereduksian | 248 | 11.803 | 1.429 |
| 8 | Surimi | 162 | 4.799 | 47 |
| 9 | Olahan Lainnya | 1.757 | 46.688 | 108.890 |
| | Jumlah | 10.384 | 306.706 | 608.895 |

**Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2012**

Jumlah usaha penggaraman terbanyak berada di Kabupaten Bangkalan (295 unit), pengasapan terbanyak di Kabupaten Tulungagung (531 unit), pemindangan terbanyak di Kabupaten Sumenep (385 unit). Produksi ikan olahan di Jawa Timur mencapai 608.895 ton dengan produk terbanyak berupa ikan pindang yang mencapai 315.655 ton (52% dari total produksi ikan olahan).

**Struktur Input, Output dan Nilai Tambah Subsektor Perikanan**

Dalam tabel 5 input output Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 subsektor perikanan dapat dikelompokkan menjadi perikanan laut, perikanan darat dan pengolahan ikan. Input adalah semua barang, jasa dan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Dalam tabel 5 input-output, input terbagi atas dua yaitu input antara dan input primer. Input antara adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi yang kemudian dimanfaatkan oleh sektor lain maupun oleh sektor itu sendiri dalam proses kegiatan produksi, sedangkan input primer merupakan balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi yang berperan dalam proses produksi.

Total input dalam perekonomian Jawa Timur mencapai Rp1.678 trilyun. Sub-sektor perikanan laut menggunakan input sebesar Rp28 trilyun (1,67%) perikanan darat sebesar Rp16 trilyun (0,96%) dan pengolahan ikan menggunakan input sebesar Rp17,5 trilyun (1,05%). Kecilnya persentase input subsektor perikanan dalam perekonomian Jawa Timur menunjukkan masih rendahnya peran subsektor perikanan sebagai input dalam perekonomian Jawa Timur.

Besarnya input antara diantara subsektor perikanan yang terbesar adalah pengolahan ikan sebesar Rp10,52 trilyun diikuti perikanan darat Rp5,32 trilyun dan perikanan laut sebesar Rp5,24 trilyun. Besarnya input antara menunjukkan besarnya peran sektor lain maupun sektor perikanan sendiri dalam proses produksi subsektor perikanan. Komponen terbesar input antara pada subsektor perikanan laut adalah pedagang eceran (24,8%) diikuti penyediaan makanan dan minuman (14,99%) dan pakan ternak (14,85%). Besarnya keterkaitan dengan pedagang eceran dan penyediaan makan dan minuman terutama digunakan sebagai kebutuhan logistik dalam operasi penangkapan ikan, sedangkan besarnya kebutuhan pakan ternak digunakan dalam kegiatan budidaya tambak. Sementara itu pada subsektor perikanan darat, input antara yang terbesar adalah pakan ternak (42,58%) diikuti pedagang eceran (21,17%) dan perikanan darat sendiri (9,47%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perikanan darat mempunyai ketergantungan tinggi terhadap kebutuhan pakan ternak. Untuk subsektor pengolahan ikan, input antara terbesar adalah perikanan darat (43,14%) diikuti perikanan laut (19,75%) dan pedagang eceran (13,92%). Nilai input antara dari perikanan darat yang lebih besar dari perikanan laut menunjukkan sebagian besar perikanan darat dikonsumsi dalam bentuk olahan sedangkan ikan laut cenderung dikonsumsi dalam bentuk segar.

Total output perekonomian Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar Rp681 trilyun dengan kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan eceran bukan motor dan mobil sebesar 21,6% kemudian sektor rokok sebesar 12%. Sedangkan kontribusi sektor perikanan laut hanya sebesar 4,11%; perikanan darat sebesar 2,36% dan pengolahan ikan sebesar 2,58%. Rendahnya kontribusi output sektor perikanan terhadap pembentukan output Jawa Timur menunjukkan rendahnya peran sektor perikanan dalam perekonomian Jawa Timur.

Nilai tambah bruto merupakan balas jasa terhadap faktor produksi yang tercipta karena adanya kegiatan produksi. Nilai tambah bruto dipengaruhi oleh besarnya output dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi pada suatu sektor. Nilai tambah bruto sektor perekonomian di Jawa Timur tahun 2010 mencapai Rp951,856 trilyun. Subsektor pengolahan ikan memberikan kontribusi sebesar Rp5,824 trilyun (0,61%), perikanan laut sebesar Rp18,904 trilyun (1,99%) dan perikanan darat sebesar Rp9,855 trilyun (1,04%). Nilai tambah bruto ditinjau dari komponen pendapatan dapat dilihat dari komponen upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto. Perbandingan struktur pembentuk nilai tambah bruto di Jawa Timur pada subsektor perikanan laut, perikanan

darat, pengolahan ikan dan total sektor perekonomian dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa nilai tambah bruto sektor perekonomian di Jawa Timur didominasi oleh komponen surplus usaha termasuk subsektor perikanan. Besarnya proporsi surplus usaha menunjukkan besarnya nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pengusaha. Proporsi nilai tambah yang dinikmati oleh tenaga kerja dalam bentuk upah dan gaji pada subsektor perikanan berada pada kisaran 18,6% sampai dengan 35,49%, sementara untuk total sektor perekonomian berada pada 31,27%.

**Analisis Input-Output Subsektor Perikanan Laut, Perikanan Darat dan Pengolahan Ikan**

Peran subsektor perikanan dalam perekonomian Jawa Timur secara sektoral dapat diketahui dari hasil analisis input-output pada tabel 5.

**Keterkaitan ke depan dan ke belakang**

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa subsektor perikanan laut dan darat mempunyai keterkaitan langsung kebelakang yang lebih kecil daripada subsektor pengolahan ikan. Namun untuk keterkaitan kedepan, subsektor perikanan laut dan perikanan darat mempunyai nilai yang lebih baik dari subsektor pengolahan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor pengolahan ikan lebih banyak menggunakan output sektor lain sebagai input, sedangkan subsektor perikanan laut dan darat lebih banyak menghasilkan output yang digunakan sebagai input oleh sektor lain. Subsektor perikanan yang memiliki keterkaitan ke depan total terbesar adalah subsektor perikanan darat yaitu sebesar 1,4086 dan kemudian sektor perikanan laut sebesar 1,2297. Sedangkan subsektor pengolahan ikan mempunyai nilai keterkaitan ke depan total sebesar 1,0731.

Keterkaitan ke depan total sektor perikanan laut sebesar 1,2297 terdiri dari keterkaitan ke depan langsung sebesar 0,1925 dan keterkaitan ke depan tidak langsung sebesar 1,0372. Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan satu satuan unit output subsektor perikanan laut, maka tambahan output tersebut akan didistribusikan sebagai input ke sektor lainnya dan subsektor perikanan laut itu sendiri sehingga akan menaikkan output sektor-sektor tersebut secara langsung sebesar 0,1925 rupiah dan secara tidak langsung sebesar 1,0372 rupiah. Dengan kata lain setiap kenaikan satu unit output sektor perikanan laut, maka tambahan output tersebut akan didistribusikan kepada sektor yang menggunakan input dari subsektor perikanan laut, sehingga mendorong peningkatan proses produksi subsector tersebut karena adanya input yang lebih banyak. Peningkatan output dari sektor yang menggunakan input dari sektor perikanan laut tersebut akan lebih lanjut didistribusikan kesektor-sektor lain sehingga akan mengakibatkan tambahan output pada perekonomian secara total sebesar 1,2297 rupiah.

Subsektor perikanan yang memiliki keterkaitan ke belakang total terbesar adalah subsektor pengolahan ikan sebesar 1,8486 kemudian subsektor perikanan darat sebesar 1,5454 dan perikanan laut sebesar 1,2790. Besarnya nilai keterkaitan kebelakang total subsektor pengolahan ikan menunjukkan bahwa pengolahan ikan sangat terkait erat dengan output dari sub sektor lain. Keterkaitan ke belakang total sektor pengolahan ikan sebesar 1,8486, yang terdiri dari keterkaitan ke belakang langsung sebesar 0,5994 dan keterkaitan ke belakang tdak langsung sebesar 1,2492.

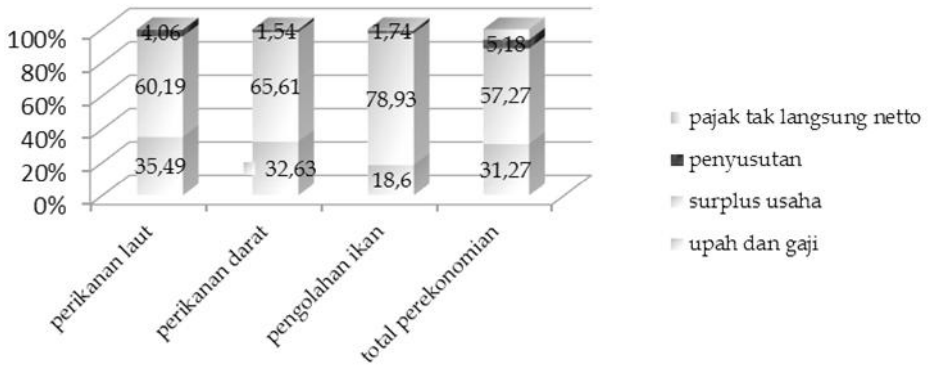


**Gambar 1**
**Struktur Komponen Pendapatan Pembentuk Nilai Tambah Bruto Perekonomian di Jawa Timur, 2010**

**Sumber : BPS, 2012**

**Tabel 5**
**Hasil Analisis Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2010**

| No | Parameter | Perikanan laut | | Perikanan darat | | Pengolahan ikan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai | Rang-king | Nilai | Rang-king | Nilai | Rang-king |
| 1 | Keterkaitan langsung ke belakang (DBL) | 0,1870 | 79 | 0,3301 | 38 | 0,5994 | 7 |
| 2 | Keterkaitan langsung ke depan (DFL) | 0,1925 | 48 | 0,3504 | 30 | 0,0530 | 75 |
| 3 | Keterkaitan ke belakang langsung dan tidak langsung (DIBL) | 1,2790 | 73 | 1,5454 | 28 | 1,8486 | 5 |
| 4 | Keterkaitan ke depan langsung dan tidak langsung (DIFL) | 1,2297 | 50 | 1,4086 | 33 | 1,0731 | 75 |
| 5 | Indeks daya penyebaran (IDP) | 0,9019 | 73 | 1,0897 | 28 | 1,3035 | 5 |
| 6 | Indeks derajat kepekaan (IDK) | 0,8671 | 50 | 0,9932 | 33 | 0,7567 | 75 |
| 7 | *a. Output multiplier* (OM) | 1,2790 | 73 | 1,5454 | 28 | 1,8486 | 5 |
| | *b. Total value added multiplier* (VAM) | 1,2332 | 77 | 1,4506 | 48 | 2,5768 | 8 |
| | *c. Income multiplier* (IM) | 1,1821 | 85 | 1,3639 | 61 | 3,6005 | 9 |
| | *d. Employment multiplier* (EM) | 4,0087 | 24 | 1,4152 | 56 | 26,1958 | 6 |

**Sumber : BPS Jawa Timur, 2012**

Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan unit output subsektor pengolahan ikan, akan membutuhkan peningkatan penggunaan input dari sektor lain maupun dari subsektor pengolahan ikan sendiri secara langsung sebesar 0,5994 rupiah dan 1,2492 rupiah secara tidak langsung, atau sebesar 1,8486 rupiah secara total. Dengan kata lain, kenaikan satu unit output subsektor pengolahan ikan, akan

mengakibatkan tambahan penggunaan input pada subsektor pengolahan ikan. Tambahan input tersebut menyebabkan harus adanya tambahan output dari sektor yang akan digunakan sebagai input oleh subsektor pengolahan ikan. Peningkatan penggunaan input tersebut merupakan peningkatan output sektor lain, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan tambahan output pada perekonomian secara total sebesar 1,8486 rupiah.

Subsektor perikanan yang memiliki keterkaitan total terbesar adalah sektor perikanan darat sebesar 2,9540 kemudian sektor pengolahan ikan sebesar 2,9217 sedangkan sektor perikanan laut hanya memiliki keterkaitan total sebesar 2,5087. Angka keterkaitan total sektor perikanan darat, baik kedepan maupun kebelakang sebesar 2,954 menunjukan bahwa untuk setiap kenaikan satu satuan unit output sektor perikanan darat akan berdampak terhadap peningkatan output perekonomian sebesar 2,954 rupiah.

**Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan**

Besarnya daya penyebaran menunjukkan dampak perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Sektor yang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor hulu atau hilir baik melalui mekanisme transaksi pasar output maupun pasar input sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan. Untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki kemampuan mendorong pertumbuhan sektor-sektor hulu atau hilir baik melalui mekanisme transaksi pasar output maupun pasar input, dianalisa mengunakan daya penyebaran dan derajat kepekaan. Daya penyebaran adalah jumlah dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi. Derajat kepekaan sendiri merupakan jumlah dampak terhadap suatu sektor sebagai akibat perubahan seluruh sektor perekonomian.

Indeks daya penyebaran (IDP) menunjukkan kekuatan relatif permintaan akhir suatu sektor dalam mendorong pertumbuhan produksi total seluruh sektor perekonomian. Daya penyebaran ini merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan kebelakang sektor-sektor yang ada. Sektor yang memiliki daya penyebaran yang tinggi (>1) sebagai indikasi memiliki keterkaitan kebelakang yang tinggi atau memiliki daya tarik yang kuat untuk mendorong sektor-sektor di belakang (sektor hulu). Untuk membandingkan dampak yang terjadi pada setiap sektor, maka daya penyebaran maupun derajat kepekaan harus dinormalkan dengan cara membagi dengan rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Maka dari proses tersebut didapatkan Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK).

Nilai IDP yang diperoleh menunjukkan bahwa perikanan darat dan pengolahan ikan memiliki nilai IDP lebih besar dari satu yang berarti subsektor ini memiliki daya penyebaran yang tinggi. Nilai IDP pengolahan ikan sebesar 1,3035 dapat diartikan bahwa pengolahan ikan memiliki kekuatan relatif secara rata-rata dibandingkan dengan sektor lainnya secara total sebesar 1,3035 satuan pada sektor-sektor hulu secara langsung dan tidak langsung. Sementara itu perikanan laut hanya memiliki daya penyebaran sebesar 0,9019.

Indeks Derajat Kepekaan (IDK) merupakan ciri yang menunjukkan sumbangan relatif suatu sektor dalam memenuhi permintaan akhir keseluruhan sektor perekonomian. Nilai indeks derajat kepekaan lebih besar dari satu menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor hilirnya yang memakai input dari sektor tersebut. Subsektor perikanan masih memiliki indeks derajat kepekaan yang kecil. IDK terbesar pada subsektor perikanan terdapat pada subsektor perikanan darat dengan nilai 0,9932 diikuti perikanan laut sebesar 0,8671 dan pengolahan ikan sebesar 0,7567. Perikanan darat yang bernilai 0,9932

berarti bahwa kekuatan rata-rata untuk mensuplai input terhadap sektor-sektor hilir lain secara keseluruhan sebesar 0,9932 satuan. Sektor dengan nilai IDP dan IDK tinggi merupakan suatu sektor yang memiliki basis domestik, baik itu dari sisi input maupun output. Artinya sektor-sektor tersebut lebih banyak menggunakan input antara yang berasal dari produksi domestik dan lebih banyak digunakan outputnya untuk memenuhi kebutuhan input antara dari sektor produksi domestik. Dengan kata lain sektor tersebut lebih sedikit menggunakan input yang berasal dari impor dan sedikit digunakan untuk memenuhi permintaan ekspor. Sektor yang dengan nilai IDP tinggi memberikan indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai pengaruh yang nyata terhadap sektor lain. Sebaliknya, sektor yang mempunyai IDK tinggi berarti sektor tersebut akan cepat terpengaruh bila terjadi perubahan pada sektor lainnya.

Berdasarkan daya penyebaran dan derajat kepekaan, sektor-sektor produksi pada perekonomian Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Kelompok I adalah sektor yang memiliki derajat kepekaan dan daya penyebaran yang tinggi (diatas rata-rata)
2. Kelompok II adalah sektor yang memiliki derajat kepekaan tinggi (diatas rata-rata) dan daya penyebaran yang rendah (dibawah rata-rata)
3. Kelompok III adalah sektor yang memiliki derajat kepekaan dan daya penyebaran rendah (dibawah rata-rata)
4. Kelompok IV adalah sektor yang memiliki daya penyebaran tinggi tetapi derajat kepekaan rendah.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh 15 sektor yang termasuk dalam kelompok I, 17 sektor dalam kelompok II, 48 sektor dalam kelompok III dan 30 sektor dalam kelompok IV. Nilai IDP dan IDK subsektor perikanan darat dan pengolahan ikan termasuk dalam kelompok empat bersama dengan 28 sektor lainnya. Sementara itu subsektor perikanan laut termasuk dalam kelompok tiga. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan darat dan pengolahan ikan mempunyai daya penyebaran yang relatif tinggi dibanding perikanan laut.

**Dampak Pengganda**

Angka pengganda ouput subsektor pengolahan ikan relatif besar yaitu sebesar 1,8486 atau peringkat lima. Angka ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada permintaan akhir sektor perikanan sebesar satu unit rupiah maka akan mengakibatkan peningkatan output total sektor-sektor dalam perekonomian sebesar 1,8486 rupiah. Nilai angka pengganda output pengolahan ikan yang cukup besar menunjukkan bahwa pengolahan ikan merupakan salah satu subsektor perekonomian yang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penciptaan output dalam sektor perekonomian di Jawa Timur.

Angka pengganda output untuk perikanan laut termasuk rendah yaitu hanya sebesar 1,2790 atau peringkat 73, sedangkan perikanan darat relatif tinggi yaitu mencapai 1,5454 atau peringkat 28. Rendahnya angka pengganda output perikanan laut karena masih belum optimalnya pemanfaatan output perikanan laut dimana output perikanan laut lebih banyak dikonsumsi secara langsung tanpa adanya pengolahan lebih lanjut.

Subsektor perikanan yang memiliki angka pengganda pendapatan terbesar adalah subsektor pengolahan ikan sebesar 3,6005 atau peringkat sembilan, sedangkan perikanan laut hanya sebesar 1,1821 atau peringkat 85, sedangkan perikanan darat sebesar 1,3639 atau peringkat 61. Angka pengganda pendapatan pengolahan ikan sebesar 3,6005 berarti bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada pengolahan ikan sebesar satu rupiah, akan meningkatkan pendapatan rumah tangga total atau peningkatan pembayaran atas balas jasa pemakaian tenaga kerja berupa upah atau gaji total sebesar 3,6005 rupiah dalam perekonomian. Nilai angka pengganda pendapatan rumah tangga di sektor pengolahan ikan yang lebih besar daripada per-

ikanan laut dan perikanan darat menunjukan bahwa balas jasa atau upah tenaga kerja pada pengolahan ikan lebih baik daripada perikanan laut dan darat.

Subsektor perikanan yang memiliki angka pengganda nilai tambah terbesar adalah subsektor pengolahan ikan sebesar 2,5768 atau peringkat delapan, sedangkan perikanan laut hanya sebesar 1,2332 atau peringkat 77, sedangkan perikanan darat sebesar 1,4506 atau peringkat 48. Angka pengganda nilai tambah pengolahan ikan sebesar 2,5768 berarti bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada pengolahan ikan sebesar satu rupiah, akan meningkatkan nilai tambah total sebesar 2,5768 rupiah dalam perekonomian. Nilai angka pengganda nilai tambah di subsektor pengolahan ikan yang tinggi dan termasuk dalam delapan besar diantara 110 sektor menunjukan bahwa subsektor pengolahan ikan merupakan salah satu subsektor yang mampu mendorong pertumbuhan nilai tambah perekonomian secara total dengan cepat.

Subsektor perikanan yang memiliki angka pengganda tenaga kerja terbesar adalah pengolahan ikan sebesar 26,1958 atau peringkat keenam, kemudian perikanan laut sebesar 4,0087 atau peringkat 24 dan perikanan darat sebesar 1,4152 atau peringkat 56. Angka pengganda tenaga kerja pengolahan ikan sebesar 26,1956 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu juta rupiah di subsektor pengolahan ikan akan menciptakan 26 lapangan kerjaan baru di perekonomian. Sementara itu, kondisi riil menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja usaha perikanan masih terkonsentrasi pada *on-farm* sehingga perlu faktor pendorong pengembangan investasi atau industrialisasi sehingga usaha pengolahan ikan dapat berkembang lebih baik dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi (Haryati, 2009).

Nilai angka pengganda tenaga kerja pada subsektor perikanan laut dan darat yang lebih rendah dari pengolahan ikan tidak terlepas dari masih rendahnya nilai tambah (*added value*) yang diperoleh dari pemanfaatan output perikanan laut dan darat. Agar pengganda tenaga kerja subsektor perikanan laut dan darat lebih besar lagi maka diperlukan usaha peningkatan nilai tambah output perikanan laut dan darat.

**Spasial Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Subsektor Perikanan di Jawa Timur**

PDRB subsektor perikanan kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode 2008-2012 hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif yang ditunjukkan dengan nilai *total shift* ($d_{ij}$) yang sebagian besar positif. Hanya terdapat dua kota yang mempunyai *total shift* negatif yaitu Kota Surabaya (-9.270) dan Kota Probolinggo (-29.691). Daerah yang mempunyai nilai pertumbuhan PDRB perikanan terbesar adalah Kabupaten Lamongan (308.108), Kabupaten Banyuwangi (231.117) dan Kabupaten Gresik (79.794) (Tabel 6).

Perkembangan relatif PDRB subsektor perikanan kabupaten/kota terhadap total PDRB di Jawa Timur pada periode 2008-2012 mengalami pergeseran bernilai negatif yang ditunjukkan dengan nilai *proportional shift* ($m_{ij}$) subsektor perikanan yang negatif. Nilai *proportional shift* yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa pertumbuhan sub-sektor perikanan lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan total PDRB di Jawa Timur. Kondisi ini menjadi alasan pentingnya revitalisasi subsektor perikanan agar dapat tumbuh lebih baik dan memberikan *share* yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (Herath *et al*., 2011).

Pergeseran bersih (PB) diperoleh dari hasil penjumlahan antara *proportional shift* dan *differential shift* di setiap sektor perekonomian. Apabila PB > 0, maka pertumbuhan subsektor perikanan kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk dalam kelompok yang progresif (maju), sedangkan PB < 0 artinya subsektor perikanan di kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk kelompok yang lamban (Prawira dan Hamidi, 2013).

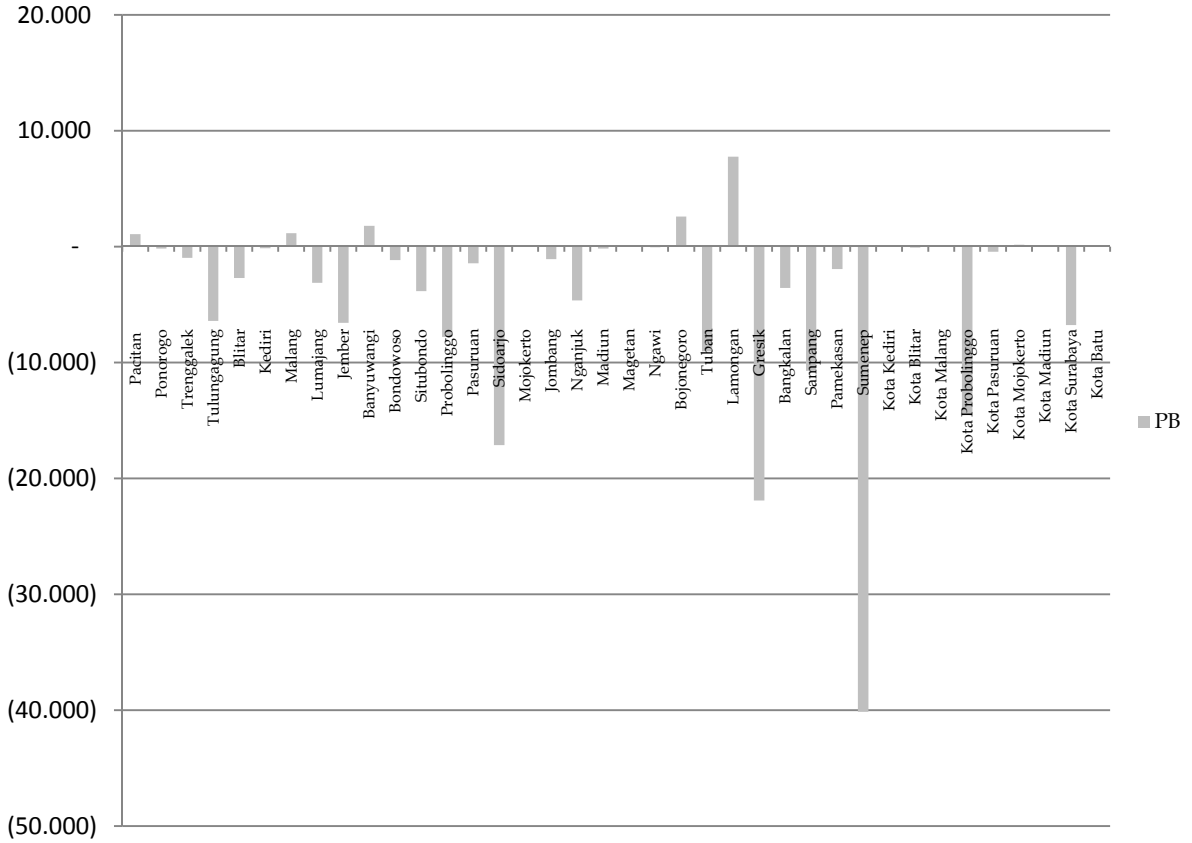


**Sumber : BPS, 2012**

**Gambar 2**
**Pergeseran Bersih PDRB Subsektor Perikanan di Jawa Timur, 2008-2012**

Pergeseran bersih subsektor perikanan di Jawa Timur pada umumnya bernilai negatif. Hanya ada enam kabupaten/kota yang mempunyai pergeseran bersih positif yaitu Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Banyuwangi, Malang, Pacitan, Mojokerto dan Kota Mojokerto. Keenam daerah tersebut dapat dikatakan daerah yang mempunyai pertumbuhan subsektor perikanan yang progresif sedangkan daerah lainnya termasuk daerah yang pertumbuhan sub-sektor perikanannya lamban.

Kabupaten/kota di Jawa Timur mempunyai keunggulan kompetitif maupun spesialisasi subsektor perikanan yang bervariasi. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertumbuhan PDRB subsektor perikanan tahun 2008-2012, kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Daerah yang tergabung dalam kode satu merupakan daerah basis perikanan tetapi tidak mempunyai keuntungan kompetitif karena nilai pertumbuhan relatifnya lebih rendah dari rata-rata daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/kota yang tergabung dalam kelompok dua bukan merupakan daerah basis perikanan dan tidak mempunyai keunggulan kompetitif. Kabupaten/kota yang tergabung dalam kode tiga mempunyai ke untungan kompetitif tetapi belum menjadi sektor basis. Sementara itu, daerah yang termasuk dalam kode empat merupakan kabupaten/kota yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada subsektor perikanan.

Berdasarkan data PDRB subsektor perikanan tahun 2008-2012 dapat diketahui beberapa daerah mempunyai laju pertumbuhan relatif yang positif dan terspesialisasi pada subsektor perikanan. Beberapa daerah yang kompetitif dan terspesialisasi pada subsektor perikanan tergabung dalam kode empat yang terdiri dari Kabupaten Lamong-

**Tabel 6**
**Hasil Analisis *Shift Share* PDRB Subsektor Perikanan di Jawa Timur tahun 2008-2012**

| No. | Kab./Kota | $d_{ij}$ | SSA klasik | | | SSA Esteban-Marquillas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $g_{ij}$ | $m_{ij}$ | $c_{ij}$ | $a_{ij}$ | $c^*_{ij}$ | $E_{ij(t0)}$-$E^*_{ij}$ | Kode |
| 1 | Pacitan | 14.527 | 9.813 | (3.842) | 8.556 | 1.289 | 7.267 | 4.883 | 4 |
| 2 | Ponorogo | 927 | 1.686 | (660) | (99) | 970 | (1.068) | (54.655) | 2 |
| 3 | Trenggalek | 32.722 | 37.083 | (14.518) | 10.157 | 5.600 | 4.557 | 67.508 | 4 |
| 4 | Tulungagung | 10.596 | 39.365 | (15.411) | (13.358) | 959 | (14.317) | (9.331) | 2 |
| 5 | Blitar | 13.263 | 25.900 | (10.140) | (2.498) | 509 | (3.007) | (17.442) | 2 |
| 6 | Kediri | 9.191 | 10.058 | (3.938) | 3.071 | (9.670) | 12.741 | (104.574) | 3 |
| 7 | Malang | 36.226 | 31.774 | (12.439) | 16.891 | (25.254) | 42.145 | (156.854) | 3 |
| 8 | Lumajang | 11.860 | 25.800 | (10.101) | (3.840) | 1.322 | (5.162) | (29.323) | 2 |
| 9 | Jember | 18.293 | 47.991 | (18.788) | (10.910) | 3.358 | (14.268) | (48.771) | 2 |
| 10 | Banyuwangi | 231.117 | 223.932 | (87.668) | 94.852 | 69.659 | 25.193 | 543.008 | 4 |
| 11 | Bondowoso | 5.233 | 10.399 | (4.071) | (1.096) | 722 | (1.818) | (22.631) | 2 |
| 12 | Situbondo | 19.957 | 36.363 | (14.236) | (2.170) | (1.021) | (1.150) | 56.458 | 1 |
| 13 | Probolinggo | 53.200 | 87.761 | (34.358) | (203) | (119) | (85) | 168.986 | 1 |
| 14 | Pasuruan | 15.358 | 22.227 | (8.702) | 1.832 | (1.214) | 3.046 | (48.617) | 3 |
| 15 | Sidoarjo | 62.296 | 138.414 | (54.188) | (21.930) | 821 | (22.751) | (17.107) | 2 |
| 16 | Mojokerto | 2.246 | 1.856 | (727) | 1.117 | (24.623) | 25.739 | (135.128) | 3 |
| 17 | Jombang | 378 | 5.172 | (2.025) | (2.770) | 15.674 | (18.444) | (96.654) | 2 |
| 18 | Nganjuk | 5.679 | 26.082 | (10.211) | (10.192) | 970 | (11.162) | (8.197) | 2 |
| 19 | Madiun | 1.378 | 2.161 | (846) | 64 | (430) | 494 | (48.287) | 3 |
| 20 | Magetan | 257 | 410 | (161) | 7 | (317) | 324 | (57.591) | 3 |
| 21 | Ngawi | 3.998 | 4.084 | (1.599) | 1.513 | (4.763) | 6.277 | (42.451) | 3 |
| 22 | Bojonegoro | 17.369 | 5.972 | (2.338) | 13.735 | (78.596) | 92.331 | (112.841) | 3 |
| 23 | Tuban | 3.196 | 44.468 | (17.409) | (23.864) | 689 | (24.553) | (4.239) | 2 |
| 24 | Lamongan | 308.109 | 272.272 | (106.592) | 142.429 | 125.095 | 17.334 | 789.591 | 4 |
| 25 | Gresik | 79.794 | 179.298 | (70.194) | (29.310) | (14.980) | (14.330) | 302.570 | 1 |
| 26 | Bangkalan | 5.257 | 21.204 | (8.301) | (7.646) | (813) | (6.833) | 7.449 | 1 |
| 27 | Sampang | 31.368 | 80.645 | (31.572) | (17.705) | (14.183) | (3.522) | 213.310 | 1 |
| 28 | Pamekasan | 46.603 | 54.472 | (21.325) | 13.457 | 10.522 | 2.934 | 140.636 | 4 |
| 29 | Sumenep | 56.364 | 235.202 | (92.080) | (86.758) | (76.071) | (10.687) | 680.938 | 1 |
| 30 | Kota Kediri | 15 | 61 | (24) | (23) | 44.115 | (44.138) | (396.280) | 2 |
| 31 | Kota Blitar | 215 | 571 | (224) | (133) | 1.102 | (1.235) | (15.654) | 2 |
| 32 | Kota Malang | 3 | 29 | (11) | (15) | 38.002 | (38.017) | (243.271) | 2 |
| 33 | Kota Probolinggo | (29.691) | 34.500 | (13.506) | (50.685) | (34.525) | (16.160) | 77.595 | 1 |
| 34 | Kota Pasuruan | 350 | 2.279 | (892) | (1.037) | 1.750 | (2.786) | (12.695) | 2 |
| 35 | Kota Mojokerto | 755 | 48 | (19) | 725 | (99.507) | 100.232 | (21.957) | 3 |
| 36 | Kota Madiun | 581 | 473 | (185) | 294 | (6.756) | 7.050 | (35.890) | 3 |
| 37 | Kota Surabaya | (9.270) | 21.693 | (8.493) | (22.470) | 404.013 | (426.483) | (1.287.876) | 2 |
| 38 | Kota Batu | 80 | 117 | (46) | 10 | (608) | 618 | (24.617) | 3 |

**Sumber : BPS, 2013**

an, Banyuwangi, Pamekasan, Trenggalek dan Pacitan. Terspesialisasinya perikanan pada daerah tersebut menunjukkan bahwa perikanan menjadi sektor basis pada daerah tersebut dengan artian bahwa daerah tersebut mempunyai kemampuan ekspor subsektor perikanan ke daerah lain. Daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi mempunyai potensi keberhasilan yang lebih besar untuk pengembangan subsektor perikanan jika dibandingkan dengan daerah yang berada

pada kode satu, dua maupun tiga sehingga prioritas pembangunan perikanan hendaknya dilaksanakan pada daerah tersebut.

Beberapa daerah hanya memiliki salah satu keunggulan kompetitif maupun spesialisasi. Daerah yang hanya mempunyai keunggulan kompetitif tetapi tidak terspesialisasi pada subsektor perikanan berada pada kode tiga yang terdiri dari sepuluh kabupaten/kota. Daerah yang termasuk dalam kode tiga meliputi Kota Mojokerto, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Pasuruan, Madiun, Magetan, Kediri, Mojokerto dan Malang. Daerah yang tergabung dalam kode tiga ini mempunyai pertumbuhan relatif subsektor perikanan yang positif tetapi belum mampu menjadi daerah basis perikanan di Jawa Timur. Sementara itu, daerah yang mempunyai keunggulan spesialisasi perikanan tetapi nilai pertumbuhan relatifnya negatif tergabung dalam kode satu yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Daerah yang tergabung dalam kode satu meliputi Kabupaten Sumenep, Gresik, Sampang, Probolinggo, Situbondo, Bangkalan dan Kota Probolinggo. Daerah yang tergabung dalam kode satu sebenarnya mempunyai keunggulan spesialisasi pada subsektor perikanan tetapi pada periode tahun 2008-2012 mengalami pertumbuhan relatif yang negatif. Daerah yang termasuk dalam kode satu dan tiga dapat menjadi daerah pendukung kode empat dalam pengembangan perikanan di Jawa Timur karena mempunyai potensi perikanan yang unggul dari salah satu sudut pandang tingkat kompetitif maupun spesialisasi perikanannya.

Daerah yang tidak termasuk dalam kode satu, tiga dan empat tergabung dalam kode dua yaitu daerah yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada subsektor perikanan. Terdapat 15 kabupaten/kota di Jawa Timur yang termasuk dalam kode dua yaitu Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Nganjuk, Tulungagung, Tuban, Blitar, Bondowoso, Lumajang, Jember, Ponorogo dan Jombang. Daerah yang tergabung dalam kode dua pada umumnya merupakan daerah perkotaan dan bukan daerah basis perikanan di Jawa Timur. Daerah yang termasuk dalam kode dua bisa menjadi prioritas terakhir dalam pengembangan perikanan di Jawa Timur karena kurang kompetitif dan tidak terspesialisasi pada subsektor perikanan jika dibandingkan daerah yang berada pada kode empat, satu dan tiga.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Subsektor perikanan yang terbagi menjadi perikanan *on-farm* dan *off-farm* secara sektoral dalam rangka meningkatkan perekonomian di Jawa Timur dapat dikembangkan dengan mengutamakan strategi pengembangan pengolahan ikan diikuti dengan perikanan darat dan perikanan laut. Sub-sektor pengolahan ikan mempunyai indeks daya penyebaran, dampak pengganda out-put, dampak pengganda tenaga kerja dan dampak pengganda pendapatan yang relatif tinggi sehingga dapat memberikan dampak output yang besar dalam perekonomian Jawa Timur.

Secara spasial pengembangan perikanan di Jawa Timur dapat dilakukan pada daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi subsektor perikanan secara sekaligus yang meliputi Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, Pamekasan, Trenggalek dan Pacitan. Adapun daerah yang hanya unggul secara kompetitif atau spesialisasi saja dapat menjadi daerah pendukung pengembangan subsektor perikanan.

### Saran

Arah pembangunan perikanan sebaiknya diutamakan pada usaha peningkatan nilai tambah perikanan dengan meningkatkan produktivitas usaha pengolahan ikan sehingga mampu menarik atau memanfaatkan output subsektor perikanan laut dan darat. Prioritas wilayah pengembangan perikanan hendaknya memperhatikan aspek keunggulan kompetitif dan spesialisasi

perikanan suatu daerah dan unsur pemerataan pengembangan ekonomi di Jawa Timur.

Pada penelitian ini keunggulan kompetitif dan spesialisasi dibatasi pada tinjauan nilai tambah sektor perikanan. Pada penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk dilakukan pengkajian pada aspek yang lain seperti keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada tenaga kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Arifin, Z. 2006. Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Berbasis Perikanan Di Jawa Timur. *Jurnal Humanity* 1(2): 142-151.

----------. 2009. Kesenjangan dan Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Ti-mur. *Jurnal Humanity* 4(2): 154-164.

Arifien, M., Fafurida, dan V. Noekent. 2012. Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13(2): 288-302.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. 2012. *Tabel Input-Output Jawa Timur 2010*. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

----------. 2013. *Jawa Timur dalam Angka 2012*. BPS Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Budiawan, A. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Industri Kecil Pengolahan Ikan di Kabupaten Demak. *Economic Development Analysis Journal* 2(1): 1-8.

Dahuri, R. 2002. Kebijakan dan Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. *Jumal Pesisir dan Lautan* 4(2): 1-14.

Dault A, A. K. Muzakir, dan A. Suherman. 2008. Peran Sektor Perikanan Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Saintek Perikanan* 3(2): 51-63.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. 2013. *Statitik Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2012*. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.

Dinc, M. dan K. E. Haynes. 1999. Sources of regional inefficiency. *The Annals of Regional Science* 33:469–489.

Esteban, J. 2000. Regional convergence in Europe and the industry mix : a shift-share analysis. *Regional Science and Urban Economics* 30:353–364.

---------- dan Marquillass. 1972. Shift and Share Analysis Revisited. *Regional and Urban Economic Journal* 2(3): 249-261.

Fejika, P. I., J.O. Ayanda, dan A. M. Sule. 2007. Socio-Economic Variables Affecting Aquaculture Production Practices in Borgu Local Government Area of Niger State, Nigeria. *Journal of Agricultural and Social Research (JASR)* 7(2): 20-29.

Haryati, E. 2009. Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berorientasi pada Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. *Jurnal Ekuitas* 12(2): 245-269.

Hendarto, T. 2010. Analisis Disparitas Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dalam Perspektif Pengelolaan Pesisir Provinsi Jawa Timur. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Herath, J., T. G. Gebremedhin, dan B. M. Maumbe. 2011. A Dynamic Shift-Sha-re Analysis of Economic Growth in West Virginia. *Journal of Rural and Community Development* 6(2): 155-169.

Herzog, H. W. dan R. Olsen. 1977. *Shift-Share Analysis Revisited: The Allocation Effect and The Stability of Regional Structure*. OAK Ridge National Laboratory. Tennesse.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2013. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2012*. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Mardiantony, T. dan U. Ciptomulyono. 2012. Penerapan Analisis Input Output dan ANP dalam Penentuan Prioritas

Pengembangan Sub Sektor Industri di Jawa Timur. *Jurnal Teknik ITS* 1: 455-459.

Miradani, S. D. 2010. Analisis Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Nugroho, I. 2008. Agropolitan: Suatu Kerangka Berpikir Baru dalam Pembangunan Nasional. *Journal of Indonesian Applied Economics* 2(2): 174-186.

Panggabean, M. A. 2013. Studi Peran Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah di Kota Sibolga. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Panuju, D. R. dan E. Rustiadi. 2005. *Dasar-Dasar Perencanaan Wilayah*. Laboratorium Perencanaan Pengembangan Wilayah Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Permana, C. D. dan A. Asmara. 2010. Analisis Peranan dan Dampak Investasi Infrastruktur terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis* 7(1): 48-58.

Prawira, Y. dan W. Hamidi. 2013. Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2001-2010. *Jurnal Ekonomi* 21(1): 1-21.

Priyarsono D. S., Sahara, dan M. Firdaus. 2007. *Ekonomi Regional*. Universitas Terbuka. Jakarta.

Putra, D. Y. 2011. Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia : Analisis Input-Output. *Tesis*. Universitas Andalas. Padang.

Rustiadi, E., S. Saefulhakim, dan D. R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Sholeh, M. 2005. Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi Terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 2(2): 156-167.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Badouse Media. Padang.

Susanto. 2011. Peranan Sektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Belitung. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Susilowati, I. 2006. *Keselarasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan bagi Manusia dan Lingkungan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Syarief, A. 2013. Analisis Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahyuni, K. D., I. Hanafi, dan C. Saleh. 2013. Evaluasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Kota Batu. *J-PAL* 4(1): 26-37.